

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DAN UKL UPL
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN KUDUS**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Ilmu Lingkungan**

**NUNUNG PRIHATINING TIAS
L4K007025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

TESIS

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DAN UKL UPL
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN KUDUS

Disusun oleh :

NUNUNG PRIHATINING TIAS
L 4K007025

Mengetahui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Pembimbing Kedua

Dra. Sri Suryoko, M. Si

Mengetahui
Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DAN UKL UPL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUDUS

Disusun oleh :

NUNUNG PRIHATINING TIAS
L 4K007025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 15 Januari 2009
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

.....

Anggota

1. Dra. Sri Suryoko, M. Si

.....

2. Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H. M.Hum

.....

3. Ir. Agus Hadiyanto, M. T

.....

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2009

(NUNUNG PRIHATINING TIAS)

BIODATA PENULIS



Nunung Prihatining Tias, lahir di Kabupaten Demak tanggal 8 Juli 1976. Sejak Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) menempuh pendidikan di Kabupaten Kudus. Lulus SMA tahun 1994, terus melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Gudeg Yogyakarta yaitu Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Yogyakarta.

Lulus kuliah tahun 2000, terus bekerja di perusahaan swasta. Mulai akhir tahun 2004 mengabdikan diri di Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Kudus sebagai staf pada bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Penulisan Tesis berjudul Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL yang ada di Kabupaten Kudus, khususnya bagi perusahaan yang sudah mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan, Selain itu juga untuk mengetahui pengawasan yang telah dilakukan pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tesis ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jauh tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di Kabupaten Kudus. Disamping juga sebagai pendekatan kepada kalangan industri agar kesadaran terhadap lingkungan hidup meningkat serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam membuat kebijakan di bidang lingkungan hidup serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang keterlibatannya dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES dan Dra. Sri Suryoko, M. Si selaku dosen pembimbing
2. Seluruh jajaran pimpinan dan staf karyawan program studi MIL Undip
3. Seluruh jajaran pimpinan dan staf karyawan Dinas Lingdup Tamben Kabupaten Kudus, khususnya bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Dinas/Instansi terkait, pihak pemrakarsa, pihak Kecamatan, pihak Desa, masyarakat sekitar maupun pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu
5. Segenap keluarga tercinta yang telah sepenuhnya mendukung dalam penyusunan Tesis
6. Teman – teman seperjuangan angkatan 19 program MIL Undip

Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua terutama bagi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kudus.

Kudus, 31 Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan masalah	4
1.3. Tujuan penelitian	4
1.4. Kegunaan penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Industri dan lingkungan hidup	6
2.2. Pembangunan berwawasan lingkungan	7
2.3. Peraturan perundangan mengenai AMDAL dan UKL UPL	9
2.4. Peraturan tentang AMDAL dan UKL UPL di bidang industri	11
2.5. Proses dan prosedur penyusunan AMDAL dan UKL UPL	
2.5.1. Pengertian tentang AMDAL dan UKL UPL	13
2.5.2. Tujuan penyusunan AMDAL dan UKL UPL	15
2.5.3. Prosedur penyusunan AMDAL dan UKL UPL	16
2.6. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan UKL UPL	22
2.7. Pelaksanaan AMDAL UKL UPL Di Kabupaten Kudus	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Tipe penelitian	29
3.2.	Ruang lingkup penelitian	29
3.3.	Sumber, Jenis dan teknik pengumpulan data	
3.3.1.	Sumber data	30
3.3.2.	Jenis data	32
3.3.3.	Teknik pengumpulan data	33
3.4.	Sampel penelitian	34
3.5.	Kerangka berpikir	35
3.6.	Teknik dan analisis data	36
3.7.	Tahap penelitian	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Deskripsi Kegiatan	
4.1.1.	PT Djarum unit Primary Process	38
4.1.2.	PT Enggal Subur Kertas	42
4.1.3.	PT Pura Nusa Persada	48
4.1.4.	PT Pura unit Power Plant	55
4.1.5.	Terminal Cargo, terminal bus, jalan tembus, pusat Perdagangan dan ruko di Kawasan BWK IV Kudus	62
4.2.	Hasil penelitian pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL	
4.2.1.	Perusahaan/pemrakarsa kegiatan	
4.2.1.1.	PT Djarum unit Primary Process	69
4.2.1.2.	PT Enggal Subur Kertas	73
4.2.1.3.	PT Pura Nusa Persada	78
4.2.1.4.	PT Pura Power Plant	84
4.2.1.5.	Terminal Cargo, jalan tembus	89
4.2.2.	Dinas/Instansi	93
4.2.2.1.	Persepsi tentang dokumen AMDAL UKL UPL	93
4.2.2.2.	Mekanisme pengawasan pengelolaan	94
4.2.2.3.	Pelaksanaan pengawasan pengelolaan	95

4.2.3.	Masyarakat sekitar	99
4.2.3.1.	Pengetahuan masyarakat tentang AMDAL	99
4.2.3.2.	Keterlibatan masyarakat dalam AMDAL	100
4.2.3.3.	Dampak kegiatan perusahaan	102
4.3.	Evaluasi pelaksanaan AMDAL UKL UPL	
4.3.1.	Evaluasi pelaksanaan di PT Djarum unit Primary Process	110
4.3.2.	Evaluasi pelaksanaan di PT Enggal Subur Kertas	113
4.3.3.	Evaluasi pelaksanaan di PT Pura Nusa Persada	116
4.3.4.	Evaluasi pelaksanaan di PT Pura Power Plant	120
4.3.5.	Evaluasi pelaksanaan di Terminal Cargo dan Jalan tembus	123
4.4.	Usulan penyempurnaan pelaksanaan AMDAL UKL UPL Di Kabupaten Kudus	
4.4.1.	Usulan penyempurnaan di perusahaan	125
4.4.2.	Usulan penyempurnaan di masyarakat	127
4.4.3.	Usulan penyempurnaan di Dinas/Instansi	128
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	130
5.2.	Saran	131

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1. Jumlah dokumen AMDAL dan UKL UPL kegiatan industri di Kabupaten Kudus	25
2.2. Daftar nama industri sebagai sampel penelitian	34
4.1. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di PT Djarum unit Primary Process	69
4.2. Jumlah dokumen UKL UPL	69
4.3. Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL	70
4.4. Pemahaman dokumen UKL UPL	70
4.5. Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen UKL UPL	71
4.6. Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen UKL UPL	71
4.7. Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL	72
4.8. Yang mendorong pelaksanaan pngelolaan lingkungan	72
4.9. Pelaksanaan UKL UPL di PT Djarum Primary Proces	73
4.10. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di PT Enggal Subur Kertas	73
4.11. Jumlah dokumen UKL UPL	74
4.12. Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL	74
4.13. Pemahaman dokumen UKL UPL	74
4.14. Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemanauan dalam dokumen UKL UPL	75
4.15. Pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di perusahaan	76
4.16. Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL	76
4.17. Yang mendorong pelaksanaan pngelolaan lingkungan	76
4.18. Kebijakan perusahaan tentang CSR	77
4.19. Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan	77
4.20. Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	77
4.21. Pelaksanaan UKL UPL di PT Enggal Subur Kertas	78
4.22. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di PT Pura Nusa Persada	79

4.23.	Jumlah dokumen UKL UPL	79
4.24.	Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL	79
4.25.	Pemahaman dokumen UKL UPL	79
4.26.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen UKL UPL	80
4.27.	Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen UKL UPL	81
4.28.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	81
4.29.	Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL	81
4.30.	Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan	82
4.31.	Kebijakan perusahaan tentang CSR	82
4.32.	Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan	82
4.33.	Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	82
4.34.	Pelaksanaan UKL UPL di PT Pura Nusa Persada	83
4.35.	Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di PT Pura Power Plant	84
4.36.	Jumlah dokumen UKL UPL	84
4.37.	Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL	85
4.38.	Pemahaman dokumen UKL UPL	85
4.39.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen UKL UPL	86
4.40.	Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen UKL UPL	86
4.41.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	86
4.42.	Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL	87
4.43.	Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan	87
4.44.	Kebijakan perusahaan tentang CSR	87
4.45.	Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan	88
4.46.	Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	88
4.47.	Pelaksanaan UKL UPL di PT Pura Power Plant	88
4.48.	Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di Terminal Cargo	89
4.49.	Pemahaman dokumen UKL UPL	89
4.51.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen UKL UPL	90
4.52.	Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen UKL UPL	90

4.53.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	91
4.54.	Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL	91
4.55.	Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan	91
4.56.	Kebijakan perusahaan tentang CSR	92
4.57.	Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	92
4.58.	Pelaksanaan UKL UPL di PT Djarum Primary Proses	93
4.59.	Persepsi responden tentang latarbelakang penyusunan dokumen dokumen AMDAL UKL UPL	94
4.60.	Keikutsertaan Dinas/Instansi dalam pembahasan draft dokumen Pengelolaan lingkungan	94
4.61.	Cara Dinas/Instansi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dan pemantauan lingkungan	94
4.62.	Kendala Dinas/Instansi dalam melakukan pengelolaan lingkungan	95
4.63.	Pengawasan secara bersama dengan Dinas/Instansi terkait	95
4.64.	Kinerja perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan	96
4.65.	Penyimpangan pelaksanaan UKL UPL	97
4.66.	Keluhan masyarakat sehubungan dengan dampak kegiatan	98
4.67.	Efektivitas pelaksanaan UKL UPL	98
4.68.	Pengetahuan masyarakat tentang AMDAL UKL UPL	99
4.69.	Pengetahuan masyarakat tentang pengelola lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan	100
4.70.	Tujuan penyusunan studi pengelolaan lingkungan dibuat dan Dilaksanakan	100
4.71.	Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan AMDAL UKL UPL	100
4.72.	Perluah masyarakat mengetahui AMDAL UKL UPL	100
4.73.	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100
4.74.	Hambatan masyarakat alam pelaksanaan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	101
4.75.	Peranan Instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan	102

4.76.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT Djarum Primary	103
4.77.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT Enggal Subur Kertas	104
4.78.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT Pura Nusa Persada	105
4.79.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT Pura Power Plant	106
4.80.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar Terminal Cargo	107
4.81.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan PT Djarum unit Primary Process	108
4.82.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan PT Enggal Subur Kertas	108
4.83.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan PT Pura Nusa Persada	108
4.84.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan PT Pura unit Power Plant	109
4.85.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan Terminal Cargo	109
4.86.	Efektivitas pelaksanaan AMDAL UKL UPL	110
4.87.	Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di PT Djarum unit Primary Process	110
4.88.	Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di PT Enggal Subur Kertas	113
4.89.	Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di PT Pura Nusa Persada	116
4.90.	Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di PT Pura unit Power Plant	120
4.91.	Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di Terminal Cargo	123

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1 Pendekatan dampak lingkungan dengan pendekatan teknik (<i>engineering approach</i>)	17
2 Pendekatan dampak lingkungan dengan pendekatan limbah (<i>waste approach</i>)	18
3. Prosedur penyusunan AMDAL/UKL UPL	22
4. Kerangka berpikir	35
5. Gambar PT Djarum unit Primary Process	38
6. Gambar PT Enggal Subur Kertas	43
7. Gambar PT Pura Nusa Persada	49
8. Gambar PT Pura unit Power Plant	56
9. Gambar Terminal Cargo, Terminal Bus, Jalan Tembus, Ruko di kawasan BWK IV Kabupaten Kudus	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Isian kuesioner untuk pemrakarsa	1
2. Isian kuesioner untuk Dinas/Instansi	7
3. Isian kuesioner untuk masyarakat	13
4. Hasil kuesioner perusahaan	18
5. Hasil kuesioner Dinas/Instansi	31
6. Hasil kuesioner masyarakat	33
7. Peta administrasi Kabupaten Kudus	41
8. Peta lokasi PT Djarum Primary Proses	42
9. Peta lokasi PT Enggal Subur Kertas	43
10. Peta lokasi PT Pura Nusa Persada	44
11. Peta lokasi PT Pura Power Plant	45
12. Peta lokasi Terminal Cargo	46

ABSTRAK

Kudus merupakan salah satu kabupaten terkecil di propinsi Jawa Tengah Perekonomian di Kabupaten Kudus di dukung oleh berbagai sektor dengan sektor andalan di bidang industri terutama industri rokok, sehingga Kudus terkenal dengan sebutan kota kretek. Sampai saat ini tidak semua usaha yang ada di Kabupaten Kudus memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. Tingkat ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Di samping penegakan hukum yang masih lemah dan belum ada sanksi yang tegas bagi usaha yang sudah atau belum melaksanakan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kajian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL pada perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan, gambaran keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap beberapa sampel terpilih. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling yang dibatasi 5 (lima) sampel yaitu dipilih industri yang mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Data penelitian didapat dari 3 (tiga) kelompok responden yaitu pemrakarsa, Dinas/Instansi dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran melestarikan lingkungan, (2) Industri menganggap sebagai beban yang harus ditanggung, (3) Keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih rendah, (4) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan karena pengawasan pemerintah dan untuk mencegah gejolak masyarakat, (5) Pengawasan yang dilakukan Instansi terkait lingkungan hidup bersifat pasif dan reaktif, koordinasi yang kurang antara Instansi terkait, (6) dari kelima sampel terpilih, 2 sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah efektif, 2 sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan cukup efektif serta sisanya 1 sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum efektif, (7) Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Ada beberapa usulan perbaikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan yaitu: (1) Perlu pengawasan secara aktif, kontinyu serta koordinasi antara Dinas terkait, (2) Sosialisasi, keterlibatan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar, (3) Sosialisasi dari Dinas terkait tentang pengelolaan lingkungan, (4) Perlu peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan, (5) Penegakan hukum dan sanksi yang tegas, (6) Pemberian penghargaan yang dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola lingkungan.

Kata kunci: AMDAL & UKL UPL-evaluasi efektivitas-usulan pengelolaan.

ABSTRACT

Kudus is the smallest regency in Central Java. The economic condition in Kudus supported by various factor in which industri sector as dominant sector, especially cigarette industry in which Kudus known as the town of cigarette (Kota Kretek). Up to now, not all industries have document on Environmental Impact Assesment. The environmental compliance of industries is low in dealing with environmental problems. Besides this, the weakness of law enforcement and no strict punishment for business disobeying the law. Given this, a study to analyze the effectiveness of AMDAL and UKL UPL is absolutely needed.

The reseach is aimed to identify and evaluate the realization of both AMDAL and UKL UPL for company completed with environmental document, description of people involvement and government supervision. This reseach conducted by using survey method with descriptive analysis method through some selected sample, and using purposive sampling limited to 5 industries. They are industri which have high environmental potential risk. Data of research taken from three respondent group, project proponent (industries), government and local people.

This reseach shows that (1) environmental management and monitoring plan conducted by industry doesn't lead to the awareness for keeping environmental sustainability, (2) industri assume it as a burden that should be hold, (3) people involvement and awareness in managing and monitoring the environment plan are poor, (4) environmental management and monitoring plan is conducted due to the government supervision and to prevent the community pressure, (5) Supervision conducted by government was passive and reactive, less coordination among related agencies, (6) from the five selected sample, 2 sample were effective, 2 sufficient and 1 sample insufficient. (7) lack of regulations dealing with environmental management.

There are some proposal required to deal with environmental management which are (1) active supervision and good coordination among related agencies, (2) communication, involvement, and open acces to local people, (3) socialisation from related government agencies about environmental management (4) regulations dealing with environmental management, (5) law enforcement and proper punishment, (6) giving award to develop the awareness for creating environmental sustainability.

Key word : AMDAL & UKL UPL - evaluation of effectiveness - proposed management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Wilayah Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten terkecil di Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 425.16 km² / 42.516 ha. Secara administratif Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan, 125 desa dan 7 kelurahan. Perekonomian Kabupaten Kudus didukung oleh berbagai sektor dengan sektor andalan bidang industri terutama industri rokok yang memberikan kontribusi terbesar, sehingga Kota Kudus disebut sebagai Kota Kretek. Jumlah perusahaan skala besar menengah sesuai data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2007 berjumlah 100 unit, serta industri kecil berjumlah ratusan hingga ribuan unit. Sebagai salah satu kabupaten di wilayah propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus mempunyai letak yang cukup strategis, karena berada di jalur pantai utara (pantura), persimpangan antara Semarang-Kudus-Pati dan Jepara-Kudus-Grobogan. Meskipun Kabupaten Kudus relatif tidak mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang memadai, tetapi potensi di luar sumber daya alam cukup prospektif apabila dikelola secara professional melalui kegiatan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Pembangunan di Kabupaten Kudus disamping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat, pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mempunyai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/industri maka diberlakukan kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) bagi pemrakarsa kegiatan. Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif. Demikian juga untuk kegiatan industri yang sudah berjalan juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan /atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada kenyataannya rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Hermin Rosita (Koran Suara Akar Rumput, 2008) bahwa sudah sekitar 9.000 dokumen AMDAL telah disetujui oleh pemerintah, namun tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya selain belum semua komisi AMDAL berfungsi dengan baik, juga karena lemahnya penegakan hukum dalam aspek lingkungan hidup. Menurut Suryo Adiwibowo (2004) pada pertemuan PPLH se-Jawa Tengah di Yogyakarta mempresentasikan materi penguatan AMDAL sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL kurang optimal adalah sebagai berikut:

1. AMDAL dan implementasinya oleh pemrakarsa masih dipandang sebagai beban bukan sebagai kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup

2. Tidak ada insentif bagi pemrakarasa yang:
 - menyusun atau tidak menyusun AMDAL
 - menyusun AMDAL secara baik dan benar dan yang asal jadi
 - mengimplementasikan hasil AMDAL dengan yang tidak berniat melaksanakan hasil MDAL
3. AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan daripada sebagai instrumen pencegahan dampak lingkungan
4. Lemahnya penegakan hukum terhadap:
 - Kegiatan / usaha yang tidak menyusun AMDAL
 - AMDAL disusun pada saat kegiatan sudah mulai
 - Kegiatan / usaha yang tidak mengimplementasikan RKL atau RPL
5. Belum ada integrasi antara AMDAL, ijin lokasi dan ijin operasi.

Berdasarkan rencana strategik (renstra) kabupaten Kudus tahun 2003-2008 ditetapkan suatu rumusan visi kabupaten Kudus lima tahun mendatang yaitu: terwujudnya masyarakat sejahtera yang religius, berkeadilan dan mandiri dalam hubungan yang kondusif, didukung industri, perdagangan dan pertanian yang berwawasan lingkungan. Sedangkan dalam kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus mempunyai visi membangun pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus menuju terwujudnya Kudus yang lestari tahun 2020.

Penyusunan studi AMDAL dan UKL UPL hingga saat ini telah dapat diterapkan di Kabupaten Kudus, namun tidak semua usaha dan atau kegiatan yang ada di Kabupaten Kudus mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan tersebut. Tingkat ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengujian terhadap beberapa sungai yang ada di Kabupaten Kudus, terutama yang berdekatan dengan lokasi sampel penelitian yaitu Sungai Madat dan Sungai Wulan. Untuk beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, Tembaga berada diatas baku mutu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sungai yang ada di Kabupaten Kudus mempunyai kualitas air kelas IV yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan

untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (Sumber: Laporan Pemantauan Kualitas Air Kabupaten Kudus Tahun 2007)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL untuk beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus dengan melakukan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup disuatu perusahaan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL yang ada di Kabupaten Kudus, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan ?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar industri dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan?
3. Bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan ?
4. Bagaimana efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL pada perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan
2. Mengidentifikasi dan mengevaluai keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan

3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dalam evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan di perusahaan
4. Mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan
5. Mengajukan usulan perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di suatu perusahaan

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jauh mengenai studi kelayakan lingkungan baik berupa AMDAL atau UKL UPL dan pelaksanaannya, serta bagaimana peraturan dibidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh industri. Di samping hal tersebut juga sebagai referensi pendekatan yang harus dilakukan kepada kalangan industri agar kesadaran terhadap lingkungan hidup meningkat serta sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam membuat kebijakan dibidang lingkungan hidup serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang keterlibatannya dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. INDUSTRI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perkembangan teknologi dan industri yang pesat dewasa ini ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dampak positif memang diharapkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia, namun dampak yang bersifat negatif memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia. Semua orang yang ingin memperoleh kenyamanan dan kualitas harus terlibat dalam usaha mengatasi dampak yang bersifat negatif, baik dari kalangan ilmuwan, industriawan, pemerintah maupun masyarakat biasa.

Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk dapat mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung alam diartikan sebagai kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Berkurangnya daya dukung alam akan menyebabkan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia menjadi berkurang.

Industrialisasi telah menyebabkan banyak perubahan dalam masyarakat, yang sebelumnya didominasi masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Kegiatan industri telah mendorong pertumbuhan ekonomi bagi sebagian masyarakat dengan meningkatnya pendapatan sehingga mendapatkan kesempatan yang lebih besar terhadap pendidikan dan peningkatan standar kehidupan yang lebih baik. Namun demikian ada harga yang perlu dibayar yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya.

2.2. PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan sekaligus dengan melestarikan kemampuan lingkungan agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Gagasan pembangunan berkelanjutan dikenal juga dengan pembangunan berwawasan lingkungan, secara bertahap mulai dimasukkan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional. Hal tersebut terdapat dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya direvisi dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Emil Salim (1990) dan Hadi (2001) mengemukakan beberapa konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan negara berkembang yaitu:

1. Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang
Pembangunan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Segala kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitas lingkungan.
2. Perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan
Hal tersebut dimaksudkan agar kualitas lingkungan dapat terjaga, misal : adanya standar baku mutu air limbah, baku mutu udara dan sebagainya
3. Penerapan AMDAL pada setiap kegiatan
Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan Amdal atau UKL UPL. Setelah dampak penting tersebut diidentifikasi, diperkirakan dan dievaluasi maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dampak tersebut dikelola. Pengelolaan tersebut tertuang dalam RKL RPL.

4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan didaerah kritis, missal sungai sebagai tempat pembuangan. Langkah yang diambil adalah dengan adanya program kali bersih atau terkenal dengan sebutan prokasih.
5. Usaha memasukkan pertimbangan lingkungan kedalam perhitungan ekonomi sebagai dasar untuk kebijakan ekonomi lingkungan.

Sony Keraf (2002) menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk mensinkronkan dan memberi bobot yang sama bagi 3 aspek utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Gagasan tersebut mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus terkait satu sama lain, sehingga unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan dan dipertentangkan satu sama lain.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep yang mengkaitkan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup sering menjadi bahan pembicaraan bersama, yang dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR). Sejak awal tahun 2000, banyak perusahaan swasta yang mengembangkan program CSR tersebut. CSR merupakan integrasi antara bisnis dan nilai – nilai dimana kepentingan *stake holder* , *customer*, pegawai, investor dan lingkungan tercermin dalam kebijakan dan tindakan perusahaan.

Beberapa hal yang berkaitan dengan CSR, yaitu bahwa CSR merupakan tindakan sukarela yang bertujuan mendekatkan perusahaan dengan persoalan nyata di masyarakat sehingga dapat ditawarkan solusi yang harus dilakukan perusahaan. Adapun bentuk- bentuk CSR antara lain pengelolaan lingkungan kerja secara baik, membentuk kemitraan perusahaan bersangkutan dengan masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Selain itu wujud CSR bisa berbentuk *community development* (pemberdayaan masyarakat) dengan mempersiapkan kemampuan masyarakat lokal setelah perusahaan beroperasi atau membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Berkaitan dengan lingkungan, CSR bisa dimulai dari lingkungan perusahaan itu sendiri yang antara lain mencakup penanganan limbah, pengelolaan industri yang tidak mencemari lingkungan.

Konsep CSR (*corporate social responsibility*) menuntut perusahaan tidak hanya mengembangkan keuntungan bagi dirinya tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas dan masyarakat disekitarnya. CSR juga bukan hanya kegiatan amal yang dilakukan kepada masyarakat sekitar, tetapi lebih pada pengembangan masyarakat. Suatu perusahaan seharusnya tidak hanya mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga mempunyai etika dalam bertindak menggunakan sumberdaya manusia dan lingkungan guna turut mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Ashoke K Roy (2006), CSR mencakup 2 konsep utama yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yaitu *accountabilitas dan transparancy*. *Stakeholder* diharapkan tidak hanya memikirkan keuangan, tetapi pelaksanaan yang baik ditunjukkan dengan perhatian pada isu hak asasi manusia, etika bisnis, kebijakan lingkungan, kontribusi perusahaan, pengembangan masyarakat dan masalah pada tempat kerja. Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan dan tindakan mengenai dampak yang akan diterima masyarakat, pekerja dan lingkungan secara transparan.

2.3. PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI AMDAL DAN UKL UPL

Adapun peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Undang Undang Nomor 23 th 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pada Undang – Undang tersebut berisi :
 - a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup serta berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
 - b. Pada pasal 15, setiap usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup termasuk dalam kajian kelayakan suatu kegiatan/usaha, jadi termasuk dalam tahap perencanaan

- c. Menetapkan ketentuan pidana dan denda bagi pihak yang dengan sengaja ataupun akibat kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, secara garis besar berisi :
 - a. Pasal 1, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
 - b. Pasal 3, Bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak menyusun AMDAL, wajib untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang pembinaanya berada pada instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan tersebut
 - c. Pasal 32, Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaa rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Instansi tersebut yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan :
 - pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundangan dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa
 - penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada menteri secara berkala, sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.
 3. Pelaksanaan peraturan pemerintah tentang AMDAL dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup maupun kepala Bappedal yaitu:
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang jenis rencana dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan RKL RPL
 - Keputusan Kepala Bappedal no 56 tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting
 - Keputusan Kepala Bappedal no 299/Bappedal/II/1996 tentang pedoman teknis kajian aspek social dalam penyusunan AMDAL
 - Keputusan Kepala Bappedal no 8 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL
 - Keputusan Kepala Bappedal no 9 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan AMDAL
4. Pelaksanan pengelolaan lingkungan untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 86 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan UKL UPL
 5. Kebijakan tentang AMDAL, di Kabupaten Kudus dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Kudus nomor 30 tahun 2003 tentang pedoman tata kerja komisi penilai Amdal Kabupaten Kudus dan peraturan Bupati Kudus nomor 2 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan UKL UPL di Kabupaten Kudus.

2.4. PERATURAN TENTANG AMDAL DAN UKL UPL DI BIDANG INDUSTRI

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, ada berbagai sektor atau bidang yang wajib menyusun dokumen AMDAL, sedangkan untuk sektor yang tidak masuk dalam peraturan tersebut cukup menyusun dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL UPL). Berbagai bidang usaha dan atau kegiatan yang termasuk didalamnya adalah :

1. Bidang pertahanan
2. Bidang pertanian

3. Bidang Perikanan
4. Bidang kehutanan
5. Bidang perhubungan
6. Bidang teknologi satelit
7. Bidang perindustrian
8. Bidang pekerjaan umum
9. Bidang sumber daya energi dan mineral
10. Minyak dan gas bumi
11. Listrik dan pemanfaatan energi
12. Bidang pariwisata
13. Bidang pengembangan nuklir
14. Bidang pengelolaan limbah B3
15. Bidang rekayasa genetika

Bidang industri adalah salah satu bidang kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang berupa pencemaran air, udara, tanah, gangguan kebisingan maupun bau. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan proses produksi atau penggunaan lahan yang cukup luas.

Beberapa jenis industri sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 yang termasuk harus menyusun AMDAL adalah sebagai berikut :

1. Industri semen (yang dibuat melalui sistem klinker)
2. Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya
3. Industri petrokimia hulu
4. Kawasan industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)
5. Industri galangan kapal dengan sistem gravung dock
6. Industri amunisi dan bahan peledak
7. Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1-6 dengan penggunaan areal
 - a. Urban
 - Metropolitan, luas > 5 ha
 - Kota besar, luas >10 ha

- Kota sedang, luas > 15 ha

- Kota kecil, luas >20 ha.

b. Rural, luas > 30 ha.

Sedangkan untuk industri yang tidak wajib menyusun AMDAL, tetap mempunyai kewajiban melakukan kajian dan pengelolaan lingkungan seperti tercantum dalam pasal 3 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, bagi rencana usaha dan atau kegiatan diluar usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantuan lingkungan hidup (UKL UPL) sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002, tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bahwa upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantaun lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2.5. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL UPL

Penyusunan AMDAL dan UKL UPL melalui prosedur dan proses yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup serta peraturan lainnya.

2.5.1 PENGERTIAN TENTANG AMDAL DAN UKL UPL

Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun1999 tentang AMDAL pasal 1 ada beberapa pengertian yang harus dipahami adalah sebagai berikut:

a. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang diakibatkan oleh suatu rencana dan atau kegiatan.

- b. Dampak besar dan penting yang dimaksud adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Pedoman mengenai ukuran dampak besar dan penting sesuai dengan Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting adalah sebagai berikut:
1. Jumlah manusia yang terkena dampak
Jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting bila manusia di wilayah studi ANDAL yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan di wilayah tersebut.
 2. Luas wilayah persebaran dampak
Suatu rencana usaha atau kegiatan bersifat penting bila mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, tidak berbaliknya dampak, kumulatif dampak.
 3. Lamanya dampak berlangsung
Dikatakan penting bila rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan.
 4. Intensitas dampak
Perubahan lingkungan yang timbul bersifat hebat, atau drastic, berlangsung di area yang relative luas, dalam kurun waktu yang relative singkat.
 5. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak
Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak primer.
 6. Sifat kumulatif dampak
Kumulatif mengandung pengertian bersifat bertambah, bertumpuk atau bertimbun. Dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan bersifat kumulatif

bila pada awalnya dampak tersebut tidak tampak atau tidak dianggap penting., tetapi karena aktivitas tersebut bekerja berulang kali atau terus menerus, maka lama kelamaan dampaknya bersifat kumulatif.

7. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak

Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi manusia.

- c. Sehubungan dengan judul Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus, maka ada istilah yang perlu dipahami yaitu efektivitas.

Efektivitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990) berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (pengaruhnya), akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, dapat membawa hasil. Menurut Komaruddin (1994) efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL merupakan tanggung jawab semua pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. AMDAL harus dilakukan sebagai bagian dari studi kelayakan dan AMDAL harus diintegrasikan dengan pemberian ijin usaha kegiatan yang terkait dengan operasi usaha dan atau kegiatan. Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL yang efektif dan efisien diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.5.2 TUJUAN PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL UPL

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka sejak awal perencanaan sudah harus memperkirakan perubahan kondisi lingkungan baik yang positif maupun yang negatif, dengan demikian dapat dipersiapkan langkah-langkah pengelolannya, cara untuk mengkaji perubahan kondisi tersebut melalui studi AMDAL. Dalam suatu kegiatan pembangunan, studi kelayakan umumnya

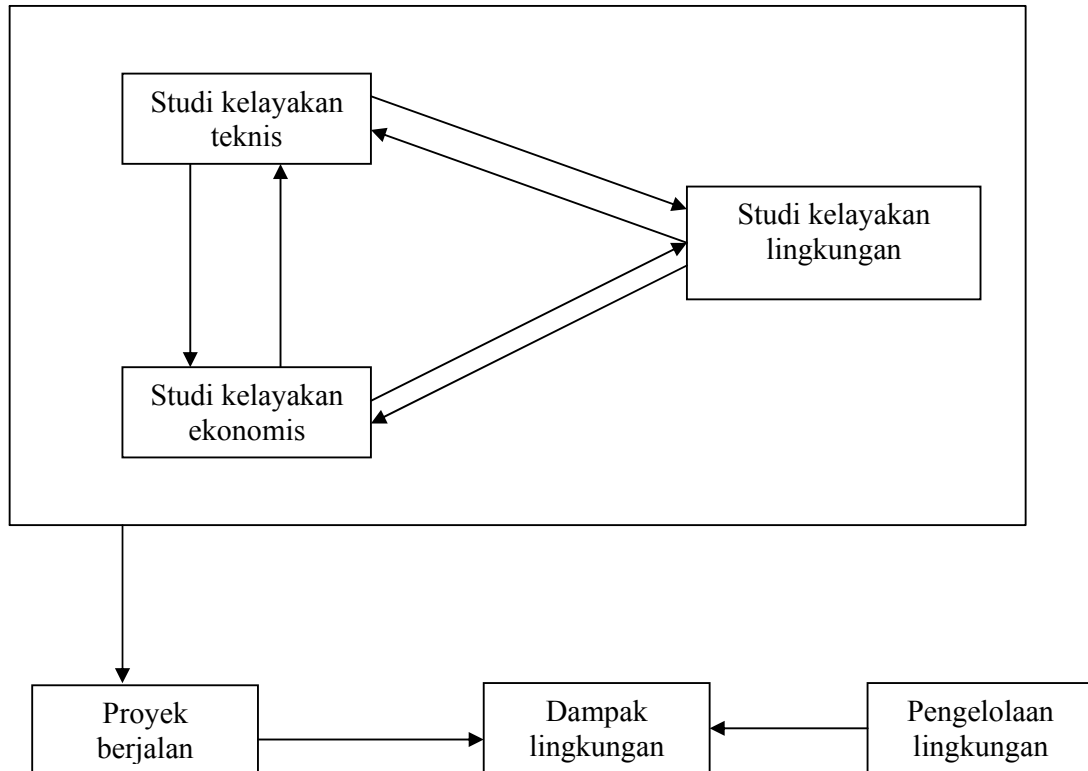
meliputi analisis dari aspek teknis dan ekonomis. Bagi usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus ditambahkan dengan studi kelayakan lingkungan. Oleh karena itu AMDAL sudah harus disusun dan mendapatkan persetujuan sebelum kegiatan konstruksi / pembangunan dilaksanakan. AMDAL bertujuan untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan perubahan kondisi lingkungan baik dari aspek geologi fisika kimia, biologi maupun sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat akibat adanya suatu kegiatan pembangunan.

2.5.3 PROSEDUR PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL UPL

Studi kelayakan lingkungan diperlukan bagi kegiatan usaha yang akan mulai melaksanakan pembangunan, sehingga dapat diketahui dampak yang akan timbul dan bagaimana cara pengelolaannya. Pembangunan disini bukan hanya pembangunan fisik tetapi mulai dari perencanaan, proses pembangunan sampai pembangunan tersebut berhenti dan kegiatan operasional berjalan. Jadi AMDAL lebih ditekankan pada akibat dari aktifitas dari suatu kegiatan.

Kajian kelayakan lingkungan adalah salah satu syarat untuk mendapatkan perijinan yang diperlukan bagi suatu kegiatan/usaha, seharusnya dilaksanakan secara bersama-sama dengan kelayakan teknis dan ekonomi. Dengan demikian ketiga kajian kelayakan tersebut dapat sama-sama memberikan masukan sehingga dapat dilakukan optimasi untuk mendapatkan keadaan yang optimum bagi proyek tersebut, terutama dampak lingkungan dapat dikendalikan melalui pendekatan teknis atau dapat disebut sebagai penekanan dampak negatif dengan *engineering approach*, pendekatan ini biasanya akan menghasilkan biaya pengelolaan dampak yang murah. Hubungan tersebut tersaji dalam gambar berikut.

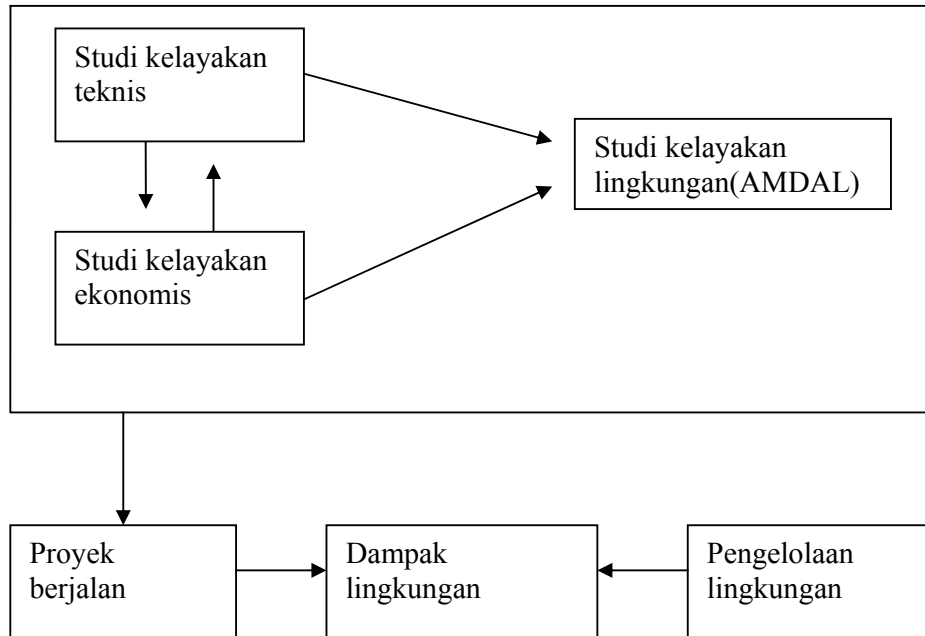
Gambar 1. Pengendalian Dampak Lingkungan Dengan Pendekatan Teknis (*Engineering Approach*)



Sumber : Gunarwan Suratmo, 2002

Kenyataan yang biasanya terjadi adalah bahwa studi kelayakan lingkungan tidak dapat mempengaruhi atau menghasilkan penyesuaian didalam studi kelayakan teknis maupun ekonomis. Keadaan ini dapat dikatakan usaha pengendalian dampaknya disebut sebagai pendekatan limbah atau *waste approach* dan biasanya akan tidak mudah dan mahal. Pendekatan ini terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Pengendalian Dampak Lingkungan Dengan Pendekatan Limbah (*Waste Approach*)



Sumber : Gunarwan Suratmo, 2002

Secara umum proses penyusunan kelayakan lingkungan dimulai dari proses penapisan untuk menentukan studi yang akan dilaksanakan menurut jenis kegiatannya, menyusun AMDAL atau UKL UPL. Proses penapisan ini mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL. Jika usaha dan atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar wajib AMDAL maka harus menyusun dokumen UKL UPL.

Bila kegiatan termasuk wajib AMDAL , maka ada beberapa prosedur penyusunan AMDAL yaitu :

1. Kerangka acuan ANDAL (KA ANDAL)

KA ANDAL merupakan ruang lingkup studi ANDAL yang disepakati bersama antara semua pihak terkait yaitu pemrakarsa, penyusun AMDAL, masyarakat maupun instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai kegiatan tersebut. KA ANDAL ini menjadi pegangan bagi semua pihak, baik

dalam penyusunan ANDAL maupun evaluasi dokumen studi tersebut. KA ANDAL merupakan hasil akhir dari proses pelingkupan yang memuat berbagai kegiatan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, berbagai parameter yang akan terkena dampak tersebut, lingkup wilayah studi maupun lingkup waktu.

2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Dalam proses penyusunan ANDAL langkah-langkah penting yang harus dilaksanakan oleh penyusun AMDAL yaitu :

- a. Pengumpulan data dan informasi tentang rencana kegiatan dan rona lingkungan awal. Data ini harus sesuai dengan yang tercantum dalam KA ANDAL.
- b. Proyeksi perubahan rona lingkungan awal sebagai akibat adanya rencana kegiatan. Seperti diketahui, bahwa kondisi atau kualitas lingkungan tanpa adanya proyek akan mengalami perubahan menurut waktu dan ruang. Demikian juga kondisi atau kualitas lingkungan tersebut akan mengalami perubahan yang lebih besar dengan adanya aktivitas suatu kegiatan menurut ruang dan waktu. Perbedaan besarnya perubahan antara “dengan proyek” dan “tanpa proyek” inilah yang disebut dampak lingkungan.
- c. Penentuan dampak penting terhadap lingkungan akibat rencana kegiatan. Berdasarkan hasil perkiraan dampak yang dilakukan dari dampak ke dua tersebut diatas, dapat diketahui berbagai dampak penting yang perlu dievaluasi
- d. Evaluasi dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting dievaluasi dari segi sebab akibat dampak tersebut terjadi, ciri dan karakteristik dampaknya, maupun pola dan luas persebaran dampak. Hasil evaluasi ini yang menjadi dasar penentuan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan nantinya.

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Pengelolaan lingkungan meliputi upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Menurut Soeryo Adiwibowo (2000), prinsip - prinsip pokok pengelolaan lingkungan yaitu :

- a. Upaya pencegahan dampak penting yang sekaligus meningkatkan efisiensi usaha dan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan harus merupakan prioritas utama.
 - b. Upaya pengelolaan lingkungan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen organisasi keseluruhan dan harus terus menerus diintegrasikan ke dalam proses produksi, produk maupun jasa.
 - c. Upaya pengelolaan lingkungan harus merupakan tanggung jawab seluruh manajemen dan karyawan organisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing
 - d. Upaya pengelolaan lingkungan harus membuka ruang yang cukup bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dengan melibatkan masyarakat harus berorientasi pada pengelolaan lingkungan sekaligus kebutuhan masyarakat serta dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.
4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Pemantauan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terencana untuk memperoleh data kondisi lingkungan hidup secara periodik diruang tertentu berikut perubahannya menurut waktu. Dokumen ini memuat rencana pemantauan terhadap berbagai komponen lingkungan hidup yang sumber dampaknya telah dikelola.

Menurut Soeryo Adiwibowo (2000), pemantauan lingkungan harus didesain sedemikian rupa agar memberikan masukan atau informasi periodik mengenai hal-hal berikut:

- a. Efektivitas upaya pencegahan dampak penting negatif
- b. Perubahan efisiensi usaha
- c. Antisipasi sejak dini resiko lingkungan yang akan timbul
- d. Efektivitas sistem manajemen yang dibangun
- e. Mutu lingkungan

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan yang diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan untuk mendapat persetujuan, selanjutnya kerangka acuan ini menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL RPL yang kemudian dipresentasikan di Komisi AMDAL.

Hasil penilaian Komisi terhadap dokumen ada tiga kemungkinan :

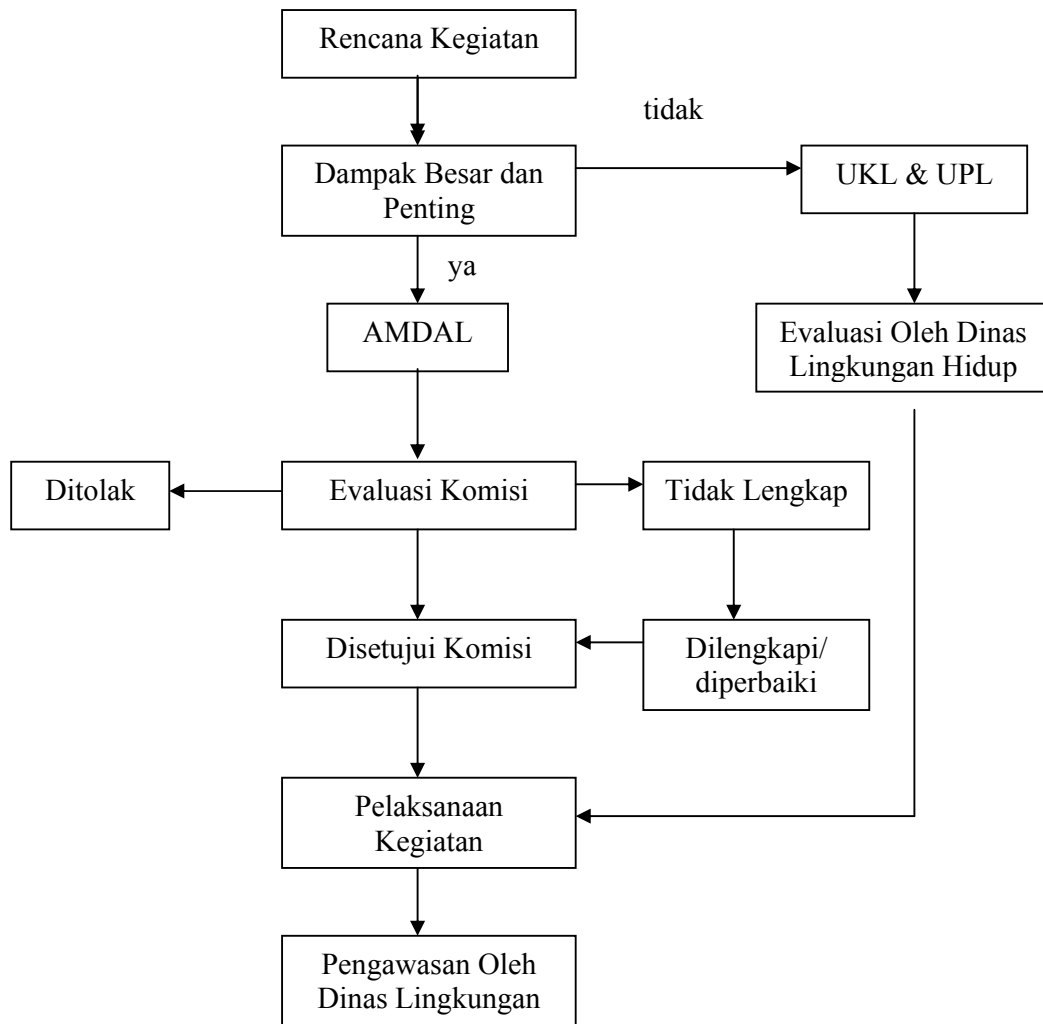
1. Hasil penilaian bahwa dokumen tidak lengkap sehingga harus diperbaiki
2. Hasil penilaian bahwa dokumen ditolak karena tidak ada teknologi untuk pengelolaan lingkungannya
3. Hasil dokumen disetujui yang berarti kegiatan dapat dilaksanakan.

Setelah itu dilakukan penyusunan ANDAL, RKL dan RPL kemudian dipresentasikan lagi dihadapan tim komisi penilai Amdal. Setelah disetujui maka dikeluarkan SK kelayakan lingkungan bagi usaha atau kegiatan tersebut dan kegiatan pembangunan maupun konstruksi dapat dimulai.

Kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL UPL), prosedur penyusunannya yaitu pemrakarsa melakukan studi kelayakan lingkungan sesuai dengan format yang berlaku selanjutnya dikonsultasikan dan diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan untuk mendapat persetujuan. Untuk Kabupaten Kudus UKL UPL akan dipresentasikan dihadapan tim pengarah sebagai Dinas / Instansi Pembina untuk mendapatkan arahan dan masukan sebelum adanya persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Kudus.

Proses penyusunan dokumen UKL dan UPL lebih sederhana dibandingkan dengan penyusunan AMDAL, karena cakupan kegiatan baik dampak, luasan yang lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan yang wajib AMDAL. Untuk lebih jelasnya pada lampiran dibelakang disertakan gambar prosedur penilaian dokumen AMDAL atau UKL UPL yang ada di Kabupaten Kudus.

Gambar 3. Prosedur Penyusunan AMDAL dan UKL UPL



Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

2.6. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL UPL

Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik.

Tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL ada 4 tahapan yaitu:

a. Tahap persiapan penyusunan AMDAL

Pada tahap persiapan, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya secara jelas dan lengkap. Pada pengumuman tersebut warga masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh hari) sejak pengumuman dilaksanakan.

b. Tahap penyusunan KA ANDAL

Pada saat penyusunan KA ANDAL, pemrakarsa wajib melakukan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan. Hasil dari konsultasi kepada warga masyarakat wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pelingkupan. Pemrakarsa harus mendokumentasikan semua berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi dan membuat rangkuman hasilnya untuk diserahkan kepada komisi penilai AMDAL sebagai lampiran dokumen KA ANDAL.

c. Tahap penilaian KA ANDAL

Pada tahap penilaian KA ANDAL warga masyarakat yang terkena dampak berhak duduk sebagai komisi penilai AMDAL melalui wakil masyarakat yang telah ditentukan. Warga masyarakat dapat menyampaikan saran pendapat, tanggapan sesuai dengan ketentuan dalam persidangan.

d. Tahap penilaian ANDAL, RKL RPL

Pada tahap penilaian ANDAL, RKL RPL warga masyarakat yang terkena dampak berhak duduk sebagai komisi penilai AMDAL melalui wakil masyarakat yang telah ditentukan. Warga masyarakat dapat menyampaikan saran pendapat, tanggapan sesuai dengan ketentuan dalam persidangan.

2.7. PELAKSANAAN AMDAL DAN UKL UPL DI KABUPATEN KUDUS

Untuk menangani dampak terhadap lingkungan yang akan timbul dari suatu kegiatan pembangunan di kabupaten Kudus, setiap rencana usaha / kegiatan wajib melakukan studi lingkungan , baik berupa penyusunan dokumen AMDAL maupun UKL UPL. Dari data yang ada, yang terbesar di Kabupaten Kudus adalah sektor industri. Skala kegiatan industri yang ada kebanyakan berskala menengah sehingga industri tersebut mempunyai dokumen UKL UPL. Sedangkan untuk industri yang berskala besar dan sudah menyusun dokumen AMDAL ada 4 buah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan bidang lingkungan yang semakin terbatas di tingkat pemerintah pusat dan propinsi, akan tetapi menjadi lebih besar di tingkat kabupaten / kota. Kewenangan pemerintah pusat di bidang lingkungan hidup tidak lagi sebagai pelaksana, akan tetapi sebagai penyusun kebijakan makro dan penetapan berbagai norma , standar, kriteria dan prosedur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 40 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL, penilaian terhadap dokumen lingkungan telah menjadi tanggung jawab daerah, melalui tahapan penilaian oleh komisi penilai AMDAL daerah masing – masing. Pemrakarsa mengajukan proposal rencana kegiatan ke Bappeda. Dari Bappeda, studi kelayakan akan dibahas dari kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis. Jika keduanya sudah memenuhi maka secara bersama, pemrakarsa untuk dapat menyusun studi kelayakan lingkungan. Pemrakarsa memberikan proposal tentang rencana usaha dan atau kegiatan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (Lingdup Tamben) Kabupaten Kudus. Kemudian dilakukan peninjauan kelengkapan, terus dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak untuk selanjutnya pemrakarsa menyusun dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku dan memberikan hasil penyusunan untuk disidangkan dihadapan komisi penilai

AMDAL. Sidang dilaksanakan dengan melalui presentasi oleh pihak konsultan dan pemrakarasa untuk mendapatkan tanggapan langsung dari anggota komisi baik secara lisan maupun tertulis, yang akan di jawab langsung oleh pemrakarasa baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk perbaikan dokumen setelah sidang selesai dilaksanakan. Perbaikan dokumen harus sesuai dengan notulen hasil sidang yang dikirim oleh komisi penilai AMDAL untuk mendapat persetujuan dari Bupati Kudus.

Untuk kegiatan yang di luar AMDAL, draft dokumen UKL UPL diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya dilakukan pemaparan dihadapan tim pengarah UKL UPL. Setelah itu dibuatkan persetujuan terhadap dokumen UKL UPL yang telah disetujui oleh tim pengarah tersebut.

Ketaatan pemrakarsa dalam melakukan studi lingkungan terlihat adanya peningkatan dari tahun ketahun. Hasil penilaian dokumen lingkungan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara tahun 2003 - 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Dokumen AMDAL dan UKL UPL Kegiatan Industri di Kabupaten Kudus

TAHUN	JUMLAH DOKUMEN	
	AMDAL	UKL UPL
2003	-	6
2004	1	9
2005	2	10
2006	1	12
2007	-	15
Jumlah total	4	52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Kudus, Tahun 2007

Berdasarkan jumlah dokumen lingkungan yang telah dievaluasi oleh tim Komisi AMDAL maupun tim pengarah UKL UPL Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2007 berjumlah 4 buah dokumen AMDAL dan 52 buah dokumen UKL UPL. Dari 100 unit usaha/kegiatan, sekitar 56 % sudah mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan.

Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah usaha/kegiatan yang wajib AMDAL sampai dengan tahun 2007 ada 4 perusahaan. Pada tahun 2003 belum ada perusahaan yang membuat dokumen AMDAL, tahun 2004 yang sudah memiliki AMDAL ada 25 %. Pada tahun 2005 yang memiliki AMDAL ada 75 %. Pada tahun 2006 yang memiliki dokumen AMDAL sudah 100 % dari total perusahaan yang wajib AMDAL. Dari 96 perusahaan yang wajib UKL UPL, yang sudah membuat dokumen UKL UPL tahun 2003 ada 6 %, tahun 2004 ada 15 %, tahun 2005 ada 26 %, tahun 2006 ada 38 % dan tahun 2007 ada 54 %. Jadi dari data tersebut perusahaan yang belum memiliki dokumen UKL UPL ada 46 %.

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pasal 32 menyebutkan bahwa pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan Gubernur. Sedangkan Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan :

- a. Pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- c. Penyampaian laporan dan evaluasi hasilnya kepada Menteri secara berkala, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, dengan tembusan kepada Instansi yang berwenang menerbitkan izin dan Gubernur.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan AMDAL di Jawa Tengah yang dilakukan Hadi, dkk pada tahun 1997, ditemukan bahwa:

1. Sebagian besar perusahaan masih beranggapan bahwa dokumen AMDAL sekedar persyaratan untuk memenuhi perijinan dan ketentuan yang berlaku
2. Pemberlakuan kewajiban untuk melaksanakan penyusunan AMDAL bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting serta penyusunan UKL UPL
3. Terdapat ketidaksesuaian antara prediksi dampak yang diperkirakan dalam dokumen dengan realita dampak yang terjadi di masyarakat.
4. Upaya pengelolaan yang disarankan oleh penyusun dokumen tidak semuanya dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Menurut Soeryo Adiwibowo (2005), hal-hal yang menyebabkan AMDAL kurang berdayaguna adalah sebagai berikut :

1. Aparatur pemerintah
 - a. AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan daripada instrumen pencegahan terhadap dampak lingkungan
 - b. Tidak mengetahui perbedaan manfaat apabila AMDAL disusun sebagai bagian dari studi kelayakan dan disusun sesudah studi kelayakan
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkemampuan menilai AMDAL dengan baik
 - d. AMDAL masih dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh oknum aparat pemerintah
2. Penyusun AMDAL
 - a. Hanya sedikit sekali penilai maupun penyusun yang memahami bahwa AMDAL harus disusun sebagai bagian dari studi kelayakan
 - b. Metode identifikasi, pelingkupan dampak, prakiraan dampak dan metode evaluasi dampak masih belum dipahami dalam penyusunan AMDAL
 - c. Pengelolaan lingkungan yang ada dalam dokumen saat ini belum berorientasi penurunan biaya produksi sehingga cenderung diabaikan dalam pelaksanaannya, malahan pengelolaan lingkungan terkesan akan menambah biaya operasional

Masalah lain dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah lemahnya penegakan hukum yang ada di negara kita. Belum adanya sanksi yang tegas yang dikenakan bagi pengusaha yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di Kabupaten Tangerang (Shoba, 2006) ditemukan bahwa:

1. Pelaku usaha industri masih menganggap bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya, dan industri belum merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan
2. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh industri masih sebatas meredam protes atau mencegah terjadinya gejolak oleh masyarakat disekitar lokasi industri, belum mencakup pengelolaan lingkungan secara utuh
3. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat di sekitar industri terhadap pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan industri relatif masih rendah
4. Pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait di bidang lingkungan di Kabupaten Tangerang masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak industri dan akan terjun ke lapangan apabila terjadi kasus
5. Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Tangerang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. TIPE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei terhadap beberapa sampel terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL pada beberapa industri di Kabupaten Kudus. Menurut Suharsimi Arikunto (2002), penelitian evaluasi adalah merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan, mempertimbangkan nilai-nilai positif keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penelitian. Sedangkan menurut Riduwan (2004) penelitian evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standard dan pogram yang telah ditetapkan.

3.2. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus menekankan pada pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat sekitar industri dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan serta mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan.

Ruang lingkup penelitian efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kudus meliputi:

1. Pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan
2. Keterlibatan masyarakat sekitar industri dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
3. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan

Penelitian ini dibatasi pada jenis usaha/kegiatan yang paling besar yang ada di Kabupaten Kudus. Lokasi kegiatan yang dipilih merupakan kawasan campuan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah., yaitu Kecamatan Jekulo, Kecamatan Jati dan Kecamatan Bae. Kurun waktu penelitian adalah selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2003 sampai tahun 2007.

3.3. SUMBER, JENIS DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.3.1. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer diperoleh dari responden yang terdiri dari pemrakarsa/industri, masyarakat terkena dampak dan instansi teknis yang terkait dengan pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL
- b. Sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen AMDAL atau UKL UPL yang terpilih sebagai sampel penelitian, laporan pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL serta data-data relevan lainnya

Penelitian efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus meliputi 3 unsur yaitu pemrakarsa, masyarakat dan instansi terkait. Penelitian ini akan membahas tiga sisi tersebut yaitu:

1. Pemrakarasa usaha dan atau kegiatan yang mempunyai kewajiban menyusun dokumen AMDAL atau UKL UPL.

Responden dari unsur pemrakarsa baik yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan maupun yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu pihak pengambil kebijakan atau manajemen

Faktor-faktor yang dikaji dari sisi pengusaha /industri antara lain adalah :

- a. Tingkat ketaatan pengusaha / industri untuk menyusun dokumen AMDAL atau UKL UPL sebelum memulai usahanya
 - b. Tingkat ketaatan pengusaha/industri untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL atau UKL UPL yang telah disusunnya.
 - c. Kendala yang dihadapi pengusaha/industri untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL atau UKL UPL yang telah disusunnya.
2. Instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi sebagai institusi yang membidangi masalah lingkungan hidup dan instansi lain yang terkait dalam pengawasan pengelolaan maupun pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL atau UKL UPL (sebagai instansi pembina)

Dari sisi pemerintah faktor-faktor yang dikaji antara lain :

- a. Kesiapan Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (Lingdup Tamben) Kabupaten Kudus untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pengusaha/industri dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai studi AMDAL atau UKL UPL baik dari segi peraturan perundangan, personil maupun pendanaan
- b. Koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pengusaha/industri dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai studi AMDAL atau UKL UPL

3. Masyarakat sekitar industri yang diperkirakan terkena dampak
Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya dekat dengan lokasi pabrik
 - a. Dampak terhadap lingkungan berupa kualitas udara, air maupun tanah
 - b. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap ketatan pengusaha dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai studi AMDAL atau UKL UPL
 - c. Manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar industri dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh industri/pengusaha

Dinas/instansi terkait yang menjadi sumber penelitian adalah ;

1. Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi
2. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
3. Dinas Tenaga Kerja
4. Dinas Kesehatan Kabupaten
5. Bappeda
6. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
6. Kecamatan Jekulo
7. Kecamatan Bae
8. Kecamatan Jati
8. Desa Terban
9. Desa Bakalan Krapyak
10. Desa Jati Wetan

3.3.2. JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari responden. Data sekunder diperoleh dari dokumen AMDAL atau UKL UPL sesuai sampel yang terpilih dan laporan rutin pelaksanaan pengelolaan lingkungan serta data-data yang relevan.

3.3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, kuesioner, wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik pencatatan atau perekaman terhadap laporan AMDAL atau UKL UPL serta laporan – laporan lain yang berkaitan dengan penelitian

b. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menyampaikan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, daftar pertanyaan ini ditujukan kepada industri, masyarakat dan instansi terkait

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terhadap kelompok responden yang telah ditentukan. Identifikasi materi kuesioner berdasarkan 3 kelompok responden, yaitu industri/pemrakarsa, masyarakat dan instansi terkait meliputi identitas responden, persepsi tentang AMDAL atau UKL UPL, pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL, serta pengawasan pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL.

d. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Observasi ini bisa di lakukan bersamaan dengan waktu wawancara dilapangan atau dilakukan sebelumnya. Obsevasi merupakan cara yang efektif dalam pengumpulan data dikarenakan kita tahu kenyataan apa yang ada di lapangan.

3.4. SAMPEL PENELITIAN

Jumlah usaha/kegiatan skala besar menengah di Kabupaten Kudus sebanyak 100 unit, yang terdiri dari industri rokok sekitar 39 %, industri kertas dan percetakan sebesar 18 %, industri makanan dan minuman 7 %, industri konveksi sebesar 10 %, industri elektronik sebesar 6 %, industri meubel sebesar 14 %, dan usaha/kegiatan lain-lain sebesar 6 % (Dinas Indagkop, 2007). Dari jumlah usaha/kegiatan tersebut telah mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan berupa 4 buah dokumen AMDAL dan 52 buah dokumen UKL UPL. Dalam penelitian ini diambil sampel 4 perusahaan mempunyai dokumen UKL UPL dan 1 perusahaan mempunyai dokumen AMDAL.

Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling. Menurut Bambang Prasetyo (2005), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Dalam hal ini dipilih industri yang dianggap mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan termasuk industri yang mempunyai potensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan karena menghasilkan limbah cair, padat dan gas serta debu.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas ditetapkan usaha/kegiatan sebagai sampel penelitian sebanyak 5 lokasi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

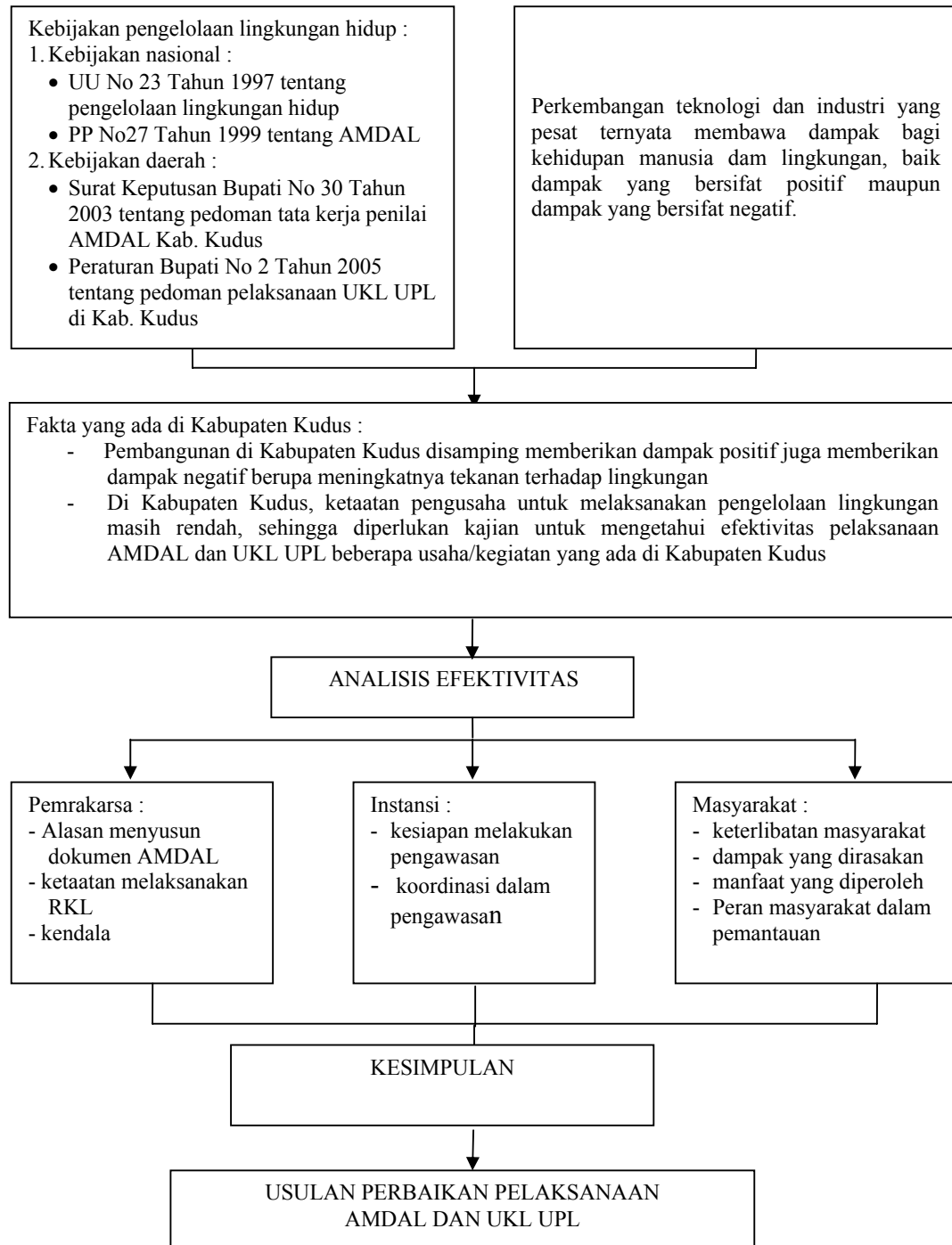
Tabel 2.2 Daftar Nama Industri Sebagai Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis usaha	Dok. Lingkungan
1.	PT Djarum Primary	Bakalan Krapyak, Kaliwung	Rokok	UKL UPL
2.	PT Pura Nusa Persada	Terban, Jekulo	Kertas	UKL UPL
3.	PT Enggal Subur Kertas	Terban, Jekulo	Kertas	UKL UPL
4.	PT Pura Power Plant	Jati Wetan, Jati	PLTU	UKL UPL
5.	Terminal cargo, terminal bus, jalan tembus dan ruko	Jati Wetan, Jati	Jasa	ANDAL, RKL RPL

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kudus, 2008

3.5. KERANGKA BERPIKIR

Gambar 4. Kerangka Berpikir



3.6. TEKNIK DAN ANALISIS DATA

Data primer yang terkumpul melalui kuesioner dan wawancara dilakukan pengolahan dengan menggunakan analisa statistika distribusi frekuensi. Sedangkan data yang berupa deskripsi narasi, kualitatif akan dikelompokkan tersendiri sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus, kriteria efektivitas pengelolaan lingkungan yang dipakai yaitu:

0 – 40 %	: belum efektif
41 – 75%	: cukup efektif
75 – 100 %	: sudah efektif

3.7. TAHAP PENELITIAN

1. Persiapan penelitian
meliputi persiapan materi berupa kuesioner penelitian, lokasi penelitian dan responden penelitian
2. Pelaksanaan penelitian
Kegiatan yang dilakukan tersebut meliputi:
 - a. Melakukan pengumpulan data sekunder
 - b. Melakukan observasi secara menyeluruh
 - c. Melakukan wawancara dan menyebar kuesioner terhadap responden baik dari pengusaha, Dinas/Instansi maupun masyarakat sekitar
 - d. Melakukan review dokumen lingkungan atas sampel terpilih
 - e. Mengelompokkan data yang telah terkumpul
 - f. Pengolahan data dengan analisa deskriptif
 - g. Interpretasi dan evaluasi hasil analisa
 - h. Membuat kesimpulan, saran

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV yaitu hasil dan pembahasan berisi tentang uraian deskripsi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari 5 (lima) sampel terpilih. Adapun aspek yang dibahas adalah deskripsi kegiatan, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh Dinas/Instansi terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Kelima sampel yang terpilih terdiri dari satu sampel usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen Andal, RKL RPL dan empat sampel industri mempunyai dokumen UKL UPL. Kelima sampel tersebut adalah:

1. PT Djarum unit Primary Process terletak di Desa Bakalan Krapyak Kecamatan Kaliwungu, mempunyai dokumen UKL UPL
2. PT Enggal Subur Kertas terletak di Desa Terban kecamatan Jekulo, mempunyai dokumen UKL UPL
3. PT Pura Nusa Persada terletak di Desa Terban Kecamatan Jekulo, mempunyai dokumen UKL UPL
4. PT Pura Power Plant terletak di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati mempunyai dokumen UKL UPL
5. Pembangunan Terminal Cargo, Terminal Bus, Jalan Tembus, Pusat Perdagangan dan Rumah Toko (Ruko) di kawasan BWK IV Kabupaten Kudus mempunyai dokumen ANDAL, RKL RPL

4.1. DESKRIPSI KEGIATAN

4.1.1. PT DJARUM UNIT PRIMARY PROCESS

PT Djarum unit Primary Process terletak di desa Bakalan Krapyak, kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Adapun batas lokasi PT Djarum unit Primary Process adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Gribig dan Desa Klumpit, Kecamatan Gebog
Sebelah barat : Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu
Sebelah selatan : Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu
Sebelah timur : Desa Krandon, Kecamatan Gebog



Gambar 4.1. Akses masuk PT Djarum unit Primary Process Bakalan Krapyak
Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan industri adalah 86.085 m² dengan perbandingan lahan tertutup dan lahan terbuka adalah 69,40 % : 30,60 % yaitu lahan tertutup seluas 59,740 m² dan lahan terbuka seluas 26,345 m². Jumlah tenaga kerja sebanyak 2.294 orang terdiri dari perempuan 1.392 orang dan laki-laki sebanyak 630 orang.

Jenis produksi yang dihasilkan adalah sigaret kretek. Kapasitas produksi sigaret kretek tangan 15.593.000.000 batang/tahun dan sigaret kretek mesin 22.745.000.000 batang/tahun. Adapun bahan baku yang digunakan adalah tembakau (rajang dan strip), cengkeh dan saos. Agar material bahan tembakau dan cengkeh sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan saat dirajang dan diproses selanjutnya, maka kedua bahan tersebut dilembabkan dengan cara disemprot uap air sehingga kadar ainya naik, dimana pada akhir proses dikeringkan lagi dengan menggunakan mesin dryer. Proses selanjutnya adalah pencampuran seluruh material tembakau dan cengkeh sesuai komposisi menjadi master tobacco and clove dan siap untuk diblending dengan saos menjadi tembakau finished blend sebagai bahan baku rokok. Saus adalah bahan pemberi rasa dan aroma yang ditambahkan agar campuran tembakau mempunyai karakter sesuai desain aroma dan rasa yang telah ditentukan.

Dalam kegiatan proses produksi tersebut akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Adapun upaya pengelolaan yang dilakukan adalah

1. Komponen geologi fisika kimia

a. Pengelolaan dampak pada kualitas udara , debu dan bau

Limbah gas berasal dari gas buang dari boiler, genset, kendaraan angkutan, debu dari kegiatan proses. Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara pemilihan peralatan yang hemat energi, kinerja pembakaran yang optimal serta pemeliharaan alat secara berkala. Limbah yang berupa debu berasal dari aktivitas penyiapan bahan baku, proses pemotongan/rajang, pencampuran/blending. Pengelolaan yang dilakukan dengan meminimasi timbulan debu dengan sistem sedot / isap debu (dust collector) sebagai pengganti sistem penyemprotan dengan udara tekan. Untuk limbah gas dari hasil pembakaran, pengelolaan yang dilakukan meliputi pemilihan peralatan berdasarkan jenis bahan bakar, penghematan bahan bakar, perawatan berkala, pemasangan cerobong yang tinggi, penghijauan disekitar sumber emisi.

Untuk bau berasal dari proses penambahan aroma, pengolahan tembakau dan cengkeh serta pengoperasian Ipal. Upaya pengelolaan yang dilakukan dengan cara penanaman pohon penghijauan, penerapan SOP dan perawatan peralatan.

b. Pengelolaan dampak pada kebisingan

Kebisingan berasal dari suara mesin genset. Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah :

- pemilihan peralatan yang cenderung lebih tenang
- perawatan berkala terhadap mesin-mesin
- mengisolasi sumber suara bising sehingga tidak keluar
- karyawan memakai alat pelindung diri
- melakukan penghijauan

c. Pengelolaan dampak pada kualitas air

Sumber berasal dari kegiatan operasional unit Primary Proses, yaitu proses produksi dan kegiatan domestik. Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah internal proses dengan menerapkan produksi bersih dan eksternal proses dengan optimalisasi pengoperasian Ipal. Pemantauan dilakukan dengan pengambilan sampel di outlet limbah cair setiap bulan, badan air penerima, air sumur penduduk sekitar untuk dianalisa dilaboratorium setiap 3 bulan sekali.

d. Pengelolaan dampak terhadap limbah padat

Sumber limbah padat berasal dari pengolahan tembakau, cengkeh, Ipal dan kegiatan domestik. Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah recycle dan reuse oleh pihak ketiga, pembuangan sampah domestik ke TPA.

Pemantauan yang dilakukan dengan observasi dan pengamatan secara langsung dilapangan, terus dianalisis, setiap 6 bulan sekali.

e. Pengelolaan dampak pada gangguan lalu lintas

Gangguan lalu lintas berasal dari lalu lintas kendaraan angkut orang dan barang. Adapun upaya pengelolaan yang dilakukan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pengaturan pergerakan kendaraan di jalan

sekitar lokasi. Pemantauan dengan mengamati gangguan kepadatan lalu lintas setiap saat dan dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali

2. Komponen biologi

Pada komponen biologi tidak terpengaruh secara langsung dan merupakan dampak lanjut dari penurunan kualitas air yang bersumber dari pembuangan limbah cair proses produksi. Limbah cair ini akan menurunkan kualitas air dibadan air penerima yang merupakan tempat kehidupan planton, bentos, nekton sehingga kehidupannya akan terganggu. Upaya pengelolaan yang dilakukan secara internal proses dengan menerapkan produksi bersih dan eksternal proses dengan optimalisasi pengoperasian Ipal.

Untuk biota air planton dan bentos dengan analisis laboratorium, sedangkan nekton dengan observasi langsung. Pemantauan setiap 6 bulan sekali.

3. Komponen sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

a. Pengelolaan dampak pada kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan

Kesempatan kerja berasal dari kegiatan operasional unit primary process. Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah memprioritaskan tenaga kerja lokal/ masyarakat sekitar lokasi sesuai kebutuhan, pembinaan dan penataan PKL/ warung disekitar lokasi bekerjasama dengan desa, membuka kesempatan membuka titipan sepeda. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan cara pengamatan langsung dilapangan.

b. Pengelolaan dampak pada kenyamanan hidup

Kenyamanan lingkungan sekitar dipengaruhi oleh kegiatan operasional unit primary process, adapun upaya pengelolaan yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan sesuai SOP, optimalisasi operasional Ipal untuk mengantisipasi penurunan kualitas air, minimasi dampak penyebaran bau akibat kegiatan operasional.

Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan pengamatan langsung.

c. Pengelolaan dampak persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh kegiatan operasional pabrik. Upaya pengelolaan yang dilakukan sehubungan dengan persepsi masyarakat adalah memberi penjelasan pada masyarakat tentang kegiatan unit primary

process yang berkaitan dengan manfaat yang didapat masyarakat, memberi penjelasan pada masyarakat tentang mekanisme pengaduan apabila terjadi gangguan pada masyarakat, melakukan SOP, optimalisasi kinerja Ipal, peningkatan bina lingkungan. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan cara pengamatan langsung dilapangan

d. Pengelolaan dampak kesehatan masyarakat

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh operasional kegiatan unit primary process. Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah pengelolaan lingkungan diinternal perusahaan, pengelolaan dampak terhadap lingkungan sekitar, peningkatan bina lingkungan, melakukan pemeriksaan dan pengobatan dengan segera jika terjadi kecelakaan.

Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan cara pengamatan langsung dilapangan.

4.1.2. PT ENGGAL SUBUR KERTAS

PT. Enggal Subur Kertas adalah merupakan Industri Kertas yang terletak di Jl. Kudus Pati Km 12,5 desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Pabrik seluas 40.523 m² dengan perbandingan lahan terbuka dan lahan tertutup 35,02 : 64,98, yaitu lahan tertutup seluas 14.190 m² dan lahan terbuka seluas 26.333 m². Adapun batas ekologis PT Enggal Subur Kertas adalah:

Sebelah Utara	: Tanah Tegalan
Sebelah Timur	: Pemukiman Penduduk
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Kudus – Pati
Sebelah Barat	: Sungai dan Pemukiman Penduduk



Gambar 4.2. Pintu Masuk PT Enggal Subur Kertas

Lokasi kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen UKL UPL yang dipunyai dibuat pada tahun 2002 untuk kegiatan yang sudah beroperasi dan tahun 2008 dokumen UKL UPL tersebut direvisi disebabkan karena adanya penambahan kapasitas produksi, penambahan bahan baku, air, sumber energi serta bahan bakar yang menyebabkan perluasan bangunan (unit PM II), serta adanya penambahan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang ada saat ini adalah 360 orang terdiri dari laki-laki 348 orang dan perempuan 12 orang.

Bahan baku yang digunakan dalam industri kertas PT Enggal Subur Kertas adalah bahan baku box, cones dan marga campur, sedangkan bahan pembantu adalah alum dan warna. PT. Enggal Subur Kertas memproduksi jenis kertas 70 gsm sebanyak 40 ton/hari dan jenis kertas 125 gsm sebanyak 60 ton/hari. Adapun secara garis besar proses produksi sebagaimana dalam uraian berikut :

1. Bahan baku yang terdiri dari box, cones dan marga campur dihancurkan dalam hydra pulper untuk dijadikan bubur. Kemudian kotoran yang berupa kerikil dan klip dipisahkan di HDC.
2. Dari HDC kemudian dimasukkan ke Turbo Separator yang berfungsi untuk memisahkan ukuran fiber yang besar dengan ukuran fiber kertas tertentu.

Reject dari Turbo Separator dimasukkan ke Vibrating Screen dan hasil dari Vibrating Screen dikembalikan lagi ke Turbo Separator.

3. Hasil dari Turbo Separator dimasukkan ke Refiner untuk dihaluskan lagi hingga ukuran tertentu.
4. Setelah keluar dari Refiner, fiber dimasukkan ke Chest
5. Fiber kertas dari Chest kemudian dialirkan ke Centry Cleaner untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang lebih halus, yakni pasir dan tanah agar diperoleh fiber yang benar-benar bersih.
6. Fiber dari Centry Cleaner kemudian dimasukkan ke Foundriner yang fungsinya membuat lembaran sheet kertas.
7. Sheet yang telah dipadatkan, diproses lagi dengan alat Press Roll dan dikeringkan menggunakan Dryer.
8. Lembaran yang keluar dari Dryer selanjutnya digulung dengan alat Rewinder.
9. Hasil dari Rewinder berupa gulungan kertas dengan ukuran tertentu.

Dalam kegiatannya tersebut PT Enggal Subur Kertas akan memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat. Adapun upaya pengelolaan yang dilakukan adalah :

1. Komponen geologi fisika kimia

- a. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan debu

Kualitas udara dan debu berasal dari kegiatan produksi, pengangkutan dan kegiatan operasional boiler.

Adapun upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh pabrik adalah:

- pengoperasian dust collector
- perawatan secara rutin terhadap mesin produksi dan operasional boiler
- penanaman penghijauan disekeliling perusahaan untuk mengurangi timbulnya dampak bau dari Ipal dan sebagai penyerap terhadap pencemaran.

Pemantauan yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan setiap 6 bulan sekali melakukan pengambilan sampel dan analisa dilaboratorium.

b. Pengelolaan dampak pada kebisingan

Kebisingan berasal dari kegiatan proses produksi.

Upaya pengelolaan yang telah dilakukan adalah dengan

- pembuatan pagar tembok keliling
- penanaman dan perawatan pohon penghijauan
- penempatan mesin pada ruang kedap suara
- perawatan mesin secara rutin
- pengaturan jam kerja serta pemakaian ear plug bagi para pekerja.

Pemantauan dengan cara memantau terhadap upaya pengelolaan sebagaimana tersebut diatas dan pengukuran kebisingan selama kegiatan berlangsung.

c. Pengelolaan dampak pada kualitas air

Sumber dampak berasal dari unit stok preparation dan air shower (continue cleaning) dimesin kertas serta kegiatan MCK. Air limbah dari proses produksi yang masuk ke IPAL adalah 368 m³/hari dan yang direcycle untuk kebutuhan produksi lagi sebesar 100 m³/hari, sehingga air limbah dari proses IPAL yang keluar ke Sungai Madat sebesar 268. m³/hari.

Adapun upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan adalah :

- membuat septiktank
- pemanfaatan air limbah dari stok preparation untuk proses pembuburan
- pemanfaatan air kondensat untuk umpan boiler dan recycle air dari Ipal
- pengolahan air limbah dan memaksimalkan kinerja Ipal
- Membuat saluran kedap air, pemeliharaan saluran limbah yang menuju Ipal.

Pemantauan lingkungan dilakukan setiap 3 bulan sekali selama kegiatan berlangsung.

d. Pengelolaan dampak pada limbah padat

Limbah padat berasal dari abu pembakaran batu bara, plastik, pasir dari stok preparation serta sludge Ipal. Jumlah limbah padat sebesar 5,72 ton/hari.

Adapun upaya pengelolaan yang dilakukan adalah :

- pengoperasian dust collektor
- pengumpulan sisa abu fly ash dan bottom ash di TPS dan pemanfaatan untuk bahan campuran paving
- pengolahan dibelt pres serta pengiriman dan pengolahan di TPA
- truk pengangkut menggunakan terpal

Pemantauan dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian dilaboratorium selama kegiatan operasional berlangsung

e. Pengelolaan dampak pada hidrologi

Keadaan hidrologi air tanah dipengaruhi oleh kegiatan penggunaan air tanah. Untuk kebutuhan air PT Enggal Subur Kertas menggunakan 4 (empat) buah sumur ABT dengan pemakaian rata-rata 200 m³/hari.

Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah pemanfaatan air sisa proses, efisiensi penggunaan air serta penanaman pohon penghijauan disekitar lokasi. Pemantauan dilakukan dengan pemantauan kedalaman muka air tanah selama kegiatan berlangsung.

f. Pengelolaan dampak pada pola lalu lintas

Sumber dampak yang ada berasal dari kegiatan operasional dan lalu lintas kendaraan operasional. Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah meminimalakan dampak yang timbul, mengatur jam pengangkutan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta penempatan petugas pengatur lalu lintas. Pemantauan dilakukan dengan cara memantau waktu pengangkutan, pemasangan lampu kuning, rambu lalu lintas serta penempatan petugas pengatur lalu lintas.

2. Komponen Biologi

Pada komponen biologi tidak terpengaruh secara langsung dan merupakan dampak lanjut dari penurunan kualitas air yang bersumber dari pembuangan limbah cair proses produksi. Untuk memperkecil adanya pengaruh tersebut dilakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan cara penanaman pohon pelindung disekitar lokasi dan meningkatkan kinerja Ipal. Pemantauan

dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan perhitungan jumlah tanaman persatuan luas dan dilaksanakan setahun sekali.

3. Komponen Sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

a. Pengelolaan dampak pada pendapatan masyarakat

Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional PT Enggal Subur Kertas
Upaya pengelolaan yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang timbul adalah mengutamakan penduduk setempat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan pengupahan sesuai dengan upah minimum kabupaten serta jaminan K3. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan pengupahan sesuai UMK dan pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Pengelolaan dampak pada kenyamanan hidup

Sumber dampak adalah dari kegiatan operasional PT Enggal Subur Kertas
Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah

- desain ruang generator dan turbin agar memenuhi standar baku mutu
- tinggi cerobong asap minimal 45 m
- pemasangan filter penangkap debu
- bantuan pembangunan jalan kampung dan lampu penerangan

Upaya pemantauan dilakukan dengan meminimalkan dampak yang timbul akibat dari kegiatan transportasi.

c. Pengelolaan dampak pada persepsi masyarakat

Sumber dampak berasal dari kegiatan rekrutmen tenaga kerja

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah dalam pemenuhan tenaga kerja mengutamakan penduduk lokal sesuai dengan kualifikasi, penanganan dampak lainnya secara konsekuen serta bina lingkungan sekitar.

Upaya pemantauan dengan memantau pelaksanaan pemenuhan tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

4.1.3. PT. PURA NUSA PERSADA

PT Pura Nusa Persada merupakan industri kertas yang merupakan anak perusahaan dari PT Pura group yang berada di Jl. Raya Kudus-Pati km 12 Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Untuk studi pengelolaan lingkungan, PT Pura Nusa Persada telah menyusun dokumen UKL UPL sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama tahun 1998 yang disahkan oleh Departemen Perindustrian, direvisi tahun 2004 yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan Energi Kabupaten Kudus dan terakhir tahun 2008, dokumen UKL UPL mengalami revisi lagi yaitu dengan dimasukkannya pengelolaan limbah padat B3 dalam pembahasan dokumen UKL UPL.

PT Pura Nusa Persada mempunyai lahan seluas 26.628 m² dengan perbandingan building coverage dan open area adalah 79,3% : 20,7% yaitu lahan tertutup seluas 21.120 m² dan lahan terbuka seluas 5.508 m². Jumlah tenaga kerja 556 orang terdiri dari pria 455 orang dan perempuan 101 orang.

Lokasi pabrik sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Kudus no 8 tahun 2003 yaitu peruntukan lokasi kawasan campuran.

Adapun batas ekologis PT Pura Nusa Persada adalah :

- Sebelah utara : Jl. Raya Kudus Pati
- Sebelah barat : berbatasan dengan Pura Wokshop dan persawahan
- Sebelah selatan : berbatasan dengan persawahan
- Sebelah timur : berbatasan dengan Pura box dan persawahan



Gambar 4.3. Halaman Depan PT Pura Nusa Persada

Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi adalah adalah pulp (NUPK, serutan bambo) dan kertas bekas/waste paper (ivory, marga, NDLK, sack). Sedangkan bahan pembantu dalam proses produksi adalah alum sulfat, rosin/dammar, tapioca, NaOH, anti foam, biocide, warna, PAC, chemin dan HCL. Jenis produk yang dihasilkan berupa sack kraft dengan kapasitas 16.923,32 ton/tahun, medium liner dank kraft dengan kapasitas 18.814,44 ton/tahun serta paper board dengan kapasitas 15.451,28 ton/tahun.

Proses Pembuatan Kertas di PT. Pura Nusapersada Kudus adalah sebagai berikut :

1. Mula-mula bahan berupa pulp / waste paper dihancurkan di dalam Hydra Pulper (HP) dengan menambahkan air hingga konsistensinya kurang lebih 5 % (kandungan padatan 5 %).
2. Kemudian bubur yang merupakan hasil dari hydra pulper ditampung di dalam bak (Chest) yang kemudian dihaluskan lagi melalui refiner sampai tingkat kehalusan tertentu. Setelah itu bahan-bahan pembantu (additive) seperti starch (tapioca) rosin size, alum dan lain-lainnya ditambahkan secara bertahap.

3. Kemudian bubur yang sudah siap (bubur yang sudah ditambah air sehingga consistensinya $\pm 0,5 \%$), diumpankan ke Head Box / Silinder Mould.
Dari head box / silinder mould air kemudian diambil / lewat wire / felt melalui vacuum dan press section, sehingga terjadi aliran air / drainage air dari $\pm 99,5 \%$ menjadi $\pm 50 \%$.
4. Kemudian lembaran kertas yang masih basah ini (kadar air $\pm 50 \%$) dikeringkan melalui silinder dryer group I dan group II / III, sehingga dari kadar air $\pm 50 \%$ menjadi $\pm 7 \%$. Hasil kertas dengan kandungan air $\pm 7 \%$ tersebut dan dengan spesifikasi tertentu kemudian digulung dipope roll, yang kemudian dipotong dengan ukuran tertentu sesuai dengan pesanan yang ada.

Dalam kegiatannya tersebut PT Pura Nusa Persada akan memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Adapun upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Komponen geologi fisika kimia

- a. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan debu

Sumber dampak terhadap udara dan debu berasal dari kegiatan transportasi dan abu / asap dari hasil pembakaran batu bara, solar / residu, sekam saat kegiatan operasional perusahaan berlangsung.

Upaya pengelolaan yang dilakukan terhadap penurunan kualitas udara dan debu selama operasional, meliputi:

- pengaturan kecepatan peralatan berat dan transportasi
- pengaturan waktu kegiatan
- pemberi rambu-rambu lalu lintas jalan.
- Pengelolaan terhadap gas buang SO_2 dari pembakaran batu bara tidak dilakukan karena kadar belerang atau sulfur kandungannya $< 1 \%$. Namun demikian sebagai upaya cadangan dicampurkan Limestone di dalam bahan bakar batu bara untuk menangkap SO_2 yang terbentuk gypsum yang akan keluar
- Untuk mencegah terbentuknya NO_x maka pada saat proses pembakaran di Boiler suhu dijaga supaya tidak melebihi 1200°C

- Untuk meminimalkan partikel padat dan debu tersebut perlu pengelolaan dengan pengoperasian dust collector selama operasional Boiler, diikuti dengan perawatan berkala untuk menjaga kinerjanya, serta pemasangan ventilasi pada tempat operasional Boiler dan pemakaian masker pada operator Boiler
- Penanaman penghijauan di lokasi perusahaan dan program langit biru untuk memantau kualitas emisi yang dihasilkan dari cerobong boiler. Pemantauan terhadap kualitas udara dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan program langit biru untuk emisi pembakaran batu bara, sedangkan untuk emisi incinerator (pembakaran sludge dan bottom ash) setiap 3 bulan sekali.

b. Pengelolaan dampak pada kebisingan

Sumber dampak kebisingan adalah kegiatan transportasi, boiler dan mesin. Upaya pengelolaan yang dilakukan terhadap peningkatan kebisingan selama tahap produksi meliputi:

- Pengaturan kecepatan peralatan transportasi
- Pengaturan waktu kegiatan
- Pemberian rambu-rambu
- Penanaman tanaman di sekitar lokasi kegiatan
- Pembuatan bak peredam pada vacuum pump
- Penggunaan earplug pada karyawan untuk mengurangi kebisingan
- Pengecekan rutin komponen peralatan
- Pembuatan pagar pembatas (tembok) yang tinggi di sekeliling perusahaan yang berfungsi sebagai peredam.

Pemantauan kebisingan dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan program langit biru.

c. Pengelolaan dampak pada kualitas Air

Sumber dampak yang mempengaruhi kualitas air adalah proses pemasakan di Stock Preparation, Boiler, pemasakan chemical dan pencucian mesin.

Dari kegiatan proses produksi, air limbah yang dihasilkan sebesar 3.000 m³/hari, yang dikembalikan ke krofta sebesar 1.700 m³/hari sedangkan sisanya sebesar 1.300 m³/hari diolah di Ipal.

Upaya pengelolaan Lingkungan yang dilakukan adalah :

- Air buangan / waste water dari proses pemasakan di Stock Preparation dan cleaning di mesin ditampung dalam bak dan dimanfaatkan untuk proses kembali sisanya baru masuk ke Krofta / Dissolved Air Flotation (DAF) yang berfungsi memisahkan air dengan serat kertas.
- Hasil serat kertas dimanfaatkan kembali diproses produksi begitu juga dengan sebagian air hasil proses, sisanya baru diolah di Unit Pengolahan Limbah (UPL) ditreatment supaya sesuai dengan baku mutu limbah cair.
- Hasil tangkapan partikulat dust collector dialirkan ke bak sedimentasi untuk mempercepat pengendapan, air terpisah keluar dari bak dan digunakan untuk dust collector kembali.

Adapun upaya pemantauan yang dilakukan untuk kualitas air adalah 1 bulan sekali dilakukan swapantau dan setiap 3 bulan sekali dilakukan inspeksi mendadak ke perusahaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan mengambil sampel dan dilakukan pengujian laboratorium bekerjasama dengan PT Sucofindo. Untuk parameter suhu dan PH dapat diukur secara langsung.

d. Pengelolaan dampak pada limbah Padat

Limbah padat non B3 berasal dari proses pembuburan kertas berupa plastik, lem, pasir jumlahnya rata-rata 5 ton/hari, lem dibuang ke TPA Tanjung rejo dan pasir digunakan untuk landfill. Limbah padat dari pemisahan serat kertas di Krofta dimanfaatkan kembali untuk proses produksi. Untuk limbah padat B3 dan sludge. Adapun jumlah limbah padat B3 berasal dari debu hasil pembakaran ini adalah dengan memasang dust collector untuk menangkap abu terbang (Fly ash). Fly ash dikirim ke Pura Barutama Unit Power Plant sebagai campuran pembuatan batu bata merah & paving block sedangkan bottom ash dari proses boiler chain grate (cadangan) difeeding kembali ke Boiler FBC. Untuk sludge hasil pengelolaan limbah dari UPL dibakar di boiler untuk menghasilkan steam.

Pemantauan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali dengan cara pengukuran sampel dilokasi dan dianalisis di laboratorium.

e. Pengelolaan dampak pada hidrologi

Sumber dampak terhadap hidrologi adalah penggunaan air bawah tanah untuk umpan Boiler, pemasakan chemical dan cleaning mesin. Penggunaan air pada PT Pura Nusa Persada menggunakan 9 (sembilan) buah sumur air bawah tanah dengan pemakaian rata-rata 120 m³/hari.

Upaya pengelolaan yang dilakukan terhadap penurunan muka air tanah yang ada dilakukan meliputi:

- Penghijauan di lokasi perusahaan minimal 300 pohon, pembuatan green area ± 1010 m² (Mei s/d Juli 2008), agar proses peresapan air ke dalam tanah dapat berlangsung dengan baik.
- Pembuatan sumur resapan di lokasi perusahaan sebanyak 3 sumur untuk membantu peresapan air diwaktu hujan
- Pemanfaatan air sisa proses semaksimal mungkin sebelum keluar, untuk mengurangi pemakaian air bawah tanah antara lain untuk pemasakan di produksi, pemasakan nutrisi di UPL, untuk suplay pompa hydrant / pemadam
- Efisiensi penggunaan air.

Pemantauan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan cara pengukuran kedalaman muka air tanah yang berada disekitar lokasi dan pemantauan terhadap keberadaan pohon penghijauan dan sumur resapan.

2. Komponen biologi

Pada komponen biologi tidak terpengaruh secara langsung dan merupakan dampak lanjut dari penurunan kualitas air yang bersumber dari pembuangan limbah cair proses produksi. Untuk memperkecil adanya pengaruh tersebut dilakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan cara penanaman pohon pelindung disekitar lokasi dan meningkatkan kinerja Ipal. Pemantauan dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan perhitungan jumlah tanaman persatuan luas dan dilaksanakan setahun sekali.

3. Komponen Sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

a. Pengelolaan dampak pada pendapatan masyarakat

Sumber dampak terhadap pendapatan adalah operasional perusahaan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan bahwa dalam pelaksanaan operasional pabrik membutuhkan tenaga kerja, yang mana yang tidak membutuhkan ketrampilan khusus diutamakan warga sekitar lokasi dan memberi kesempatan masyarakat mengembangkan usaha disekitar lokasi.

Pemantauan dilaksanakan dengan cara pengamatan dan wawancara selama kegiatan operasional perusahaan berlangsung.

b. Pengelolaan dampak pada kenyamanan

Kegiatan operasional perusahaan merupakan sumber dampak terhadap kenyamanan warga disekitar lokasi PT Pura Nusapersada.

Upaya Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan adalah :

Suara bising yang muncul dari operasional merupakan dampak negatif upaya pengelolaan yang harus dilakukan adalah dengan menanam tanaman disekitar lokasi, membuat cerobong yang tinggi, membuat peredam untuk vacuum pump serta memberikan earplug untuk karyawan, serta pengecekan rutin kesehatan karyawan. Pemantauan dilaksanakan setahun sekali dengan cara pengamatan dan wawancara terhadap daerah sekitar.

c. Pengelolaan dampak pada persepsi masyarakat

Sumber dampak terhadap persepsi masyarakat adalah akumulasi dari kegiatan.

Kegiatan operasional perusahaan diperkirakan membawa dampak persepsi positif maupun negatif dari masyarakat. Upaya pengelolaan yang dilakukan meliputi :

- Setiap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan diinformasikan kepada pemerintah desa. Hal ini diperlukan karena dengan adanya keterbukaan melalui penyampaian informasi dan koordinasi akan memudahkan penyelesaian jika ada permasalahan atau hal-hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan maupun warga sekitar.

- Mengutamakan warga sekitar untuk tenaga kerja dibidang yang tidak memerlukan ketrampilan dan keahlian. Dengan demikian memberi warga memiliki kesempatan untuk bekerja.
 - Jika terjadi gangguan terhadap lingkungan akibat kegiatan operasional PT Pura Nusapersada yang dibuktikan dengan kajian ilmiah oleh pihak Netral, maka PT Pura Nusapersada akan mengelola dan memperbaikinya.
 - Selain itu PT Pura Nusapersada melakukan bina lingkungan terhadap masyarakat sekitar.
- d. Pengelolaan dampak pada kesehatan masyarakat

Sumber dampak terhadap kesehatan masyarakat adalah kegiatan operasional perusahaan.

Upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan disamping penggunaan alat treatment berupa Dust collector pada sumber yang mengeluarkan Emisi, perlu juga pengelolaan pada media tranmisinya.

Pengelolaan pada media tranmisi yang dapat dilakukan antara lain berupa penghijauan, terutama penanaman pohon disekitar lokasi.

Pemantaun untuk pengukuran kualitas udara, kebisingan dan air limbah setiap 6 bulan sekali sedangkan untuk kesehatan masyarakat sekitar dengan cara pengumpulan data penyakit ISPA setiap setahun sekali.

4.1.4. PT . PURA UNIT POWER PLANT

Perkembangan konsumsi energi listrik PLN khususnya di pulau Jawa dan Bali cenderung mengalami peningkatan cukup tinggi sekitar 10 % pertahun, sehingga dimungkinkan dapat terjadi kekurangan pasokan listrik PLN pada tahun-tahun mendatang. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan sumber energi listrik dan agar tetap menjaga kestabilan proses produksi, maka PT Pura membangun pembangkit listrik atau disebut unit power plant pada tahun 2003, dengan kekuatan 15 MW dengan bahan bakar batu bara, sekam dan grajen. Pembangkit listrik atau unit power plant tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi

listrik di lingkungan internal PT Pura yang dimasa yang akan datang kebutuhan listriknya selalu meningkat.

Dokumen UKL UPL yang dimiliki dibuat pada tahun 2003 sebelum ada kegiatan dan tahun 2007 dokumen UKL UPL tersebut direvisi dikarenakan perubahan:

1. diversifikasi bahan bakar yaitu sekam (kulit padi) dan grajen (serbuk kayu)
2. penambahan jumlah tenaga kerja

Lahan yang digunakan seluas 24.980 m² dengan perbandingan ratio building coverage : open area adalah 41,46 : 58,54 yaitu lahan tertutup seluas 10.357 dan lahan terbuka seluas 14.623. Lokasi kegiatan berada di desa Jati Kulon dan sesuai Perda Kabupaten Kudus Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun batas Ekologis adalah :

Sebelah Utara : Persawahan dan Pemukiman Penduduk

Sebelah Timur : Persawahan dan Bangunan milik DPU

Sebelah Selatan : PT. Pura Kawasan IV

Sebelah Barat : Persawahan dan Tanggul Kali Gelis



Gambar 4.4. PT Pura Unit Power Plant Dari Samping

Jumlah tenaga kerja sebanyak 135 orang yang diutamakan berasal dari Kudus. Tenaga kerja ini terbagi dalam 88 orang tenaga kerja shift dan 47 orang tenaga kerja nonshift. Jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 128 orang dan perempuan sebanyak 7 orang, semua tenaga kerja perempuan adalah tenaga kerja non shift.

Bahan baku yang digunakan dalam proses pembangkit listrik adalah air untuk menghasilkan uap, serta batu bara dan sekam/grajen sebagai bahan bakar.

Adapun proses kegiatan produksi unit power plant adalah sebagai berikut :

Bahan baku batu bara dan sekam/grajen dari gudang terbuka (open storage) dibawa melalui conveyor (ban berjalan) sebagai bahan bakar untuk pengoperasian boiler. Boiler yang beroperasi berjumlah 2 unit, masing-masing berkapasitas 40 ton uap/jam, tekanan 35-39 kg/cm² dengan suhu 345 °C dan konsumsi bahan bakar yang terdiri dari batu bara 14.583kg/jam dan sekam/grajen 4.167 kg/jam. Boiler yang berisi air dari ABT dipanaskan dengan bahan bakar batu bara dan sekam akan menghasilkan uap panas dengan tekanan berkisar 35-39 kg/cm² dengan kapasitas total 8 ton uap/jam. Selanjutnya uap panas tersebut untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Turbin yang digunakan bertipe extracted and condensing turbin yang selain dapat mengkonversi energi panas dari steam/uap menjadi energi listrik juga juga dapat mengekstraksi uap untuk keperluan industri kertas. Turbin yang digunakan berjumlah 2 (dua) unit dengan dengan kapasitas masing-masing 7,5 MW dan voltage 10,5 KV, kemudian dialirkan ke trafo set up menjadi tegangan 20 KV. Dari trafo ini energi listrik dialirkan ke unit produksi PT Pura group dan ke gardu induk PLN terdekat. Untuk keperluan produksi ini pembangkit listrik beroperasi 24 jam.

Kegiatan PT Pura unit Power Plant, dalam penyediaan listrik tersebut kemungkinan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Adapun upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan oleh unit PT Pura unit Power Plant adalah sebagai berikut :

1. Komponen Geologi fisika kimia

a. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan debu

Sumber pencemaran berasal dari kegiatan pengangkutan batu bara/sekam serta pengoperasian boiler. Sisa hasil pembakaran batu bara dan sekam dari pengoperasian boiler akan dibuang ke udara melalui 2 (dua) buah chimney (cerobong). Ketinggian cerobong ± 45 m dari permukaan tanah dengan diameter ± 4 m di bagian bawah dan ± 2 m di bagian atas. Untuk menangkap partikulat padat atau debu, di dalam masing-masing cerobong dipasang peralatan electrostatic precipitator (EP) seperti yang biasa digunakan untuk industri semen dengan efisiensi penangkapan debu atau partikulat dapat mencapai 95 – 99 %.

Batu bara yang dipergunakan sebagai bahan bakar memiliki kandungan sulfur kurang dari 1% dan sekam dengan kandungan air kurang dari 15 %, sehingga tidak memerlukan perlakuan (treatment) khusus untuk menangani buangan gas SO_2 , namun dipersiapkan limestone sebagai campuran batu bara untuk menangkap SO_2 , sehingga terbentuk gypsum sebagai sisa pembakaran.

Proses pembakaran di dalam boiler diatur dengan suhu < 1200 °C, sehingga diharapkan tidak terbentuk gas NO_x , karena gas NO_x akan terbentuk dalam proses pembakaran dengan suhu > 1200 °C. Sedangkan untuk pengangkutan batu bara dan sekam secara tertutup dan diusahakan di malam hari. Pemantauan dilakukan dengan pengujian kualitas udara dan debu setiap 6 bulan sekali.

b. Pengelolaan dampak pada kebisingan

Sumber dampak berasal dari kegiatan transportasi truk pengangkut batu bara dan sekam, pengoperasian boiler, turbin dan generator. Boiler, turbin, dan generator ditempatkan dalam ruangan tertutup yang kedap suara sehingga dapat menekan tingkat kebisingan di sekitar lokasi pembangkit listrik. Selain itu untuk mengurangi tingkat kebisingan diluar, pada lahan terbuka di sekitar lokasi pembangkit listrik ditanami tanaman penghijauan

yang sekaligus juga penyerap gas terutama CO₂. Pemantauan kebisingan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

c. Pengelolaan dampak pada kualitas air

Sumber dampak berasal dari kegiatan pemeliharaan peralatan yang umumnya terkontaminasi oleh oli pelumas dan bahan bakar serta dari kegiatan MCK karyawan.

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah membuat oil trap untuk memisahkan minyak / oli dari kegiatan pemeliharaan peralatan, membuat saluran kepal air dan pemeliharaan saluran limbah cair yang menuju ke IPAL terpadu. PT. Pura Unit Power Plant dilengkapi dengan system water treatment plant untuk mengolah air yang akan digunakan sebagai air pendingin turbin dan air pengumpan boiler. Sedangkan air pendingin setelah keluar dari kondensor dengan suhu $\pm 36^{\circ}\text{C}$ dialirkan ke cooling tower agar menjadi lebih dingin dan siap untuk dialirkan ke kondensor kembali. Limbah cair yang berasal dari boiler dan perawatan $\pm 19\text{ m}^3/\text{hari}$ dialirkan ke IPAL terpadu Pura Group.

Pemantauan dilakukan dengan pengujian limbah cair setiap 6 bulan sekali.

d. Pengelolaan dampak pada limbah padat

Sumber dampak berasal dari hasil pembakaran batu bara dan sekam.

Limbah padat yang dihasilkan dari operasional pembangkit listrik berupa abu bawah (bottom ash) dan abu terbang (fly ash). Berdasarkan data teknis pembangkit listrik menggunakan batu bara sebanyak 350 ton/hari, sekam/grajen sebanyak 100 ton/hari. Limbah padat berasal dari kandungan abu batu bara sebesar 4 %, sedangkan yang berasal dari sekam (kulit padi) dan grajen (serbuk kayu) sebesar 7,5 %.

Jumlah abu yang dihasilkan dari operasional pembangkit listrik adalah:

$$\text{- Abu / ash batu bara} = (4 / 100) \times 350 \text{ ton/hari} = 14 \text{ ton/hari}$$

$$\text{- Abu / ash sekam \& grajen} = (7,5 / 100) \times 100 \text{ ton/hari} = 7,5 \text{ ton/hari}$$

$$\text{Jumlah abu / ash setiap bulan} = 30 \text{ hari} \times 21,5 \text{ ton} = 645 \text{ ton}$$

Dari jumlah tersebut dimanfaatkan untuk bahan baku industri (bata merah, paving blok) rata-rata 300 ton / bulan. Pemantauan dilakukan dengan pengujian laboratorium setiap 6 bulan sekali.

d. Pengelolaan dampak pada hidrologi

Sumber dampak berasal dari penggunaan air bawah tanah untuk pengumpan boiler sebesar 234 m³/hari dan untuk kegiatan MCK. Sedangkan untuk pendingin serta perawatan peralatan dan lingkungan sebesar 1.420 m³/hari menggunakan air hasil pengolahan di Ipal terpadu PT Pura Group di Kencing. Jumlah sumur air bawah tanah yang dimiliki ada 3 buah sumur.

Upaya pengelolaan yang dilakukan dengan pembuatan kolam resapan/polder yang berlokasi disebelah barat unit Power Plant dengan ukuran 1,8 mx90 m. Kolam ini dilengkapi dengan 2 buah pompa dengan kapasitas 1.000 l/menit yang dioperasikan 1 unit dan pompa yang satu sebagai cadangan. Kolam ini sekaligus berfungsi untuk sumur resapan. Upaya lain adalah penanaman penghijauan disekitar lokasi.

Upaya pemantauan dilakukan dengan dengan pengukuran kedalaman muka air pada sumur ABT setiap 6 bulan sekali.

2. Komponen Biologi

Kebisingan yang dihasilkan tidak berpengaruh pada komponen biologi sehingga tidak perlu dikelola. Sedangkan gas buang yang dihasilkan, masih dibawah ambang baku mutu, namun untuk memperkecil adanya pengaruh gas buang, perlu dilakukan penanaman pohon pelindung pada ruang terbuka disekitar lokasi kegiatan PT Pura unit Power Plant.

Pemantauan dilakukan dengan cara pengamatan dan perhitungan jumlah tanaman persatuan luas.

3. Komponen Sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

a. Pengelolaan dampak pada pendapatan masyarakat

Sumber dampak berasal dari kegiatan operasional PT Pura unit Power Plant. Upaya pengelolaan yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang timbul adalah mengutamakan penduduk setempat sesuai dengan

kualifikasi yang dibutuhkan dan pengupahan sesuai dengan upah minimum kabupaten serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Upaya pemantauan dilakukan dengan dengan cara pengamatan dan wawancara terhadap pekerja setiap setahun sekali.

b. Pengelolaan dampak pada kenyamanan hidup

Sumber dampak adalah dari kegiatan operasional PT Pura unit Power Plant.

Upaya pengelolaan yang dilakukan adalah:

- desain ruang generator dan turbin agar memenuhi standar baku mutu
- tinggi cerobong asap minimal 45 m
- pemasangan filter penangkap debu
- bantuan pembangunan jalan kampung dan lampu penerangan

Upaya pemantauan lingkungan dilakukan dengan pengamatan dan wawancara terhadap warga setahun sekali serta melakukan pengukuran kebisingan disekitar lokasi kegiatan

c. Pengelolaan dampak pada persepsi masyarakat

Sumber dampak berasal dari kegiatan rekrutmen tenaga kerja

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah dalam rekrutmen tenaga kerja dengan mengutamakan penduduk lokal sesuai dengan kualifikasi, penanganan dampak lainnya secara konsekuen.

Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah pengamatan dan wawancara terhadap warga sekitar lokasi setahun sekali.

d. Pengelolaan dampak pada kesehatan masyarakat

Sumber dampak yang ada berasal dari polusi udara karena pembangkit listrik menggunakan batu bara dimana limbah yang dihasilkan berupa Sox, NOx dan partikel debu.

Upaya yang dilakukan disamping meminimalkan dampak yang timbul adalah dengan memasang EP (*elektrostatik presipitator*) pada sumber emisi, penghijauan, pembuatan taman dan penggunaan masker untuk karyawan.

Upaya pemantauan lingkungan dengan cara pengamatan dan pemeriksaan kesehatan baik terhadap pekerja maupun warga disekitar lokasi kegiatan setiap tahun sekali.

4.1.5. PEMBANGUNAN TERMINAL CARGO, TERMINAL BUS, JALAN TEMBUS, PUSAT PERDAGANGAN DAN RUMAH TOKO DIKAWASAN BWK IV KABUPATEN KUDUS

Tuntutan akan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dengan penataan yang terpadu dan saling menunjang sangatlah dibutuhkan. Kabupaten Kudus mengalami perkembangan dan perubahan jaringan transportasi angkutan umum, yang harus diimbangi dengan perkembangan sistem terminal angkutan barang. Hal ini akan menyebabkan kondisi terminal yang semakin berat untuk dapat menjawab tantangan perkembangan dimasa yang akan datang ditinjau dari segi jumlah, kapasitas, sirkulasi, tapak maupun manajemen pengelolaaanya.



Gambar 4.5. Pintu Masuk Terminal Cargo Kabupaten Kudus

Salah satu prasarana yang saat ini sangat dibutuhkan di kota Kudus adalah pembangunan terminal cargo yang dimaksudkan untuk mengurangi beban jalan dalam kota dari kendaraan berat. Kegiatan pembangunan terminal cargo

difungsikan untuk menampung pemberhentian sementara angkutan barang yang melintasi Kabupaten Kudus dan sebagai terminal akhir angkutan barang bagi Kabupaten Kudus. Lokasi terminal cargo berada di desa Jati Wetan tepatnya di jalan lingkar selatan berdekatan dengan terminal Kudus yang lama dengan luas total terminal cargo adalah 26.400 m².

Pembangunan terminal bus ini sebagai pengganti terminal yang ada sekarang dan akan dilakukan renovasi melalui rencana lokasi terminal baru yang berada di desa Tanjung Karang, tepatnya berada di persimpangan jalan arteri selatan dengan jalan Kudus-Purwodadi. Luas lahan total yang dialokasikan untuk pembangunan terminal bus adalah 50.000 m².

Untuk memudahkan aksesibilitas bagi penduduk dan kegiatan kota, dalam pembangunan terminal bus akan dilengkapi pula dengan jalan tembus. Pembangunan jalan tembus akan menghubungkan jalan lingkar selatan dengan jalan lingkar utara. Panjang jalan direncanakan sepanjang 1 km., dimana pembangunan jalan tembus ini akan menambah akses ke kota dengan lebih mudah. Luas jalan tembus yang dialokasikan 34.294 m², yang memanfaatkan tanah pertanian milik kas desa dan beberapa diantaranya lahan warga sekitar

Pembangunan pusat perdagangan merupakan pengembangan dari penyediaan jasa yang selama ini terkonsentrasi pada pusat kota Kudus, Lokasi pembangunan pusat perdagangan berada di terminal lama yang akan direlokasi tepatnya berada di desa Jati Wetan dengan luas 26.000 m²

Lokasi pembangunan rumah toko terletak di wilayah administrasi desa Jati Wetan tepatnya di seberang terminal lama yang akan direlokasi. Luas rencana rumah toko 5.552 m².

Kegiatan Pembangunan Terminal Cargo, Terminal Bus, Jalan Tembus, Pusat Perdagangan dan Rumah Toko (Ruko) di kawasan BWK IV Kabupaten Kudus diperkirakan akan berdampak positif maupun negatif dan membawa konsekuensi pada perubahan struktur ekosistem, sumber daya alam disekitarnya dan kegiatan sosial masyarakat. Upaya meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif, Pembangunan Terminal Cargo, Terminal Bus, Jalan tembus, Pusat perdagangan dan Rumah Toko (Ruko) di kawasan BWK IV

Kabupaten Kudus tersebut dilakukan telaah aspek kelayakan lingkungan dengan melaksanakan Studi Mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga disusun dokumen ANDAL, RKL, RPL untuk kegiatan tersebut.

Dalam pembangunan terminal cargo, pusat perdagangan dan rumah toko (ruko) di kawasan BWK IV Kabupaten Kudus tersebut ada 3 (tiga) tahapan yang dilalui yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Untuk pembangunan terminal cargo sudah selesai dilaksanakan. Dalam kenyataannya sekarang keberadaan terminal cargo tersebut belum berfungsi secara efektif. Terminal cargo yang semula direncanakan sebagai tempat bongkar muat untuk barang-barang yang akan masuk ke Kabupaten Kudus, sekarang difungsikan sebagai tempat parkir bagi sebagian kendaraan saja. Hal tersebut disebabkan untuk kapasitas terminal cargo sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 1995 pada bab III menyebutkan bahwa terminal cargo harus mempunyai volume sekitar 5000 kendaraan, kenyataan di Kabupaten Kudus belum memenuhi dari luas lahan yang digunakan untuk terminal cargo. Untuk bongkar muat barang-barang bagi beberapa perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kudus sudah mempunyai lahan tersendiri untuk kegiatan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku pemrakarsa sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan menengah untuk dapat memanfaatkan keberadaan terminal cargo tersebut. Dengan demikian terminal cargo nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya walaupun hanya dapat menampung sebagian kecil kegiatan bongkar muat barang yang ada di Kabupaten Kudus.

Untuk kegiatan pembangunan jalan tembus sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sedangkan untuk pembangunan rumah toko dan pusat perdagangan serta terminal bus belum direalisasi sampai sekarang dikarenakan faktor biaya. Pada tahap operasional terminal cargo akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif.

1. Komponen geologi fisika kimia

a. Pengelolaan dampak pada perubahan fisiografi

Pada kegiatan ini menimbulkan dampak terhadap perubahan fisiografi yang disebabkan oleh perubahan bentuk lahan dari lahan persawahan menjadi bangunan terminal cargo. Pengelolaan yang dilakukan adalah menata drainase sekitar lokasi kegiatan, sehingga fungsi awal daerah tersebut sebagai daerah tampungan masih dapat dipertahankan, melakukan bentuk perkerasan dipermukaan sehingga masih dapat memungkinkan terjadinya peresapan air permukaan.

b. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan kebisingan

Penurunan kualitas udara dan kebisingan berasal dari kegiatan operasional terminal cargo dan paparan gas buang yang kendaraan yang dioperasikan padaposisi stasioner. Sedangkan kebisingan berasal berasal dari operasional alat berat dan kendaraan yang keluar masuk terminal cargo. Pengelolaan lingkungan terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan

- Membuat buffer zone dengan penataan lansekap dan vegetasi pendukung
- Melakukan pembatasan usia truk yang layak beroperasi
- Regulasi tentang pola operasional kendaraan yang berhenti di terminal cargo, sehingga paparan emisi dapat dikendalikan.

c. Pengelolaan dampak pada penurunan kualitas air permukaan

Penurunan kualitas air dipengaruhi oleh buangan limbah cair dari aktifitas terminal cargo. Pengelolaan limbah untuk sekitar terminal cargo yang dilakukan dengan cara melakukan penyaluran limbah ke saluran drainase, sehingga akan dibuang ke kolam pengumpul. Rancangan saluran drainase tersebut memiliki 2 fungsi disamping sebagai pengendali banjir, juga berfungsi untuk pemutus limbah, membuat komunal sistem untuk pengolahan limbah industri dan rumah tangga, dengan prakarsa dari pemerintah atau warga karena limbah tidak disebabkan oleh sisa kegiatan terminal cargo. Sedangkan untuk limbah dari kegiatan terminal cargo,

dengan debit kecil dan berasal dari kegiatan domestic kamar mandi dengan membuat septik tank dan bidang resapan

d. Pengelolaan dampak pada transportasi

Dampak Transportasi disebabkan keluar masuknya kendaraan ke dan dari terminal cargo. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah melakukan pengaturan dari dan ke terminal cargo, memasang traffig light untuk mengatur arus lalu lintas pada entrance terminal cargo, membuat akses pada arteri sehingga kendaraan tidak langsung masuk kejalur cepat arteri.

e. Pengelolaan dampak pada tata ruang

Perubahan tata ruang disebabkan oleh perubahan pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. Pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menyusun RTBL kawasan sehingga dapat digunakan untuk pedoman fungsi pengawasan, memperketet terbitnya IMB pada kawasan.

2. Komponen biologi

Komponen biologi bukan merupakan dampak penting dari kegiatan pembangunan terminal cargo

3. Komponen sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

a. Pengelolaan dampak pada ketenaga kerjaan

Sumber dampak berasal dari adanya kegiatan operasional terminal cargo dan fasilitas pendukungnya. Pengelolaan yang dilakukan dengan pemberian kesempatan bekerja dengan mengutamakan penduduk sekitar dan pemberian kesempatan berusaha bagi penduduk sekitar terminal cargo

b. Pengelolaan dampak pada mata pencaharian dan pendapatan

Sumber dampak berasal dari adanya kegiatan operasional terminal cargo dan fasilitas pendukungnya. Pengelolaan yang dilakukan dengan pemberian kesempatan bekerja dengan mengutamakan penduduk sekitar dan pemberian kesempatan berusaha bagi penduduk sekitar, seperti menjadi tenaga operasional terminal cargo.

c. Pengelolaan dampak pada kesehatan masyarakat

Untuk aspek kesehatan masyarakat bukan merupakan dampak penting.

d. Pengelolaan dampak pada kesehatan lingkungan

Sumber dampak berasal dari operasional terminal cargo dan fasilitas pendukungnya. Adapun pengelolaan yang dilakukan adalah pengolahan limbah buangan air dengan membuat septik tank, pengenceran air limbah dengan air yang memiliki kualitas air lebih baik.

Untuk pembangunan jalan tembus juga akan berdampak pada lingkungan adalah:

1. Komponen geologi fisika kimia

a. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan kebisingan

Penurunan kualitas udara dan kebisingan berasal dari operasional jalan tembus dan paparan gas buang dari kendaraan, sedangkan kebisingan berasal dari operasional alat berat dan kendaraan yang keluar masuk jalan. Pengelolaan lingkungan terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan dapat dilakukan dengan membuat buffer zone dengan penataan lansekap dan vegetasi pendukung, melakukan pembatasan usia truk yang layak beroperasi, regulasi tentang pola operasional kendaraan yang berhenti di terminal cargo, sehingga paparan emisi dapat dikendalikan.

b. Pengelolaan dampak pada transportasi

Dampak Transportasi disebabkan keluar masuknya kendaraan ke dan dari jalan tembus. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah melakukan pengaturan dari dan ke jalan tembus, memasang trafilight untuk mengatur arus lalu lintas pada entrance terminal cargo, membuat akses pada arteri sehingga kendaraan tidak langsung masuk kejalur cepat arteri.

c. Pengelolaan dampak pada tata ruang

Perubahan tata ruang disebabkan oleh perkembangan ruang dan perubahan pemanfaatan lahan akibat adanya jalan tembus.

Pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menyusun studi RTBL kawasan sehingga dapat digunakan untuk pedoman fungsi pengawasan, memperketat terbitnya IMB pada kawasan.

2. Komponen biologi

Komponen biologi bukan dampak penting

3. Komponen sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

a. Pengelolaan dampak pada ketenaga kerjaan

Sumber dampak berasal dari adanya kegiatan operasional jalan tembus. . Pengelolaan yang dilakukan dengan pemberian kesempatan bekerja dengan mengutamakan penduduk sekitar dan pemberian kesempatan berusaha bagi penduduk sekitar jalan tembus

b. Pengelolaan dampak pada mata pencaharian dan pendapatan

Sumber dampak berasal dari adanya kegiatan operasional jalan tembus dan fasilitas pendukungnya. Pengelolaan yang dilakukan dengan pemberian kesempatan bekerja dengan mengutamakan penduduk sekitar dan pemberian kesempatan berusaha bagi penduduk sekitar.

c. Pengelolaan dampak pada kesehatan masyarakat

Untuk aspek kesehatan masyarakat bukan merupakan dampak penting.

d. Pengelolaan dampak pada kesehatan lingkungan

Sumber dampak berasal dari operasional jalan tembus dan fasilitas pendukungnya. Adapun pengelolaan yang dilakukan adalah pengolahan limbah buangan air dengan membuat septic tank, pengenceran air limbah dengan air yang memiliki kualitas air lebih baik.

4.2. HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN AMDAL DAN UKL UPL

Pada bagian ini akan menguraikan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kelima sampel terpilih dengan mengambil 3 kelompok responden yaitu perusahaan/pemrakarsa kegiatan, masyarakat dan Dinas/Instansi.

4.2.1. PERUSAHAAN/PEMRAKARSA KEGIATAN

4.2.1.1. PT DJARUM UNIT PRIMARY PROCESS

4.2.1.1.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen UKL UPL

Penelitian terhadap karyawan perusahaan dilakukan terhadap 25 responden yang dianggap kompeten. Mengenai latar belakang penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPL, dari hasil penelitian sebanyak 80 % latar belakang penyusunan dokumen yaitu untuk mengetahui dampak yang terjadi sehingga dapat dilakukan pengelolaan, melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang. Sisanya sebanyak 12 % untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan serta sisanya 8 % untuk mengetahui dampak sehingga dapat dilakukan pengelolaan sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1. berikut ini

Tabel 4.1. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di PT Djarum unit Primary Process

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memenuhi aturan undang-undang		
2.	Mengetahui dampak untuk melakukan pengelolaan	2	8
3.	Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan	3	12
4.	Menjawab ketiga jawaban tersebut diatas	20	80
	Jumlah responden	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah dokumen UKL UPL yang dimiliki oleh PT Djarum unit Primary Process, 88 % dokumen UKL UPL tersebut di perbanyak untuk masing-masing bagian sehingga semua orang dapat tahu isi dokumen UKL UPL tersebut. Sedangkan 12 % dokumen UKL UPL tersebut berjumlah satu buah yang di simpan di perpustakaan yang berarti setiap orang dapat membaca dokumen tersebut. Secara rinci mengenai jumlah dokumen sebagaimana tersaji dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2. Jumlah dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Di perbanyak untuk masing-masing bagian	22	88
2.	Satu buah, di simpan di perpustakaan	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai keterlibatan karyawan perusahaan dalam penyusunan dokumen UKL UPL adalah sebanyak 92 % penyusunan dokumen UKL UPL dilakukan oleh semua bagian yang terkait sehingga karyawan tahu tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sedangkan sisanya yaitu 8 % hanya bagian lingkungan saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen. Bagian lingkungan ini bertugas sebagai koordinator dalam penyusunan dokumen UKL UPL tersebut, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3. Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Direksi		
2.	Umum dan personalia		
3.	Semua bagian terkait	23	92
4.	Bagian lingkungan	2	8

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai dokumen UKL UPL yang dimiliki, sebanyak 92 % pemahaman tentang dokumen UKL UPL yang dimiliki tersebut cukup mudah dan sisanya 8 % pemahaman dokumen UKL UPL sangat mudah sebagaimana tersaji dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4. Pemahaman dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat mudah	2	8
2.	Cukup mudah	23	92
3.	Tidak mudah	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.1.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dalam kegiatan proses produksi akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, sehingga memerlukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL UPL, untuk semua komponen lingkungan baik komponen geologi fisika kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat, pihak perusahaan sudah sepenuhnya melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Sedangkan upaya

pemantauan lingkungan, pihak perusahaan sudah sepenuhnya melakukan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.5 dan tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.5. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dalam dokumen UKL UPL

No	Komponen lingkungan yang dikelola	Sudah dikelola		Belum dikelola	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	25	100	0	0
2.	Kebisingan	25	100	0	0
3.	Kualitas air	25	100	0	0
4.	Limbah padat	25	100	0	0
5.	Hidrologi	25	100	0	0
6.	Pendapatan masyarakat	25	100	0	0
7.	Kenyamanan hidup	25	100	0	0
8.	Persepsi masyarakat	25	100	0	0
9.	Kesehatan masyarakat	25	100	0	0
10.	Pola lalu lintas	25	100	0	0
	Jumlah		100		0

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.6. Pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan dalam dokumen UKL UPL

No	Komponen lingkungan yang dipantau	Sudah dipantau		Belum dipantau	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	25	100	0	0
2.	Kebisingan	25	100	0	0
3.	Kualitas air	25	100	0	0
4.	Limbah padat	25	100	0	0
5.	Hidrologi	25	100	0	0
6.	Pendapatan masyarakat	25	100	0	0
7.	Kenyamanan hidup	25	100	0	0
8.	Persepsi masyarakat	25	100	0	0
9.	Kesehatan masyarakat	25	100	0	0
10.	Pola lalu lintas	25	100	0	0
	Jumlah		100		0

Sumber: Analisis data, 2008

Adapun mengenai pelaksana upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan oleh perusahaan, dilakukan oleh secara bersama-sama oleh semua pihak/bagian yang terkait.

Mengenai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimiliki, sebanyak 92 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan tidak ada kendala dan sisanya 8 % kendala pelaksanaan UKL UPL tersebut adalah biaya yang terlalu mahal dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7. Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Biaya terlalu mahal	2	8
2.	Tidak ada SDM yang menangani	0	0
3.	Tidak ada teknologi yang diterapkan	0	0
4.	Tidak ada kendala	23	92
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan tersebut dikarenakan adanya reward/penghargaan dari pemerintah sebanyak 80 %, adanya pengakuan pasar sebanyak 16 % dan sisanya 4 % karena adanya pengawasan dari Dinas/Instansi, sebagaimana tersaji dalam tabel

Tabel 4.8. Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Adanya pengawasan Dinas/Instansi	1	4
2.	Adanya pengakuan pasar	4	16
3.	Adanya reward pemerintah	20	80
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) yang ada di PT Djarum unit Primary Process, kebijakan tersebut sudah sepenuhnya dilakukan dan PT Djarum unit Primary Process. PT Djarum unit Primary Process merupakan pelopor bagi perusahaan lain yang ada di Kabupaten Kudus dalam menjalankan program CSR tersebut.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, manfaat yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut adalah dapat meningkatkan citra positif bagi perusahaan serta sebagai masukan kepada manajemen untuk perbaikan dan pengembangan dalam pengelolaan lingkungan. Mengenai format laporan pelaksanaan UKL UPL yang sudah ada yaitu bahwa format yang sudah ada tersebut cukup memadai.

Dari pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan oleh PT Djarum unit Primary Process, sebanyak 100 % pelaksanaan UKL UPL tersebut sudah efektif sebagaimana tersaji dalam tabel 4.9 berikut

Tabel 4.9. Pelaksanaan UKL UPL di PT Djarum unit Primary Process

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah efektif	25	100
2.	Cukup efektif	0	0
3.	Belum efektif	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.1.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan yang berasal dari luar perusahaan / ekstern perusahaan, di PT Djarum unit Primary Process dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas/Instansi, misal Dinas Tenaga Kerja mengawasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.

4.2.1.2. PT ENGGAL SUBUR KERTAS

4.2.1.2.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen UKL UPL

Penelitian terhadap karyawan perusahaan sebanyak 15 responden yang dianggap kompeten. Mengenai latar belakang penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPL, sebanyak 60 % latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL adalah memenuhi administrasi perijinan, 20 % untuk mengetahui dampak sehingga dapat dilakukan pengelolaan dan 20 % untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana tersaji dalam tabel 4.10. berikut ini

Tabel 4.10. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di PT Enggal Subur Kertas

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memenuhi administrasi perijinan	9	60
2.	Mengetahui dampak untuk melakukan pengelolaan	3	20
3.	Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan	3	20
	Jumlah responden	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai jumlah dokumen UKL UPL yang dimiliki oleh PT Enggal Subur Kertas, sebanyak 86 % dokumen UKL UPL tersebut hanya ada 1 buah dan di simpan di perpustakaan, sedangkan sisanya 14 % dokumen UKL UPL di perbanyak untuk masing- masing bagian, Secara rinci mengenai jumlah dokumen sebagaimana tersaji dalam tabel 4.11

Tabel 4.11. Jumlah dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Di perbanyak untuk masing-masing bagian	2	14
2.	Satu buah, di simpan di perpustakaan	13	86
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai keterlibatan karyawan perusahaan dalam penyusunan dokumen UKL UPL adalah sebanyak 80 % penyusunan dokumen UKL UPL dilakukan oleh bagian personalia dan umum, 12 % penyusunan dokumen UKL UPL dilakukan oleh bagian lingkungan dan sisanya 6 % penyusunan dokumen UKL UPL dilakukan oleh jajaran direksi, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.12.

Tabel 4.12. Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Direksi	1	6
2.	Umum dan personalia	12	80
3.	Semua bagian terkait		
4.	Bagian lingkungan	2	14
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian tentang dokumen UKL UPL yang dimiliki, sebanyak 80 % dokumen UKL UPL yang dimiliki pemahamannya cukup mudah dan sisanya 20 % pemahaman tentang dokumen UKL UPL sangat mudah sebagaimana tersaji dalam tabel 4.13.

Tabel 4.13. Pemahaman dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat mudah	0	0
2.	Cukup mudah	12	80
3.	Tidak mudah	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.2.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dalam kegiatan produksi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga memerlukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Adapun pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tertuang dalam dokumen UKL UPL, untuk semua komponen lingkungan baik komponen geologi fisika kimia, biologi dan sosial budaya kesehatan masyarakat. Dari hasil penelitian 75,1 % perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, sedangkan sisanya 24,9 % perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Sedangkan upaya pemantauan lingkungan, sebanyak 66 % perusahaan telah melakukan upaya pemantauan lingkungan dan sisanya 34 % belum melakukan upaya pemantauan lingkungan tertuang dalam tabel 4.14 dan tabel 4.15.

Tabel 4.14. Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen UKL UPL

No	Komponen lingkungan yang dikelola	Sudah dikelola		Belum dikelola	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	12	80	3	20
2.	Kebisingan	12	80	3	20
3.	Kualitas air	12	80	3	20
4.	Limbah padat	10	66	5	34
5.	Hidrologi	10	66	5	34
6.	Pendapatan masyarakat	12	80	3	20
7.	Kenyamanan hidup	11	73	4	27
8.	Persepsi masyarakat	10	66	5	34
9.	Kesehatan masyarakat	12	80	3	20
10.	Pola lalu lintas	12	80	3	20
	Jumlah		75,1		24,9

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.15. Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen UKL UPL

No	Komponen lingkungan yang dipantau	Sudah dipantau		Belum dipantau	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	10	66	5	34
2.	Kebisingan	10	66	5	34
3.	Kualitas air	10	66	5	34
4.	Limbah padat	10	66	5	34
5.	Hidrologi	10	66	5	34
6.	Pendapatan masyarakat	10	66	5	34
7.	Kenyamanan hidup	10	66	5	34
8.	Persepsi masyarakat	10	66	5	34
9.	Kesehatan masyarakat	10	66	5	34
10.	Pola lalu lintas	10	66	5	34
	Jumlah		66		34

Sumber: Analisis data, 2008

Adapun mengenai pelaksana upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 86 % upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan dilakukan oleh perusahaan dengan pihak terkait secara bersama-sama dan sisanya 14 % upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan dilakukan oleh bagian lingkungan, seperti tabel 4.16.

Tabel 4.16. Pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di perusahaan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Pihak perusahaan dengan bagian terkait	13	86
2.	Bagian lingkungan	2	14
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimiliki, dari hasil penelitian sebanyak 86 % kendala dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan adalah terbentur biaya yang terlalu mahal dan sisanya 14 % tidak ada teknologi yang diterapkan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.17.

Tabel 4.17. Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Biaya terlalu mahal	13	86
2.	Tidak ada teknologi yang diterapkan	2	14
3.	Tidak ada SDM yang menangani	0	0
4.	Tidak ada kendala	0	0
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan didorong oleh adanya pengawasan dari Dinas/Instansi sebanyak 86 % dan sisanya 14 % karena adanya reward/penghargaan dari pemerintah, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.17.

Tabel 4.17. Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Adanya pengawasan Dinas/Instansi	13	86
2.	Adanya reward pemerintah	2	14
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) yang ada di PT Enggal Subur Kertas, 34 % kebijakan tentang CSR tersebut belum ada, 33 % kebijakan tentang CSR tersebut sudah ada dan sudah dilakukan di PT Enggal Subur Kertas, dan sisanya 33 % tidak tahu tentang program CSR tersebut, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.18. berikut.

Tabel 4.18. Kebijakan perusahaan tentang CSR

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak ada	5	34
2.	Ada	5	33
3.	Tidak tahu	5	33
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, manfaat yang diperoleh adalah sebanyak 66 % ada manfaatnya yaitu untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sedangkan sisanya sebanyak 34 % tidak tahu manfaat apa yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan lingkungan tersebut, tersaji dalam tabel 4.19.

Tabel 4.19. Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tahu	5	34
2.	Lingkungan tetap bersih	10	66
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai format laporan pelaksanaan UKL UPL yang sudah ada, sebanyak 80 % format yang sudah ada cukup memadai dan sisanya sebanyak 20 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.20.

Tabel 4.20. Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang memenuhi	0	0
2.	Cukup memenuhi	12	80
3.	Tidak tahu	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan oleh PT Enggal Subur Kertas, dari hasil penelitian sebanyak 80 %

pelaksanaan UKL UPL kurang efektif dan sisanya sebanyak 20 % pelaksanaannya sudah efektif, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.21.

Tabel 4.21. Pelaksanaan UKL UPL di PT Enggal Subur Kertas

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah efektif	10	66
2.	Cukup efektif	5	34
3.	Belum efektif	0	0
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.2. 3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan yang berasal dari luar perusahaan / ekstern perusahaan, di PT Enggal Subur Kertas dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas/Instansi, misal Dinas Tenaga Kerja mengawasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.

4.2.1.3. PT PURA NUSA PERSADA

4.2.1.3.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen UKL UPL

Penelitian dilakukan terhadap karyawan perusahaan sebanyak 25 responden yang dianggap kompeten. Mengenai latar belakang penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPL, dari hasil penelitian sebanyak 36 % penyusunan dokumen UKL UPL tersebut untuk memenuhi administrasi perijinan, 28 % untuk mengetahui dampak sehingga dapat dilakukan pengelolaan, 28 % untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan serta 8 % untuk menghindari pengaduan masyarakat, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.22. berikut ini

Tabel 4.22. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di PT Pura Nusa Persada

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memenuhi adminitrasi perijinan	9	36
2.	Mengetahui dampak untuk melakukan pengelolaan	7	28
3.	Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan	7	28
4.	Menghindari pengaduan masyarakat	2	8
	Jumlah responden	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Jumlah dokumen UKL UPL yang dimiliki oleh PT Pura Nusa Persada, dari hasil penelitian sebanyak 40 % dokumen UKL UPL tersebut di perbanyak untuk masing-masing bagian, 60 % dokumen UKL UPL tersebut hanya ada 1 buah dan di simpan di perpustakaan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.23.

Tabel 4.23. Jumlah dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Di perbanyak untuk masing-masing bagian	10	40
2.	Satu buah, di simpan di perpustakaan	15	60
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai keterlibatan karyawan perusahaan dalam penyusunan dokumen UKL UPL, dari hasil penelitian sebanyak 40 % penyusunan dokumen UKL UPL dilakukan oleh bagian lingkungan, 40 % dilakukan oleh semua bagian yang terkait, 12 % oleh bagian umum personalia dan sisanya 8 % penyusunan dokumen UKL UPL dilakukan oleh jajaran direksi, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.24.

Tabel 4.24. Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Direksi	2	8
2.	Personalia dan umum	3	12
3.	Bagian lingkungan	10	40
4.	Semua bagian terkait	10	40
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Tentang dokumen UKL UPL yang dimiliki oleh perusahaan, dari hasil penelitian pemahamannya cukup mudah sebanyak 88 % dan sisanya 12 % pemahaman tentang dokumen UKL UPL sangat mudah sebagaimana tersaji dalam tabel 4.25.

Tabel 4.25. Pemahaman tentang dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat mudah	3	12
2.	Cukup mudah	22	8
3.	Tidak mudah	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.3.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dalam kegiatan proses produksi akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, sehingga memerlukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL UPL, untuk semua komponen lingkungan baik komponen geologi fisika kimia, biologi dan sosial budaya kesehatan masyarakat. Dari hasil penelitian, sebanyak 90 % pihak perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan terhadap lingkungan dan sisanya 10 % belum melaksanakan tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel 4.26 dan 4.27. upaya pengelolaan dan upaya pemantauan terhadap lingkungan

Tabel 4.26. Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen UKL UPL

No	Komponen lingkungan yang dikelola	Sudah dikelola		Belum dikelola	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	24	96	1	4
2.	Kebisingan	23	92	2	8
3.	Kualitas air	24	96	1	4
4.	Limbah padat	23	92	2	8
5.	Hidrologi	22	88	3	12
6.	Pendapatan masyarakat	22	88	3	12
7.	Kenyamanan hidup	23	92	2	8
8.	Persepsi masyarakat	22	88	3	12
9.	Kesehatan masyarakat	22	88	3	12
10.	Pola lalu lintas	20	80	5	20
	Jumlah		90		10

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.27. Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen UKL UPL

No	Komponen lingkungan yang dipantau	Sudah dipantau		Belum dipantau	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	24	96	1	4
2.	Kebisingan	23	92	2	8
3.	Kualitas air	24	96	1	4
4.	Limbah padat	23	92	2	8
5.	Hidrologi	22	88	3	12
6.	Pendapatan masyarakat	22	88	3	12
7.	Kenyamanan hidup	23	92	2	8
8.	Persepsi masyarakat	22	88	3	12
9.	Kesehatan masyarakat	22	88	3	12
10.	Pola lalu lintas	20	80	5	20
	Jumlah		90		10

Sumber: Analisis data, 2008

Adapun mengenai pelaksana upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 92 % upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan dilakukan oleh perusahaan dengan pihak terkait secara bersama-sama dan sisanya 8 % bagian lingkungan saja yang melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti tersaji dalam tabel 4.28.

Tabel 4.28. Pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di perusahaan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Pihak perusahaan dengan bagian terkait	23	92
2.	Bagian lingkungan	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimiliki, dari hasil penelitian sebanyak 68 % kendalanya adalah terbentur biaya yang terlalu mahal dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan 32 % tidak ada teknologi yang diterapkan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.29.

Tabel 4.29. Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Biaya terlalu mahal	17	68
2.	Tidak ada teknologi yang diterapkan	8	32
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Yang mendorong pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 56 % pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dikarenakan adanya pengawasan dari Dinas/Instansi dan sisanya 24 % karena adanya reward/penghargaan dari pemerintah serta adanya pengakuan pasar 16 %, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.30.

Tabel 4.30. Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Adanya pengawasan Dinas/Instansi	14	56
2.	Adanya reward pemerintah	6	24
3.	Adanya pengakuan pasar	4	16
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) yang ada di PT Pura Nusa Persada, dari hasil penelitian sebanyak 80 % kebijakan tentang CSR sudah ada, sedang sisanya sebanyak 20 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.31. berikut.

Tabel 4.31. Kebijakan perusahaan tentang CSR

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak ada	0	0
2.	Ada	20	80
3.	Tidak tahu	5	20
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dari hasil penelitian, manfaat yang diperoleh sehubungan dengan pengelolaan lingkungan tersebut adalah sebanyak 88 % ada manfaatnya yaitu ikut menjaga kelestarian lingkungan dan 12 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.32.

Tabel 4.32. Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tahu	3	12
2.	Menjaga kelestarian lingkungan	22	88
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai format laporan pelaksanaan UKL UPL yang sudah ada, dari hasil penelitian sebanyak 92 % format yang sudah ada cukup memadai dan sisanya sebanyak 8 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.33.

Tabel 4.33..Format laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan yang ada

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang memadai	0	0
2.	Cukup memadai	23	92
3.	Tidak tahu	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan oleh PT Pura Nusa Persada, dari hasil penelitian sebanyak 88 % pelaksanaan UKL UPL sudah efektif dan sisanya sebanyak 12 % pelaksanaan UKL UPL kurang efektif, seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.34. Pelaksanaan UKL UPL di PT Pura Nusa Persada

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah efektif	23	92
2.	Cukup efektif	2	8
3.	Belum efektif	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.3.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan yang berasal dari luar perusahaan / ekstern perusahaan, di PT Pura Nusa Persada dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas/Instansi, misal Dinas Tenaga Kerja mengawasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.

4.2.1.4. PT PURA UNIT POWER PLANT

4.2.1.4.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen AMDAL dan UKL UPL

Penelitian terhadap karyawan perusahaan sebanyak 15 responden yang dianggap kompeten. Mengenai latar belakang penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPL, dari hasil penelitian sebanyak 46 % untuk memenuhi administrasi perijinan, 26 % untuk mengetahui dampak sehingga dapat melakukan pengelolaan dan 26 % untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.35. berikut ini

Tabel 4.35. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di PT Pura Barutama Unit Power Plant

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memenuhi adminitrasi perijinan	7	46
2.	Mengetahui dampak untuk melakukan pengelolaan	4	26
3.	Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan	4	26
	Jumlah responden	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Jumlah dokumen UKL UPL yang dimiliki oleh PT Pura Barutama unit Power Plant, dari hasil penelitian sebanyak 80 % dokumen UKL UPL tersebut berjumlah 1 buah yang disimpan diperpustakaan, dan sisanya 20 % dokumen UKL UPL tersebut di perbanyak untuk masing-masing bagian.. Secara rinci mengenai jumlah dokumen sebagaimana tersaji dalam tabel 4.36

Tabel 4.36. Jumlah dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Di perbanyak untuk masing-masing bagian	3	20
2.	1 buah, disimpan di perpustakaan	12	80
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai keterlibatan karyawan perusahaan dalam penyusunan dokumen UKL UPL, dari hasil penelitian sebanyak 80 % penyusunan dokumen UKL UPL dilakukan oleh bagian umum personalia, 20 % dilakukan oleh semua bagian yang terkait, 14 % oleh bagian lingkungan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.37.

Tabel 4.37. Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Personalia dan umum	10	66
2.	Bagian lingkungan	2	14
3.	Semua bagian terkait	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Tentang dokumen UKL UPL yang dimiliki, dari hasil penelitian sebanyak 86 % pemahaman tentang dokumen UKL UPL yang dimiliki cukup mudah dan sisanya 14 % tidak tahu sebagaimana tersaji dalam tabel 4.38.

Tabel 4.38. Pemahaman tentang dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat mudah	0	0
2.	Cukup mudah	13	86
3.	Tidak tahu	2	14
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.4.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dalam kegiatan proses produksi akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, sehingga memerlukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL UPL, untuk semua komponen lingkungan baik komponen geologi fisika kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat, dari hasil penelitian sebanyak 81,2 % pihak perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, sisanya 18,8 % perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.39 dan tabel 4.40

Tabel 4.39. Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen UKL UPL

No	Komponen lingkungan yang dikelola	Sudah dikelola		Belum dikelola	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	14	93	1	7
2.	Kebisingan	12	80	3	20
3.	Kualitas air	12	80	3	20
4.	Limbah padat	13	86	2	14
5.	Hidrologi	11	73	4	27
6.	Pendapatan masyarakat	12	80	3	20
7.	Kenyamanan hidup	12	80	3	20
8.	Persepsi masyarakat	12	80	3	20
9.	Kesehatan masyarakat	12	80	3	20
10.	Pola lalu lintas	12	80	3	20
	Jumlah		81,2		18,8

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.40. Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen UKL UPL

No	Komponen lingkungan yang dipantau	Sudah dipantau		Belum dipantau	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	14	93	1	7
2.	Kebisingan	12	80	3	20
3.	Kualitas air	12	80	3	20
4.	Limbah padat	13	86	2	14
5.	Hidrologi	11	73	4	27
6.	Pendapatan masyarakat	12	80	3	20
7.	Kenyamanan hidup	12	80	3	20
8.	Persepsi masyarakat	12	80	3	20
9.	Kesehatan masyarakat	12	80	3	20
10.	Pola lalu lintas	12	80	3	20
	Jumlah		81,2		18,8

Sumber: Analisis data, 2008

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 86 % upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan dilakukan oleh perusahaan dengan pihak terkait secara bersama-sama dan sisanya 14 % bagian lingkungan saja yang melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti tersaji dalam tabel 4.41.

Tabel 4.41. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di perusahaan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Pihak perusahaan dengan bagian terkait	13	86
2.	Bagian lingkungan	2	14
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimiliki, dari hasil penelitian sebanyak 80 % kendalanya adalah terbentur biaya yang terlalu mahal dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan 20 % tidak ada teknologi yang diterapkan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.42.

Tabel 4.42. Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Biaya terlalu mahal	12	80
2.	Tidak ada teknologi yang diterapkan	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan tersebut dikarenakan adanya pengawasan dari Dinas/Instansi, dari hasil penelitian sebanyak 74 % dan sisanya 26 % karena adanya pengaduan dari masyarakat, sebagaimana tersaji dalam tabel 43.

Tabel 4.43. Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Adanya pengawasan Dinas/Instansi	11	74
2.	Adanya pengaduan masyarakat	4	26
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) yang ada di PT Pura Barutama Power Plant, sebanyak 74 % kebijakan tersebut sudah ada, sedang sisanya sebanyak 26 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.44 berikut.

Tabel 4.44. Kebijakan perusahaan tentang CSR

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Ada	11	74
2.	Tidak ada	0	0
3.	Tidak tahu	4	26
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, manfaat yang diperoleh sehubungan dengan pengelolaan lingkungan tersebut adalah sebanyak

66 % ada manfaatnya yaitu agar tidak mencemari lingkungan dan 34 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.45.

Tabel 4.45. Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tahu	5	34
2.	Tidak mencemari lingkungan	10	66
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai format laporan pelaksanaan UKL UPL yang sudah ada, dari hasil penelitian sebanyak 80 % format yang sudah ada cukup memadai dan sisanya sebanyak 20 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.46..

Tabel 4.46. Format laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan yang ada

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat memadai	0	0
2.	Cukup memadai	12	80
3.	Tidak tahu	3	20
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan oleh PT Pura unit Power Plant , sebanyak 66 % pelaksanaan UKL UPL sudah efektif dan sisanya sebanyak 34 % pelaksanaanya kurang efektif, seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.47. Pelaksanaan UKL UPL di PT Pura unit Power Plant

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah efektif	10	66
2.	Cukup efektif	5	34
3.	Belum efektif	0	0
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.4.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dalam pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara ekstern, di PT Pura unit Power Plant dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas/Instansi.

**4.2.1.5. PEMBANGUNAN TERMINAL CARGO, TERMINAL BUS, JALAN
TEMBUS, PUSAT PERDAGANGAN, RUMAH TOKO DI
KAWASAN IV BWK KABUPATEN KUDUS**

4.2.1.5.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen AMDAL

Penelitian terhadap karyawan perusahaan terhadap 15 responden yang dianggap kompeten. Mengenai latar belakang penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPL, dari hasil penelitian sebanyak 80 % untuk memenuhi administrasi perijinan dan 20 % untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.48. berikut ini

Tabel 4.48. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL UPL di Terminal Cargo

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memenuhi adminitrasi perijinan	12	80
2.	Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan	3	20
	Jumlah responden	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Sedangkan jumlah dokumen UKL UPL yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, berjumlah 1 buah dan di simpan di perpustakaan.

Mengenai keterlibatan pemrakarsa dalam menyusun dokumen UKL UPL, semua bagian terkait ikut terlibat dalam penyusunan dokumen UKL UPL tersebut.

Tentang dokumen UKL UPL yang dimiliki, dari hasil penelitian pemahamannya cukup mudah sebanyak 80 % dan sisanya 20 % menjawab tidak tahu sebagaimana tersaji dalam tabel 4.49.

Tabel 4.49. Pemahaman tentang dokumen AMDAL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat mudah	0	0
2.	Cukup mudah	12	80
3.	Tidak tahu	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.5.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dalam kegiatan proses produksi akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, sehingga memerlukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pelaksanaan terhadap upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL UPL, untuk semua komponen lingkungan baik komponen geologi fisika kimia, biologi dan sosial budaya kesehatan masyarakat. Dari hasil penelitian sebanyak 70 % pihak perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan terhadap lingkungan, sisanya 30 % belum melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.50 dan tabel 4.51.

Tabel 4.50. Pelaksanaan upaya pengelolaan dalam dokumen AMDAL

No	Komponen lingkungan yang dikelola	Sudah dikelola		Belum dikelola	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	10	66	5	34
2.	Kebisingan	10	66	5	34
3.	Kualitas air	10	66	5	34
4.	Limbah padat	10	66	5	34
5.	Hidrologi	10	66	5	34
6.	Pendapatan masyarakat	13	86	2	14
7.	Kenyamanan hidup	10	66	5	34
8.	Persepsi masyarakat	10	66	5	34
9.	Kesehatan masyarakat	10	66	5	34
10.	Pola lalu lintas	13	86	2	14
	Jumlah		70		30

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.51. Pelaksanaan upaya pemantauan dalam dokumen AMDAL

No	Komponen lingkungan yang dipantau	Sudah dipantau		Belum dipantau	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Kualitas udara, debu dan bau	10	66	5	34
2.	Kebisingan	10	66	5	34
3.	Kualitas air	10	66	5	34
4.	Limbah padat	10	66	5	34
5.	Hidrologi	10	66	5	34
6.	Pendapatan masyarakat	13	86	2	14
7.	Kenyamanan hidup	10	66	5	34
8.	Persepsi masyarakat	10	66	5	34
9.	Kesehatan masyarakat	10	66	5	34
10.	Pola lalu lintas	13	86	2	14
	Jumlah		70		30

Sumber: Analisis data, 2008

Adapun mengenai pelaksana upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 86 % upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan dilakukan oleh perusahaan dengan pihak terkait secara bersama-sama dan sisanya 14 % bagian lingkungan saja yang melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti tersaji dalam tabel 4.52.

Tabel 4.52. Pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan di perusahaan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Pihak perusahaan dengan bagian terkait	13	86
2.	Lainnya (bagian limbah)	2	14
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimiliki, dari hasil penelitian sebanyak 80 % kendalanya terbentur biaya yang terlalu mahal dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan 20 % tidak ada teknologi yang diterapkan, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.53.

Tabel 4.53. Kendala dalam pelaksanaan dokumen AMDAL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Biaya terlalu mahal	12	80
2.	Tidak ada teknologi yang diterapkan	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan dikarenakan adanya keluhan dari masyarakat sebanyak 80 %, sisanya sebanyak 20 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.54.

Tabel 4.54. Yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Adanya keluhan masyarakat	12	80
2.	Tidak tahu	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dari hasil penelitian mengenai *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) yang ada di Terminal Cargo, sebanyak 34 % kebijakan

tentang CSR sudah ada, sedang sisanya sebanyak 66 % tidak tahu tentang kebijakan tersebut, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.55. berikut.

Tabel 4.55. Kebijakan perusahaan tentang CSR

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Ada	5	34
2.	Tidak ada	0	0
3.	Tidak tahu	10	66
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, manfaat yang diperoleh sehubungan dengan pengelolaan lingkungan tersebut dari hasil penelitian sebanyak 80 % ada manfaatnya yaitu untuk mengetahui dampak dan agar lingkungan tetap terjaga dan 20 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.56.

Tabel 4.56. Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tahu	3	20
2.	Mengetahui dampak dan lingkungan tetap terjaga	12	80
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai format laporan pelaksanaan UKL UPL yang sudah ada, dari hasil penelitian sebanyak 80 % format yang sudah ada cukup memadai dan sisanya sebanyak 20 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel 4.57.

Tabel 4.57. Format laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan yang ada

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang memadai	0	0
2.	Cukup memadai	12	80
3.	Tidak tahu	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan oleh Terminal Cargo dan jalan tembus, dari hasil penelitian sebanyak 73 % pelaksanaan UKL UPL sudah efektif dan sisanya sebanyak 20 % pelaksanaannya kurang efektif dan sisanya 7 % belum efektif

Tabel 4.58. Pelaksanaan AMDAL di Terminal Cargo dan Jalan Tembus

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah efektif	11	73
2.	Cukup efektif	4	27
3.	Belum efektif	0	0
	Jumlah	15	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.1.5.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dalam pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan di Terminal Cargo dan jalan tembus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas/Instansi, misal Dinas Tenaga Kerja mengawasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.

4.2.2. DINAS/INSTANSI

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan AMDAL dan UKL UPL dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait antara lain Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu serta dari Kecamatan. Jumlah responden sebanyak 25 orang dari jumlah yang dianggap kompeten.

4.2.2.1. Persepsi Dinas/Instansi tentang dokumen AMDAL dan UKL UPL

Berdasarkan hasil penelitian mengenai latar belakang penyusunan dokumen AMDAL dan UKL UPL, sebanyak 64 % untuk memenuhi administrasi perijinan, sebanyak 24 % untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dan sisanya sebanyak 12 % untuk mengetahui dampak untuk melakukan pengelolaan, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.59. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen AMDAL dan UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Memenuhi administrasi perijinan	16	64
2.	Melakukan pembangunan berwawasan lingkungan	6	24
3.	Mengetahui dampak untuk melakukan pengelolaan	3	12
	Jumlah responden	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai keikutsertaan Dinas/Instansi dalam pembahasan draft dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen AMDAL maupun dokumen UKL UPL, dari hasil penelitian sebanyak 92 % ikut membahas dan menyimpan dokumen tersebut dan sisanya sebanyak 8 % ikut membahas dan tidak menyimpan dokumen tersebut, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.60. Keikutsertaan Dinas/Instansi dalam pembahasan draft Dokumen pengelolaan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Ikut membahas dan menyimpan	23	92
2.	Ikut membahas dan tidak menyimpan	2	8
	Jumlah responden	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.2.2. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Lingkungan

Mengenai cara Dinas/Instansi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 40 % dengan cara kunjungan lapangan secara rutin dan terjadwal, 40 % berdasar laporan yang ada dan sisanya 20 % secara sidak (inspeksi mendadak), sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.61. Cara Dinas/Instansi melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kunjungan lapangan secara rutin dan terjadwal	10	40
2.	Inspeksi mendadak	5	20
3.	Berdasar laporan yang ada	10	40
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai kendala Dinas/Instansi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak

60 % terbentur masalah biaya, tidak ada alokasi dana untuk melakukan pengawasan, 28 % tidak ada SDM untuk melakukan pengawasan dan sisanya 12 % karena koordinasi yang sulit, sebagaimana tersaji dala tabel berikut.

Tabel 4.62. Kendala Dinas/Instansi dalam melakukan pengawasan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kendala biaya, tidak ada dana	15	60
2.	Tidak ada SDM untuk melakukan pengawasan	7	28
3.	Kendala dalam koordinasi yang sulit	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

Dari hasil penelitian mengenai pengawasan secara bersama dengan Dinas/Instansi terkait, sebanyak 80 % pengawasan secara bersama dilakukan kalau ada masalah, 12 % pengawasan secara bersama dilakukan rutin secara berkala dan sisanya 8 % tidak pernah dilakukan pengawasan secara bersama antara Dinas/Instansi terkait, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.63. Pengawasan secara bersama dengan Dinas/Instansi terkait

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Kalau ada masalah	20	80
2.	Rutin berkala	3	12
3.	Tidak pernah	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.2.3. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi pada masing-masing perusahaan, maka kinerja yang paling bagus sesuai hasil penelitian adalah PT Djarum unit Primary Process, menyusul PT Pura Nusa Persada, Terminal Cargo dan jalan tembus, sedangkan yang mempunyai kinerja kurang bagus adalah PT Pura Power Plant dan PT Enggal Subur Kertas. Adapun uraian kinerja masing-masing perusahaan adalah PT Djarum unit Primary Process menunjukkan kinerja perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah bagus. Untuk kinerja PT Enggal Subur Kertas dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebanyak 80 % kinerjanya kurang bagus

dan sisanya sebanyak 20 % kinerja PT Enggal Subur Kertas dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah jelek. PT Pura Nusa Persada dalam kinerja pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebanyak 88 % bagus dan sisanya sebanyak 12 % kinerja PT Pura Nusa Persada dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah kurang bagus. PT Pura Barutama Unit Power Plant dalam kinerja pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebanyak 72 % bagus dan sisanya sebanyak 28 % kinerja PT Pura Barutama Unit Power Plant dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah kurang bagus. Sedangkan untuk kegiatan Terminal Cargo dan jalan tembus dalam kinerja pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebanyak 72 % bagus dan sisanya sebanyak 28 % kinerja Terminal Cargo dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah kurang bagus, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.64. Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

No	Perusahaan	Bagus		Kurang bagus		Jelek	
		Frek.	Persen	Frek.	Persen	Frek.	Persen
1.	PT Djarum unit Primary Process	25	100	0	0	0	0
2.	PT Enggal Subur Kertas	0	0	20	80	5	20
3.	PT Pura Nusa Persada	22	88	3	12	0	0
4.	PT Pura Power Plant	18	72	7	28	0	0
5.	Terminal Cargo	18	72	7	28	0	0

Sumber: Analisis data, 2008

Dari hasil penelitian mengenai penyimpangan pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan terhadap dokumen AMDAL maupun dokumen UKL UPL yang dimiliki, untuk PT Djarum unit Primary Process tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan. PT Enggal Subur Kertas sebanyak 40 % tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan sedangkan sisanya sebanyak 60 % terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan. PT Pura Nusa Persada sebanyak 88 % tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan sedangkan sisanya sebanyak 12 % kalau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan. PT Pura Unit Power Plant sebanyak 60 % tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya

pemantauan sedangkan sisanya sebanyak 40 % terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan. Sedangkan untuk kegiatan Terminal Cargo dan jalan tembus sebanyak 60 % ada penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan sedangkan sisanya sebanyak 40 % tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.65. Penyimpangan pelaksanaan UKL UPL

No	Perusahaan	Ada		Tidak ada		Tidak tahu	
		Frek.	Persen	Frek.	Persen	Frek.	Persen
1.	PT Djarum unit Primary Process	0	0	25	100	0	0
2.	PT Enggal Subur Kertas	15	60	10	40	0	0
3.	PT Pura Nusa Persada	3	12	22	88	0	0
4.	PT Pura Power Plant	10	40	15	60	0	0
5.	Terminal Cargo	10	40	15	60	0	0

Sumber: Analisis data, 2008

Dari hasil penelitian mengenai keluhan warga sehubungan dengan dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar adalah untuk PT Djarum unit Primary Process sebanyak 12 % kalau ada keluhan dari warga sekitar tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar dan sisannya sebanyak 88 % kalau tidak ada keluhan tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar. PT Enggal Subur Kertas sebanyak 60 % kalau ada keluhan dari warga sekitar tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar dan sisannya sebanyak 40 % kalau tidak ada keluhan tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar. PT Pura Nusa Persada sebanyak 28 % kalau ada keluhan dari warga sekitar tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar dan sisanya sebanyak 72 % kalau tidak ada keluhan tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar. PT Pura Unit Power Plant sebanyak 48 % kalau ada keluhan dari warga sekitar tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar dan sisannya sebanyak 52 % kalau tidak ada keluhan tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan untuk kegiatan Terminal Cargo sebanyak 48 % kalau ada keluhan dari warga sekitar tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar dan sisanya sebanyak 52 % kalau tidak ada keluhan tentang dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.66. Keluhan masyarakat sehubungan dengan dampak kegiatan

No	Perusahaan	Ada		Tidak ada		Tidak tahu	
		Frek.	Persen	Frek.	Persen	Frek.	Persen
1.	PT Djarum unit Primary Process	3	12	22	88	0	0
2.	PT Enggal Subur Kertas	15	60	10	40	0	0
3.	PT Pura Nusa Persada	7	28	18	72	0	0
4.	PT Pura Power Plant	12	48	13	52	0	0
5.	Terminal Cargo	12	48	13	52	0	0

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen AMDAL atau UKL UPL tersebut maka dapat diketahui efektivitas pelaksanaannya untuk masing - masing perusahaan, dari hasil penelitian PT Djarum unit Primary Process sebanyak 96 % pelaksanaan UKL UPL dalam perusahaan tersebut sudah efektif dan sisanya 4 % cukup efektif. PT Enggal Subur Kertas 48 % pelaksanaan UKL UPL dalam perusahaan tersebut cukup efektif dan sisanya 52 % pelaksanaan UKL UPL belum efektif. PT Pura Nusa Persada 88 % pelaksanaan UKL UPL dalam perusahaan tersebut sudah efektif dan sisanya 12 % pelaksanaan UKL UPL cukup efektif. PT Pura Unit Power Plant, pelaksanaan dokumen AMDAL atau UKL UPL 60 % pelaksanaan UKL UPL dalam perusahaan tersebut sudah efektif dan sisanya 32 % pelaksanaan UKL UPL cukup efektif dan 8 % belum efektif. Sedangkan untuk kegiatan Terminal Cargo sebanyak 72 % pelaksanaan RKL RPL dalam perusahaan tersebut sudah efektif , 16 % cukup efektif dan sisanya 8 % pelaksanaan dokumen RKL RPL yang dimiliki kurang efektif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.67. Efektivitas pelaksanaan UKL UPL

No	Perusahaan	Sudah efektif		Cukup efektif		Belum efektif	
		Frek.	Persen	Frek.	Persen	Frek.	Persen
1.	PT Djarum unit Primary Process	24	96	1	4	0	0
2.	PT Enggal Subur Kertas	0	0	12	48	13	52
3.	PT Pura Nusa Persada	22	88	3	12	0	0
4.	PT Pura Power Plant	15	60	8	32	2	8
5.	Terminal Cargo	18	72	4	16	3	12

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.3. MASYARAKAT SEKITAR

Penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam AMDAL dan UKL dilaksanakan di beberapa desa yang terletak di sekitar lokasi usaha/kegiatan. Kelima lokasi tersebut adalah :

1. Desa Bakalan Krapyak RT 1 RW 2 kecamatan Kaliwungu dan Desa Gribig RT 1 RW 1 kecamatan Gebog disekitar lokasi PT Djarum unit Primary Process
 2. Desa Terban RT 5 RW 7 kecamatan Jekulo di sekitar lokasi PT Enggal Subur Kertas dan PT Pura Nusa Persada
 3. Desa Jati Wetan RT 5 RW 1 dan Desa Jati Kulon RT 5 RW 4 Kecamatan Jati disekitar lokasi PT Pura unit Power Plant
 4. Desa Jati Wetan RT 5 RW 3 kecamatan Jati di sekitar lokasi Terminal Cargo.
- Jumlah responden yang ada sebanyak 60 orang dari jumlah penduduk beberapa lokasi yang terletak di sekitar lokasi pabrik.

4.2.3.1. Pengetahuan masyarakat tentang AMDAL dan UKL UPL

Mengenai pengetahuan masyarakat tentang AMDAL atau UKL UPL, dari hasil penelitian sebanyak 48 % masyarakat tidak tahu, 25 % masyarakat tahu sebagian dan sisanya 26 % masyarakat pernah mendengar seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.68. Pengetahuan Masyarakat Tentang AMDAL dan UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tahu	30	50
2.	Tahu sebagian	15	25
3.	Pernah dengar	15	25
	Jumlah	60	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pabrik, yaitu sebanyak 58 % masyarakat mengetahui tentang pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan

oleh perusahaan, 17 % masyarakat tidak tahu dan sisanya 25 % masyarakat pernah dengar sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.69. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Ya, tahu	35	58
2.	Tidak tahu	10	17
3.	Pernah dengar	15	25
	Jumlah	60	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai tujuan penyusunan studi pengelolaan lingkungan dibuat dan dilaksanakan, dari hasil penelitian sebanyak 67 % studi UKL UPL tersebut dibuat dan dilaksanakan untuk pihak pemrakarsa dan pemilik pabrik, 13 % untuk semua pihak dan sisanya 20 % tidak tahu.

Tabel 4.70. Tujuan penyusunan studi pengelolaan lingkungan dibuat dan dilaksanakan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Pemrakarsa/pemilik pabrik	40	67
2.	Semua pihak	8	13
3.	Tidak tahu	12	20
	Jumlah	60	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.3.2. Keterlibatan masyarakat dalam AMDAL dan UKL UPL

Berdasarkan hasil penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan AMDAL dan UKL UPL, sebanyak 66 % bahwa keterlibatan masyarakat tersebut ada pada tahap awal kegiatan, 17 % tidak ada keterlibatan masyarakat dan sisanya 17 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.71. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan AMDAL dan UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Ada, pada tahap penyusunan dan pembahasan dokumen	40	66
2.	Tidak ada	10	17
3.	Tidak tahu	10	17
	Jumlah	60	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai perlunya masyarakat mengetahui AMDAL atau UKL UPL, yaitu sebanyak 75 % masyarakat perlu mengetahui AMDAL atau UKL UPL tersebut, 12 % tidak perlu mengetahui AMDAL atau UKL UPL dan sisanya 13 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.72. Perlukah masyarakat mengetahui AMDAL dan UKL UPL

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Perlu	45	75
2.	Tidak perlu	7	12
3.	Tidak tahu	8	13
	Jumlah	60	100

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebanyak 59 % ada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 25 % tidak ada keterlibatan dan sisanya 16 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.73. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Dilibatkan, dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan	35	59
2.	Tidak dilibatkan	15	25
3.	Tidak tahu	10	16
	Jumlah	60	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai hambatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dari hasil penelitian sebanyak 72 % tidak ada hambatan, 17 % ada hambatan dan sisanya 11 % tidak tahu, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.74. Hambatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Ada hambatan dlm pelaksanaan pengelolaan lingk	10	17
2.	Tidak ada	43	72
3.	Tidak tahu	7	11
	Jumlah	60	100

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai peranan Dinas/Instansi dalam melakukan pengawasan, dari hasil penelitian sebanyak 75 % cukup memadai, 12 % kurang memadai dan 13 % tidak tahu.

Tabel 4.75. Peranan Instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan

No	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase
1.	Cukup memadai	45	75
2.	Kurang memadai	7	12
3.	Tidak tahu	8	13
	Jumlah	60	100

Sumber: Analisis data, 2008

4.2.3.3. Dampak Kegiatan Perusahaan Terhadap Masyarakat

Dari hasil penelitian, dengan adanya pabrik di sekitar lingkungan masyarakat akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Di sekitar PT Djarum unit Primary Process, dampak yang dirasakan masyarakat sekitar terhadap penurunan kualitas udara, debu dan bau sebanyak 25 % ada dampak dan 75 % tidak ada dampak. Gangguan terhadap kebisingan, sebanyak 25 % ada dampak dan 75 % tidak ada dampak. Kualitas air sungai, sebanyak 25 % ada dampak dan 75 % tidak ada dampak. Kualitas sumur penduduk, sebanyak 25 % ada dampak dan sisanya 75 % tidak ada dampak. Kenyamanan hidup, sebanyak 15 % ada dampak dan sisanya 85 % tidak ada dampak. Kesehatan masyarakat, sebanyak 15 % ada dampak dan sisanya 85 % tidak ada dampak. Penyerapan tenaga kerja, sebanyak 75 % ada dampak dan sisanya 25 % tidak ada dampak. Persepsi masyarakat, sebanyak 80 % positif dan sisanya 20 % negatif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. 76. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT Djarum unit Primary Process

No	Komponen lingkungan	Bentuk gangguan	Frekuensi	Persentase
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	- ada	5	25
		- tidak ada	15	75
2.	kebisingan	- ada	5	25
		- tidak ada	15	75
3.	Kualitas air sungai	- ada	5	25
		- tidak ada	15	75
4.	Kualitas sumur penduduk	- ada	5	25
		- tidak ada	15	75
5.	Kenyamanan hidup	- ada	3	15
		- tidak ada	17	85
6.	Kesehatan masyarakat	- ada	3	15
		- tidak ada	17	85
7.	Penyerapan tenaga kerja	- ada	15	75
		- tidak ada	5	25
8.	Kesempatan berusaha	- ada	15	75
		- tidak ada	5	25
9.	Persepsi masyarakat	- positif	16	80
		- negatif	4	20

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian di sekitar PT Enggal Subur Kertas, dampak yang dirasakan masyarakat sekitar terhadap penurunan kualitas udara, debu dan bau sebanyak 80 % ada dampak dan 20 % tidak ada dampak. Gangguan terhadap kebisingan, sebanyak 80 % ada dampak dan 20 % tidak ada dampak. Kualitas air sungai, sebanyak 80 % ada dampak dan 20 % tidak ada dampak. Kualitas sumur penduduk, sebanyak 70 % ada dampak dan sisanya 30 % tidak ada dampak. Kenyamanan hidup, sebanyak 70 % ada dampak dan sisanya 30 % tidak ada dampak. Kesehatan masyarakat, sebanyak 50 % ada dampak dan sisanya 50 % tidak ada dampak. Penyerapan tenaga kerja, sebanyak 40 % banyak menyerap tenaga kerja dan sisanya 60 % agak banyak menyerap tenaga kerja. Persepsi masyarakat, sebanyak 40 % positif dan sisanya 60 % negatif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.77. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT Enggal Subur Kertas

No	Komponen lingkungan	Bentuk gangguan	Frekuensi	Persentase
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	- ada	8	80
		- tidak ada	2	20
2.	kebisingan	- ada	8	80
		- tidak ada	2	20
3.	Kualitas air sungai	- ada	8	80
		- tidak ada	2	20
4.	Kualitas sumur penduduk	- ada	7	70
		- tidak ada	3	30
5.	Kenyamanan hidup	- ada	7	70
		- tidak ada	3	30
6.	Kesehatan masyarakat	- ada	5	50
		- tidak ada	5	50
7.	Penyerapan tenaga kerja	- ada	4	40
		- tidak ada	6	60
8.	Kesempatan berusaha	- ada	3	30
		- tidak ada	7	70
9.	Persepsi masyarakat	- positif	4	40
		- negatif	6	60

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian di sekitar PT Pura Nusa Persada, dampak yang dirasakan masyarakat sekitar terhadap penurunan kualitas udara, debu dan bau sebanyak 50 % ada dampak dan 50 % tidak ada dampak. Gangguan terhadap kebisingan, sebanyak 60 % ada dampak dan 40 % tidak ada dampak. Kualitas air sungai, sebanyak 60 % ada dampak dan 40 % tidak ada dampak. Kualitas sumur penduduk, sebanyak 70 % ada dampak dan sisanya 30 % tidak ada dampak. Kenyamanan hidup, sebanyak 50 % ada dampak dan sisanya 50 % tidak ada dampak. Kesehatan masyarakat, sebanyak 40 % ada dampak dan sisanya 60 % tidak ada dampak. Penyerapan tenaga kerja, sebanyak 60 % ada dampak dan sisanya 40 % tidak ada dampak. Kesempatan berusaha, sebanyak 60 % ada dampak dan sisanya 40 % tidak ada dampak. Persepsi masyarakat, sebanyak 70 % positif dan sisanya 30 % responden negatif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.78. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar
PT Pura Nusa Persada

No	Komponen lingkungan	Bentuk gangguan	Frekuensi	Persentase
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	- ada	5	50
		- tidak ada	5	50
2.	kebisingan	- ada	4	40
		- tidak ada	6	60
3.	Kualitas air sungai	- ada	6	60
		- tidak ada	4	40
4.	Kualitas sumur penduduk	- ada	7	70
		- tidak ada	3	30
5.	Kenyamanan hidup	- ada	5	50
		- tidak ada	5	50
6.	Kesehatan masyarakat	- ada	4	40
		- tidak ada	6	60
7.	Penyerapan tenaga kerja	- ada	6	60
		- tidak ada	4	40
8.	Kesempatan berusaha	- ada	6	60
		- tidak ada	4	40
9.	Persepsi masyarakat	- positif	7	70
		- negatif	3	30

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian di sekitar PT Pura Unit Power Plant, dampak yang dirasakan masyarakat sekitar terhadap penurunan kualitas udara, debu dan bau, berdasar penelitian 80 % ada dampak dan 20 % tidak ada dampak. Gangguan terhadap kebisingan, sebanyak 80 % ada dampak dan 20 % tidak ada dampak. Kualitas air sungai, sebanyak 50 % ada dampak dan 50 % tidak ada dampak. Kualitas sumur penduduk, sebanyak 80 % ada dampak dan sisanya 20 % tidak ada dampak. Kenyamanan hidup, sebanyak 70 % ada dampak dan sisanya 30 % tidak ada dampak. Kesehatan masyarakat, sebanyak 60 % ada dampak dan sisanya 40 % tidak ada dampak. Penyerapan tenaga kerja, sebanyak 60 % ada dampak dan sisanya 40 % tidak ada dampak. Kesempatan berusaha sebanyak 50 % ada dampak dan 50 % tidak ada dampak. Persepsi masyarakat, sebanyak 50 % persepsinya positif dan sisanya 50 % negatif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.79. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT Pura Unit Power Plant

No	Komponen lingkungan	Bentuk gangguan	Frekuensi	Persentase
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	- ada	16	80
		- tidak ada	4	20
2.	kebisingan	- ada	16	80
		- tidak ada	4	20
3.	Kualitas air sungai	- ada	10	50
		- tidak ada	10	50
4.	Kualitas, kuantitas sumur penduduk	- ada	16	80
		- tidak ada	4	20
5.	Kenyamanan hidup	- ada	14	70
		- tidak ada	6	30
6.	Kesehatan masyarakat	- ada	12	60
		- tidak ada	8	40
7.	Penyerapan tenaga kerja	- ada	12	60
		- tidak ada	8	40
8.	Kesempatan berusaha	- ada	10	50
		- tidak ada	10	50
9.	Persepsi masyarakat	- positif	10	50
		- negatif	10	50

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian di sekitar Terminal Cargo dan jalan tembus, dampak yang dirasakan masyarakat sekitar terhadap penurunan kualitas udara sebanyak 80 % ada dampak dan 20 % tidak ada dampak. Gangguan terhadap kebisingan, sebanyak 80 % ada dampak dan 20 % tidak ada dampak. Kualitas air sungai, sebanyak 50 % ada dampak dan 50 % tidak ada dampak. Kualitas dan kuantitas sumur penduduk, sebanyak 80 % ada dampak dan sisanya 20 % tidak ada dampak. Kenyamanan hidup, sebanyak 70 % ada dampak dan sisanya 30 % tidak ada dampak. Kesehatan masyarakat, sebanyak 60 % ada dampak dan sisanya 40 % tidak ada dampak. Penyerapan tenaga kerja, sebanyak 60 % ada dampak dan 40 % tidak ada dampak. Kesempatan berusaha sebanyak 50 % ada dampak dan 50 % tidak ada dampak. Persepsi masyarakat, sebanyak 50 % persepsi positif dan sisanya 50 % persepsi negatif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.80. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar Terminal Cargo dan jalan tembus

No	Komponen lingkungan	Bentuk gangguan	Frekuensi	Persentase
1.	Penurunan kualitas udara,debu,bau	- ada	8	80
		- tidak ada	2	20
2.	kebisingan	- ada	8	80
		- tidak ada	2	20
3.	Kualitas air sungai	- ada	5	50
		- tidak ada	5	50
4.	Kualitas, kuantitas sumur penduduk	- ada	8	80
		- tidak ada	2	20
5.	Kenyamanan hidup	- ada	7	70
		- tidak ada	3	30
6.	Kesehatan masyarakat	- ada	5	50
		- tidak ada	5	50
7.	Penyerapan tenaga kerja	- ada	6	60
		- tidak ada	4	40
8.	Kesempatan berusaha	- ada	6	60
		- tidak ada	4	40
9.	Persepsi masyarakat	- positif	4	40
		- negatif	6	60

Sumber: Analisis data, 2008

Mengenai pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, dari hasil penelitian diketahui bahwa PT Djarum unit Primary Process, untuk semua komponen, 96,6 % telah melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan. PT Enggal Subur Kertas, telah melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan 56,6 %. PT Pura Nusa Persada telah melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan 81,1 %. PT Pura Barutama Unit Power Plant telah melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan sekitar 68,8 %. Untuk kegiatan Terminal Cargo dan jalan tembus telah melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan 68,8 %, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.81. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Djarum unit Primary Process

No.	Komponen lingkungan	Ya		Tidak	
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	20	100	0	0
2.	Kebisingan	20	100	0	0
3.	Kualitas air sungai	18	90	2	10
4.	Kualitas sumur penduduk	18	90	2	10
5.	Kenyamanan hidup	18	90	2	10
6.	Kesehatan masyarakat	20	100	0	0
7.	Penyerapan tenaga kerja	20	100	0	0
8.	Kesempatan berusaha	20	100	0	0
9.	Persepsi masyarakat	20	100	0	0
	Jumlah		96,6		3,4

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.82. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Enggal Subur Kertas

No.	Komponen lingkungan	Ya		Tidak	
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	5	50	5	50
2.	Kebisingan	5	50	5	50
3.	Kualitas air sungai	5	50	5	50
4.	Kualitas sumur penduduk	7	70	3	30
5.	Kenyamanan hidup	6	60	4	40
6.	Kesehatan masyarakat	5	50	5	50
7.	Penyerapan tenaga kerja	6	60	4	40
8.	Kesempatan berusaha	6	60	4	40
9.	Persepsi masyarakat	6	60	4	40
	Jumlah		56,66		43,44

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.83. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Pura Nusa Persada

No.	Komponen lingkungan	Ya		Tidak	
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	9	90	1	10
2.	Kebisingan	9	90	1	10
3.	Kualitas air sungai	9	90	9	10
4.	Kualitas sumur penduduk	8	80	2	20
5.	Kenyamanan hidup	7	70	3	30
6.	Kesehatan masyarakat	8	80	2	20
7.	Penyerapan tenaga kerja	7	70	3	30
8.	Kesempatan berusaha	7	70	3	30
9.	Persepsi masyarakat	9	90	1	10
	Jumlah		81,1		18,9

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.84. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Pura Unit Power Plant

No.	Komponen lingkungan	Ya		Tidak	
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	14	70	6	30
2.	Kebisingan	14	70	6	30
3.	Kualitas air sungai	14	70	6	30
4.	Kualitas sumur penduduk	14	70	6	30
5.	Kenyamanan hidup	14	70	8	40
6.	Kesehatan masyarakat	12	60	8	40
7.	Penyerapan tenaga kerja	14	70	6	30
8.	Kesempatan berusaha	14	70	6	30
9.	Persepsi masyarakat	14	70	6	30
	Jumlah		68,8		31,2

Sumber: Analisis data, 2008

Tabel 4.85. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan Terminal Cargo

No.	Komponen lingkungan	Ya		Tidak	
1.	Penurunan kualitas udara, debu, bau	7	70	3	30
2.	Kebisingan	7	70	3	30
3.	Kualitas air sungai	7	70	3	30
4.	Kualitas sumur penduduk	5	50	5	50
6.	Kenyamanan hidup	6	60	4	40
7.	Kesehatan masyarakat	8	80	2	20
8.	Penyerapan tenaga kerja	7	70	3	30
9.	Kesempatan berusaha	8	80	2	20
10.	Persepsi masyarakat	7	70	3	30
	Jumlah		68,8		31,2

Sumber: Analisis data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, diketahui bahwa PT Djarum unit Primary Process, 90 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan sudah efektif dan sisanya 10 % kurang efektif. PT Enggal Subur Kertas, 40 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan kurang efektif dan sisanya 60 % belum efektif. PT Pura Nusa Persada, 80 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan sudah efektif dan sisanya 20 % kurang efektif. PT Pura Barutama Unit Power Plant, 50 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan sudah efektif dan sisanya 40 % kurang efektif dan 10 % belum efektif. Kegiatan Terminal Cargo dan jalan tembus, 70 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan sudah efektif, 20 % kurang efektif, dan sisanya 10 % belum efektif, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.86. Efektivitas pelaksanaan AMDAL UKL UPL

No	Perusahaan	Sudah efektif		Cukup efektif		Belum efektif	
		Frek.	Persen	Frek.	Persen	Frek.	Persen
1.	PT Djarum Primary	18	90	2	10	0	0
2.	PT Enggal Subur Kertas	0	0	4	40	6	60
3.	PT Pura Nusa Persada	8	80	2	20	0	0
4.	PT Pura Unit Power Plant	10	50	6	30	4	20
5.	Terminal Cargo	6	60	2	20	2	20

4.3. EVALUASI PELAKSANAAN AMDAL DAN UKL UPL

4.3.1. Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di PT Djarum unit Primary Process

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.87. Evaluasi Pelaksanaan UKL UPL PT Djarum unit Primary Process

NO	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PELAKSANAAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Kualitas udara, debu dan bau	√		Sesuai
2	Kebisingan	√		Sesuai
3	Kualitas air	√		Sesuai
4	Limbah padat (B3 dan Non B3)	√		Sesuai
5	Pendapatan masyarakat	√		Sesuai
6	Kenyamanan hidup	√		Sesuai
7	Persepsi masyarakat	√		Sesuai
8	Kesehatan masyarakat	√		Sesuai
9	Pola lalu lintas	√		Sesuai

Sumber: Analisis data, 2008

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dampak pada kualitas udara, debu dan bau

Berdasarkan kajian pelaksanaan dokumen terhadap komponen kualitas udara dan debu adalah sebagai berikut:

- Partikel debu dan limbah gas telah memenuhi baku mutu sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 10 tahun 2000 tentang baku

mutu udara emisi sumber tidak bergerak tingkat propinsi Jawa Tengah. dengan melakukan pemantauan setiap 3 bulan sekali dengan lokasi pemantauan pada stack/cerobong (emisi) boiler dan diesel pada 3 titik sampling sekitar pabrik/ambien

- Baku mutu untuk parameter H²S sesuai Kep Men LH nomor 50 tahun 1996 tentang baku mutu tingkat kebauan dan telah dipantau setiap 3 bulan sekali.
 - Upaya pengelolaan yang dilakukan sudah sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan
2. Pengelolaan dampak pada kebisingan
- sudah dilakukan pengendalian kebisingan dengan penggunaan alat pelindung diri dan pengaturan jam kerja serta dilengkapi dengan ruang operator yang terpisah dengan ruang mesin boiler dan diesel
 - Hasil pengujian terhadap kebisingan sudah sesuai dengan baku mutu yaitu mengacu pada Kep Men LH nomor 48 tahun 1996 tentang baku mutu kebisingan dan dipantau setiap 3 bulan sekali.
3. Pengelolaan dampak pada kualitas air
- Telah melakukan pengujian terhadap kualitas air dengan beberapa parameter sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah. Pemantauan secara swapantau dilakukan setiap sebulan dan pemantauan secara sidak dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh laboratorium yang telah terakreditasi.
4. Pengelolaan dampak pada limbah padat (B3 dan non B3)
- a. Limbah padat non B3
- Limbah domestik rumah tangga dikirim ketempat penampungan akhir bekerjasama dengan TPA Pemda
 - Pemantauan terhadap limbah padat non B3 tersebut dipantau setiap hari sehingga tidak ada sampah yang menumpuk

b. Limbah B3

Dilakukan pengelolaan limbah B3 dengan cara:

- Limbah B3 berasal dari oli bekas. Limbah tersebut ditampung ditempat penampungan sementara limbah B3 yang sudah memperoleh ijin dari KLH untuk selanjutnya dikirim ke pihak ketiga yang sudah berijin
 - Dilakukan pemantauan dan pelaporan neraca limbah B3 dan manifest limbah B3, agar waktu penyimpanan limbah B3 tidak lebih dari 90 hari. Perusahaan sudah mengacu pada PP no 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun. Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali
5. Pengelolaan dampak pada sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat
- Pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan komponen sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat lebih mengarah pada program CSR (*corporate sosial responsibility*). CSR ini tidak hanya sekedar kegiatan yang biasanya marak pada saat menjelang hari raya keagamaan, tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat terutama masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Program CSR dapat menjadi point tersendiri bagi pemrakarsa.. PT Djarum unit Primary Process merupakan salah satu perusahaan di Kabupaten Kudus yang sangat bagus dalam penerapan program CSR tersebut.

Program-program yang sudah dilakukan oleh PT Djarum antara lain:

- Bantuan air bersih untuk tetanggan, musholla dan pasar dekat pabrik
- Pemberian bantuan sumbangan kematian kepada tetangga pabrik berupa rokok dan uang
- Pemberian sumbangan sosial ke mushola dan masjid didesa Gribig dan desa Bakalan Krapyak setiap bulan
- Peminjaman mobil ambulance untuk antar tetangga yang sakit kerumah sakit (yang dekat pabrik)
- Partisipasi acara Haul setiap tahun sekali didesa Gribig dan Bakalan Krapyak

- Bantuan dana rutin setiap tahun untuk bersih-bersih irigasi (paguyuban darma tirta) Krapyak
- Pembinaan olahraga bola volley desa Gribig dan Bakalan Krapyak
- Bakti pendidikan berupa kelas les dan wisata pendidikan untuk tingkat pendidikan SD dan SMP di lingkungan Bakalan Krapyak dan Gribig
- Pembinaan tokoh masyarakat sekitar perusahaan dalam hal keagamaan dan sosial budaya
- Bantuan emergency jika terjadi kebakaran dilingkungan perusahaan didesa Gribig dan Bakalan Krapyak

4.3.2. Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di PT Enggal Subur Kertas

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara umum telah dilaksanakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.88. Evaluasi Pelaksanaan UKL UPL PT Enggal Subur Kertas

NO	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PELAKSANAAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Kualitas udara dan debu	√		Belum Sesuai
2	Kebisingan	√		Belum Sesuai
3	Kualitas dan kuantitas air	√		Belum Sesuai
4	Limbah padat (B3 dan Non B3)		√	Tidak Sesuai
5	Pendapatan masyarakat	√		Sesuai
6	Kenyamanan hidup	√		Sesuai
7	Persepsi masyarakat	√		Sesuai
8	Kesehatan masyarakat	√		Sesuai
9	Pola lalu lintas	√		Sesuai

Sumber: Analisis data, 2008

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan debu

Berdasarkan kajian pelaksanaan dokumen terhadap komponen kualitas udara dan debu adalah sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap partikel debu dan limbah gas telah memenuhi baku mutu sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 10 tahun 2000 tentang baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak tingkat propinsi Jawa Tengah. dengan melakukan pemantauan setiap 6 bulan sekali dengan lokasi pemantauan pada stack/cerobong (emisi) boiler, padahal dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 10 tahun 2000 untuk pengujian seharusnya dilakukan setiap 3 bulan sekali.
 - PT Enggal Subur Kertas telah melakukan sebagian upaya pengelolaan lingkungan untuk mengatasi masalah penurunan kualitas udara dan debu namun hasil dimasyarakat menyebutkan bahwa terjadi pencemaran udara dan debu yang berasal dari PT Enggal Subur Kertas. Untuk pemasangan cerobong masih kurang tinggi dan dust collector tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Program penghijauan yang direncanakan dengan jenis pohon yang dapat berfungsi menangkap debu belum ditemukan di PT Enggal Subur Kertas. Lahan kosong sekeliling pabrik belum dimanfaatkan secara maksimal untuk program penghijauan tersebut.
2. Pengelolaan dampak pada kebisingan
- Belum dilakukan pengendalian kebisingan dengan penggunaan alat pelindung diri dan belum dilengkapi dengan ruang operator yang terpisah dengan ruang mesin boiler dan diesel
 - Hasil pengujian terhadap kebisingan sudah sesuai dengan baku mutu yaitu mengacu pada Kep Men LH nomor 48 tahun 1996 tentang baku mutu kebisingan melebihi baku mutu dengan metode pemantauan secara visual
3. Pengelolaan dampak pada kualitas dan kuantitas air
- Kualitas air
- Telah melakukan pengujian terhadap kualitas air dengan beberapa parameter sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah. Pemantauan secara swapantau dilakukan setiap sebulan sekali dan pemantauan secara sidak dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh laboratorium yang telah terakreditasi.

- Hasil pengujian terhadap kualitas air limbah memenuhi baku mutu, tapi kenyataan dilapangan sungai yang ada di sekitar lokasi pabrik tercemar. Kewajiban pelaksanaan pemantauan terhadap kualitas lingkungan perairan baik badan air penerima maupun kualitas air sumur setiap 6 bulan sekali belum dilaksanakan oleh industri yang disebabkan kurangnya kesadaran industri untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan sekitarnya yang bersumber dari kegiatan industri. Masih ada anggapan dari pihak industri bahwa apabila kualitas air limbah telah memenuhi baku mutu tidak akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.

Kuantitas air

- Untuk kuantitas air berhubungan dengan ijin pemboran air bawah tanah, upaya pengelolaan belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan yaitu pemanfaatan air sisa proses, efisiensi penggunaan air dan penanaman pohon penghijauan
4. Pengelolaan dampak pada limbah padat (B3 dan non B3)

Limbah padat non B3

- Limbah padat yang berupa kertas medium dan reject hasil mesin produksi, penanganannya diolah kembali sebagai bahan baku kertas
- Limbah padat yang berupa kertas dan plastik dari unit stok preparation/hydra pulper, penanganannya dibuang ke TPA
- Pemantauan terhadap keberadaan limbah padat tersebut setiap hari dilakukan pengamatan secara visual

Limbah B3

- Limbah B3 berasal dari oli bekas maupun sisa dari boiler yang berupa fly ash dan bottom ash. Keduanya belum mempunyai tempat penyimpanan sementara limbah B3. Menurut PP no 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, industri diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan limbah padat kategori B3 dengan melakukan penimbunan sementara maksimal selama 90 hari. Setelah 90 hari limbah padat tersebut harus dikelola oleh instansi yang telah diberi kewenangan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mengelola limbah B3,

dalam hal ini PPLI. Kendala yang dihadapi industri untuk melaksanakan pengelolaan limbah padat kategori B3 ke PPLI adalah biaya yang mahal.

5. Pengelolaan dampak pada sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan pada komponen sosekbudkesmas antara lain adalah adanya bina lingkungan terhadap masyarakat sekitar, antara lain:

- Bantuan air bersih untuk tetangga sekitar yang dekat dengan lokasi pabrik dengan dibuatkan sumur
- Partisipasi setahun sekali dalam peringatan hari kemerdekaan RI di desa Terban
- Bina lingkungan dengan pemberian bingkisan lebaran bagi warga yang dekat dengan lokasi

4.3.3. Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di PT Pura Nusa Persada

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh industri, pelaksanaan pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Pura Nusa Persada telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan rumusan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.89. Evaluasi Pelaksanaan UKL UPL PT Pura Nusa Persada

NO	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PELAKSANAAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1.	Kualitas udara dan debu	√		Sesuai
2.	Kebisingan	√		Sesuai
3.	Kualitas dan kuantitas air	√		Sesuai
4.	Limbah padat (B3 Non B3)	√		Sesuai
6.	Pendapatan masyarakat	√		Sesuai
7.	Kenyamanan hidup	√		Sesuai
8.	Persepsi masyarakat	√		Sesuai
9.	Kesehatan masyarakat	√		Sesuai

Sumber: Analisis data, 2008

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan debu

PT. Pura Nusa Persada dalam pelaksanaan dokumen UKL UPL sudah dilakukan sesuai dengan dokumen UKL/UPL yaitu dengan Upaya pengelolaan yang dilakukan terhadap penurunan kualitas udara dan debu selama operasional, meliputi pengaturan kecepatan peralatan berat dan transportasi, pengaturan waktu kegiatan, pemberi rambu-rambu lalu lintas jalan. Pada pengelolaan gas buang SO₂ upaya cadangan dicampurkan Limestone di dalam bahan bakar batu bara untuk menangkap SO₂ yang terbentuk gypsum yang akan keluar .

Sebagai upaya untuk mencegah terbentuknya NO_x maka pada saat proses pembakaran di Boiler suhu dijaga supaya tidak melebihi 1200 °C. Demikian pula dengan hasil pembakaran yang berpotensi menimbulkan polutan berupa partikel-partikel padat (debu), maka untuk meminimalkan partikel padat tersebut perlu pengelolaan dengan pengoperasian dust collector selama operasional Boiler. Hal ini juga diikuti dengan perawatan berkala untuk menjaga kinerjanya, serta pemasangan ventilasi pada tempat operasional Boiler dan pemakaian masker pada operator Boiler, penanaman penghijauan di lokasi perusahaan dan program langit biru untuk memantau kualitas emisi yang dihasilkan dari cerobong Boiler. Pemantauan terhadap kualitas udara dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan program langit biru untuk emisi pembakaran batu bara, sedangkan untuk emisi incinerator (pembakaran sludge dan bottom ash) setiap 3 bulan sekali. Dari hasil penelitian dan kenyataan dilapangan bahwa PT PNP telah melaksanakan UKL/UPL untuk kualitas udara dan debu sesuai dengan dokumen yang ada.

2. Pengelolaan dampak pada kebisingan

Pelaksanaan UKL/UPL PT. PNP tentang kebisingan sudah dilakukan sesuai dengan dokumen yang ada, meliputi pengaturan kecepatan peralatan transportasi, pengaturan waktu kegiatan, pemberian rambu-rambu, penanaman tanaman di sekitar lokasi kegiatan, pembuatan bak peredam pada vacuum pump, penggunaan earplug pada karyawan untuk mengurangi kebisingan,

pengecekan rutin komponen peralatan, serta pembuatan pagar pembatas (tembok) yang tinggi di sekeliling perusahaan yang berfungsi sebagai peredam.

Pemantauan kebisingan dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan program langit biru.

3. Pengelolaan dampak pada kualitas dan kuantitas air

a. Kualitas air

- Air buangan / waste water dari proses pemasakan di Stock Preparation dan cleaning di mesin ditampung dalam bak dan dimanfaatkan untuk proses kembali sisanya baru masuk ke Krofta / Dissolved Air Flotation (DAF) yang berfungsi memisahkan air dengan serat kertas. Hasil serat kertas dimanfaatkan kembali diproses produksi begitu juga dengan sebagian air hasil proses, sisanya baru diolah di Unit Pengolahan Limbah (UPL) ditreatment supaya sesuai dengan baku mutu limbah cair. Hasil tangkapan partikulat dust collector dialirkan ke bak sedimentasi untuk mempercepat pengendapan, air terpisah keluar dari bak dan digunakan untuk dust collector kembali.
- Telah melakukan pengujian terhadap kualitas air dengan beberapa parameter sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah. Pemantauan secara swapantau dilakukan setiap sebulan sekali dan pemantauan secara sidak dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh laboratorium yang telah terakreditasi.

b. Kuantitas air

- Untuk kuantitas air berhubungan dengan ijin pemboran air bawah tanah dan konsekuensi PT Pura Nusa Persada dalam ikut memelihara kelestarian sumber mata air baik dengan cara menanam penghijauan maupun membuat sumur resapan. Untuk penanaman penghijauan disekeliling lokasi pabrik sudah menjadi komitmen demikian juga PT Pura Nusa Persada sudah membuat sumur resapan sebagai penyimpan air hujan.

4. Pengelolaan dampak pada limbah padat (B3 dan non B3)

a. Limbah padat non B3

- Limbah domestik rumah tangga dikirim ketempat penampungan akhir bekerjasama dengan TPA Pemda
- Pemantauan terhadap limbah padat non B3 tersebut dipantau setiap hari sehingga tidak ada sampah yang menumpuk

b. Limbah B3

Dilakukan pengelolaan limbah B3 dengan cara:

- Limbah B3 berasal dari oli bekas. Limbah tersebut ditampung ditempat penampungan sementara limbah B3 yang sudah memperoleh ijin dari KLH untuk selanjutnya dikirim ke pihak ketiga yang sudah berijin
- dilakukan pemantauan dan pelaporan neraca limbah B3 dan manifest limbah B3, agar waktu penyimpanan limbah B3 tidak lebih dari 90 hari. Perusahaan sudah mengacu pada PP no 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun.
- Limbah padat B3 berasal dari debu hasil pembakaran berupa fly ash dikirim ke Pura Barutama Unit Power Plant sebagai campuran pembuatan batu bata merah & paving block sedangkan bottom ash dari proses boiler chain grate (cadangan) difeedingkan kembali ke Boiler FBC. Untuk sludge hasil pengelolaan limbah dari UPL dibakar di boiler untuk menghasilkan steam. Pemanfaatan limbah B3 tersebut sudah mendapat ijin dari Kementerian LH.

5. Pengelolaan dampak pada sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Bantuan air bersih untuk tetangga sekitar
- Bina lingkungan dengan pemberian bingkisan lebaran kepada masyarakat sekitar, membolehkan warga sekitar sebagai pemasok afval
- Ikut berpartisipasi dalam kegiatan dan pembangunan desa
- Ikut berpartisipasi bersama perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus untuk melestarikan kawasan muria

4.3.4. Evaluasi pelaksanaan UKL UPL di PT Pura Barutama Unit Power Plant

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara umum telah dilaksanakan oleh perusahaan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.90. Evaluasi Pelaksanaan UKL UPL PT Pura Power Plant

NO	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PELAKSANAAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Kualitas udara dan debu	√		Belum Sesuai
2	Kebisingan	√		Belum Sesuai
3	Kualitas dan kuantitas air	√		Sesuai
4	Limbah padat (B3 dan Non B3)	√		Sesuai
5	Pendapatan masyarakat	√		Sesuai
6	Kenyamanan hidup	√		Sesuai
7	Persepsi masyarakat	√		Belum Sesuai
8	Kesehatan masyarakat	√		Sesuai

Sumber: Analisis data, 2008

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan debu

Berdasarkan kajian pelaksanaan dokumen terhadap komponen kualitas udara dan debu adalah sebagai berikut:

- Sisa hasil pembakaran batu bara dan sekam dari pengoperasian boiler dibuang melalui 2 buah cerobong dengan ketinggian 45 m dari permukaan tanah dengan diameter 4 m dibagian bawah dan 2 m dibagian atas. Untuk menangkap partikulat debu tersebut sudah dilengkapi dengan EP (electrostatic precipitator).
- Partikel debu dan limbah gas telah memenuhi baku mutu sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 10 tahun 2000 tentang baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak tingkat propinsi Jawa Tengah. dengan melakukan pemantauan setiap 3 bulan sekali dengan lokasi pemantauan pada stack/cerobong (emisi) boiler dan diesel pada 3 titik sampling sekitar pabrik/ambient.

- Untuk penyimpanan batu bara pada tempat terbuka sehingga kalau musim kemarau, debu batu bara ikut terbawa angin yang menyebabkan banyak debu di sekitar lokasi sampai ke pemukiman dikarenakan penghijauan sebagai penangkap debu yang masih kurang sehingga debu tersebut sampai kepermukiman penduduk. Demikian juga pada musim penghujan, air hujan yang bercampur dengan batu bara akan mengalir ke selokan yang menyebabkan air berwarna hitam
2. Pengelolaan dampak pada kebisingan
- sudah dilakukan pengendalian kebisingan dengan penggunaan alat pelindung diri dan pengaturan jam kerja serta boiler, turbin dan generator ditempatkan dalam ruangan tertutup yang kedap suara sehingga dapat menekan kebisingan disekitar lokasi pembangkit listrik. Selain itu pada lahan terbuka di sekitar lokasi pembangkit listrik ditanami penghijauan yang sekaligus juga penyerap gas CO₂. Untuk penanaman tanaman penghijauan ini sangat kurang sekali jumlahnya sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan semua area yang masih kosong dan memungkinkan untuk ditanami.
 - Hasil pengujian terhadap kebisingan sudah sesuai dengan baku mutu yaitu mengacu pada Kep Men LH nomor 48 tahun 1996 tentang baku mutu kebisingan dan dipantau setiap 3 bulan sekali.
4. Pengelolaan dampak pada kualitas dan kuantitas air
- a. Kualitas air
- PT Pura Power Plant telah dilengkapi dengan sistem water treatment plant untuk mengolah air yang akan digunakan sebagai air pendingin boiler. Sedangkan air pendingin setelah keluar dari kondensor dengan suhu sekitar 36 °C dialirka ke cooling tower agar menjadi lebih dingin dan siap untuk dialirkan kekondensor kembali. Limbah cair yang berasal dari perawatan yaitu sekitar 19 m³/hari dialirkan ke Ipal terpadu PT Pura Group
 - Telah melakukan pengujian terhadap kualitas air dengan beberapa parameter sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah. Pemantauan secara

swapantau dilakukan setiap sebulan sekali dan pemantauan secara sidak dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh laboratorium yang telah terakreditasi.

b. Kuantitas air

- Untuk menghemat pemakaian air, sudah ada pemanfaatan air hujan, yaitu untuk air hujan yang berasal dari lahan terbuka dialirkan kekolam penampung seluas 162 m² untuk kemudian diendapkan dan dialirkan ke Ipal Pura Group untuk diolah lebih lanjut. Sedangkan untuk limpahan air hujan yang berasal dari atap bangunan dialirkan dan ditampung di water treatment untuk selanjutnya diolah menjadi bahan baku air pendingin turbin

5. Pengelolaan dampak pada limbah padat (B3 dan non B3)

a. Limbah padat non B3

- Limbah domestik rumah tangga dikirim ketempat penampungan akhir bekerjasama dengan TPA Pemda
- Pemantauan terhadap limbah padat non B3 tersebut dipantau setiap hari sehingga tidak ada sampah yang menumpuk

b. Limbah B3

- Limbah padat yang dihasilkan berupa abu bawah (bottom ash) dan abu terbang (fly ash). Abu bawah dimanfaatkan untuk industri batako atau paving blok atau sebagai landfill. Sedangkan abu terbang dijual ke pabrik semen sebagai bahan campuran dalam pembuatan semen. Tempat penyimpanan sementara untuk fly ash dan bottom ash sudah mendapatkan ijin dari Kementerian LH
- Limbah B3 berasal dari oli bekas. Limbah tersebut ditampung ditempat penampungan sementara limbah B3 yang sudah memperoleh ijin dari KLH untuk selanjutnya dikirim ke pihak ketiga yang sudah berijin

6. Pengelolaan dampak pada sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

Upaya pengelolaan lingkungan pada komponen sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat sudah dilakukan oleh PT Pura Power Plant antara lain:

- Bantuan air bersih untuk tetangga
- Bantuan biaya penerangan listrik untuk mushola

- Ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa setempat dan bina lingkungan
- Senantiasa memperhatikan keluhan warga sekitar dengan melalui prosedur yang benar

4.3.5. Evaluasi pelaksanaan RKL RPL di Terminal Cargo dan jalan tembus

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara umum telah dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa, tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.91. Evaluasi Pelaksanaan AMDAL Terminal Cargo dan jalan tembus

NO	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PELAKSANAAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1.	Fisiografi	√		Sesuai
2.	Kualitas udara dan kebisingan		√	Belum Sesuai
4.	Kualitas air permukaan	√		Belum Sesuai
5.	Transportasi	√		Sesuai
6.	Tata ruang	√		Sesuai
7.	Ketenagakerjaan	√		Sesuai
8.	Mata pencaharian dan pendapatan	√		Sesuai
9.	Kesehatan masyarakat	√		Sesuai
10.	Kesehatan lingkungan	√		Sesuai

Sumber: Analisis data, 2008

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengelolaan dampak pada fisiografi

Sudah dilakukan penataan saluran drainase, sehingga fungsi awal kawasan sebagai tampungan masih bisa dipertahankan. Disamping hal tersebut juga sudah dilakukan perkerasan permukaan tanah yang masih memungkinkan terjadinya peresapan air permukaan yaitu dengan menggunakan paving blok. Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama kegiatan berlangsung

b. Pengelolaan dampak pada kualitas udara dan kebisingan

Pengelolaan lingkungan yang dilakukan terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan yaitu antara lain dengan membuat buferzone dengan penataan lansekap dan vegetasi pendukung. Buferzone yang

direncanakan yaitu berada pada seluruh pinggir pagar terminal cargo dan jalan tembus secara melingkar termasuk didepan terminal cargo. Tumbuhan yang dipilih yang memiliki tajuk melebar dan dengan kerapatan tinggi misal glodokan daun, glodogan batang, angsana, sono keeling dan asam kanji. Hal tersebut belum seluruhnya dilakukan pada kedua kegiatan tersebut.

Hal lain yang belum ada yaitu pada kegiatan terminal cargo belum ditemukan adanya petunjuk pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat operasional terminal cargo.

c. Pengelolaan dampak pada penurunan kualitas air permukaan

Kualitas air permukaan dipengaruhi oleh air limbah sekitar terminal cargo yang berasal dari penduduk sekitar dan air limbah yang berasal dari kegiatan terminal cargo sendiri. Upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan pemutusan terhadap saluran limbah pada saluran drainase, sehingga akan dibuang ke kolam pengumpul, membuat septik tank dan upaya yang belum terealisasi adalah membuat komunal sistem untuk pengolahan limbah kegiatan terminal cargo dan limbah rumah tangga yang ada disekitar.

Pemantauan dilakukan setiap saat selama operasional kegiatan berlangsung

d. Pengelolaan dampak pada transportasi

Upaya pengelolaan sudah dilakukan yaitu adanya pengaturan pintu masuk dari dan ke terminal cargo, sudah terpasang trafing light untuk mengatur lalu lintas dan sudah dibuat akses jalan arteri sehingga kendaraan tidak langsung masuk jalur cepat.

e. Pengelolaan dampak pada tata ruang

Upaya pengelolaan dalam pengendalian tata ruang harus diperhatikan untuk pengembangan kedepan harus sesuai dengan peraturan daerah Tata Ruang Kabupaten Kudus nomor 8 tahun 2003 tentang rencana tata ruang wilayah

f. Pengelolaan dampak pada sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat

Upaya pengelolaan lingkungan berhubungan dengan bina lingkungan terhadap masyarakat sekitar yaitu perekrutan tenaga kerja dari masyarakat sekitar serta memberi kesempatan pada masyarakat untuk membuka usaha disekitar lokasi

4.4. USULAN PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN AMDAL DAN UKL UPL DI KABUPATEN KUDUS

4.4.1. Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di lingkungan perusahaan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan, ada beberapa hal yang harus disempurnakan oleh pemrakarasa kegiatan.

Adapun usulan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan untuk kelima sampel terpilih adalah sebagai berikut:

1. PT Djarum unit Primary Process

Pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan di PT Djarum unit Primary Process telah menunjukkan hasil yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dapat dilakukan perbaikan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja Ipal yang sudah dipunyai
- b. Progran CSR yang sudah dilakukan selama ini merupakan contoh bagi perusahaan lain, agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan pelaksanaanya

2. PT Enggal Subur Kertas

Pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Enggal Subur Kertas belum menunjukkan hasil yang baik. Untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan pemantauan limbah cair perlu dilakukan secara rutin, peningkatan kinerja dan pemanfaatan Ipal secara maksimal
- b. Perbaikan kualitas udara dan debu yang keluar ke lingkungan dengan cara pemasangan cerobong sesuai dengan standar, penanaman tanaman disekeliling pabrik yang dapat berfungsi menyerap debu
- c. Efisiensi penggunaan air dan membuat sumur resapan air hujan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau

- d. Perlu membuat tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup
 - e. Peningkatan program CSR dan bina lingkungan dengan warga sekitar lokasi pabrik
3. PT Pura Nusa Persada
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Pura Nusa Persada sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kinerja Ipal dan pemanfaatan air maupun lumpur dari sisa proses Ipal
 - b. Mempertahankan penggunaan lahan 60 % untuk lahan tertutup dan 40 % untuk lahan terbuka serta membuat sumur resapan untuk menyimpan cadangan air
 - c. Peningkatan program CSR dan meningkatkan bina lingkungan disekitar lokasi pabrik
4. PT Pura Barutama Unit Power Plant
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Pura Power Plant sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, adalah sebagai berikut:
- a. Efisiensi penggunaan air dan tetap mempertahankan keberadaan polder yang ada disekitar lokasi pabrik
 - b. Pembuatan gudang penyimpanan bahan baku batu bara sehingga tidak menyebabkan debu di musim kemarau dan di musim penghujan batu bara tidak ikut terbawa ke saluran umum
 - c. Penanaman tanaman di sekeliling lokasi pabrik yang dapat berfungsi untuk menapis debu dan kebisingan
 - d. Melaksanakan program CSR dan melakukan bina lingkungan terhadap masyarakat sekitar lokasi pabrik

5. Pembangunan terminal cargo, pusat perdagangan dan rumah toko dan jalan tembus di kawasan BWK IV Kabupaten Kudus

Pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh terminal cargo dan jalan tembus menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terminal cargo belum berfungsi secara maksimal. Untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan fungsi terminal cargo
- b. Membuat buferzone dengan penataan lansekap dan penanaman pohon di sekeliling lokasi terminal cargo dan jalan tembus secara melingkar yang dapat berfungsi untuk memperbaiki kualitas udara
- c. Penataan saluran drainase yang ada di sekitar lokasi terminal cargo karena merupakan daerah tampungan
- d. Membuat komunal sistem untuk pengolahan limbah dari kegiatan terminal cargo dan limbah rumah tangga yang ada disekitar
- e. Melaksanakan program CSR dan melaksanakan bina lingkungan sekitar

4.4.2. Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui masyarakat belum mengetahui dokumen AMDAL dan UKL UPL yang dimiliki oleh pemrakarsa kegiatan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang AMDAL dan UKL UPL mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan AMDAL UKL UPL. Masyarakat dibekali pengetahuan mengenai lingkungan sehingga masyarakat dapat mengetahui permasalahan pengelolaan lingkungan.

Pada pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak melibatkan masyarakat, begitu juga dalam rumusan dokumen AMDAL dan UKL UPL tidak ada unsur masyarakat yang terlibat baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan. Biasanya masyarakat hanya sebagai obyek yang diteliti, misalnya pemrakarsa telah merasa melibatkan masyarakat sekitar bila telah

merekrut tenaga kerja lokal atau melalui pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak akibat usaha/kegiatan.

Keterlibatan masyarakat hendaknya dilakukan mulai dari awal yaitu saat penyusunan studi kelayakan, sehingga akan mengefektifkan keterlibatan masyarakat untuk turut mencegah dampak yang akan timbul. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan disekitar lokasi kegiatan, daerah tempat tinggalnya sendiri, masyarakat diberi akses untuk melaporkan kondisi lingkungan disekitarnya dan melaporkan bila ada pencemaran. Masyarakat sekitar lokasi kegiatan hendaknya mempunyai dokumen UKL UPL perusahaan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dapat ikut serta memantau pelaksanaan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan di lingkungan perusahaan.

4.4.3. Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di Dinas / Instansi

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi mutlak diperlukan kalau ingin kualitas lingkungan tetap terjaga. Pengawasan yang ada melalui kewajiban wajib lapor tiap tiga bulan sekali untuk mengetahui pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ke lapangan. Pengawasan yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak maupun pengawasan secara rutin dan terjadwal dalam suasana diskusi dan bersama-sama memecahkan masalah yang ada. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam laporan sebagai rekomendasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk memberi sanksi atau penghargaan dan menjadi dasar kebijakan untuk pengelolaan lingkungan sekitar serta dasar dikeluarkan ijin atau perpanjangan.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha kegiatan yang ada di Kabupaten Kudus menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi. Efektivitas pelaksanaan pengawasan dapat berjalan apabila ada koordinasi dengan instansi lain yang juga membidangi sektor industri yaitu Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja.

Mekanisme koordinasi antar Dinas/Instansi dalam pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Masalah lingkungan adalah masalah lintas sektoral tidak hanya bisa ditangani satu sektor saja. Kurangnya koordinasi antara Dinas/Instansi dalam pengawasan pengelolaan lingkungan menyebabkan ketidak terpaduan kebijakan. Koordinasi yang ada sekarang bersifat reaktif bila ada pengaduan pencemaran dari masyarakat maka Dinas/Instansi terkait diundang untuk membahas dan memecahkan masalah. Pengawasan rutin dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi.

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Langkah awal dari penegakan hukum adalah penegakan preventif yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Sanksi administratif atau sanksi pidana merupakan bagian akhir dari penegakan hukum. Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang harus disiapkan adalah kelembagaan dan peraturannya sendiri.

Pemberian sanksi bagi kegiatan usaha yang sudah mempunyai dan melaksanakan studi lingkungan dan yang belum mempunyai dan melaksanakan studi lingkungan harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Sanksi administratif bagi usaha yang melakukan pelanggaran, Kepala Daerah berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan dengan beban biaya dari penanggung jawab usaha. Pencabutan perijinan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu ketentuan pidana bagi pihak yang telah melakukan tindakan baik sengaja atau tidak menyebabkan kerusakan lingkungan diancam pidana penjara dan denda.

Peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan beserta sanksi administrasi dan denda bagi usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran sesuai kondisi daerah dan kualitas yang diharapkan sangat diperlukan di daerah sehingga dapat menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan evaluasi pelaksanaan AMDAL UKL UPL tersebut pada bab IV pada beberapa sampel usaha/kegiatan yang ada di Kabupaten Kudus maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada masing-masing kegiatan masih pada tahap pengelolaan limbah yang dihasilkan belum mengarah pada kesadaran untuk melestarikan lingkungan
2. Pelaku kegiatan usaha masih menganggap bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya, dan pihak pengusaha belum merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan
3. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan relatif masih rendah, masyarakat masih beranggapan bahwa kegiatan usaha yang banyak memberikan bantuan dan menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan kegiatan usaha yang telah peduli terhadap lingkungan . Masyarakat tidak mempermasalahkan apakah industri tersebut mencemari lingkungan atau tidak. Sebagian masyarakat yang berkeinginan terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak mempunyai akses untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
4. Dorongan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan adanya pengawasan dari pemerintah maupun untuk meredam protes atau mencegah terjadinya gejolak masyarakat di sekitar lokasi, belum merupakan kesadaran untuk melakukan pengelolaan lingkungan

5. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kudus masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak industri dan akan terjun kelapangan apabila terjadi kasus. Pengawasan secara bersama-sama antar Dinas/Instansi terkait belum jelas mekanismenya, sehingga masing-masing instansi belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik
6. Dari hasil penelitian di perusahaan, di masyarakat dan Dinas/Instansi diketahui bahwa kelima sampel yaitu PT Djarum Primary Proses 95,3 % pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah efektif. PT Pura Nusa Persada 86,6 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan sudah efektif. PT Pura Unit Power Plant 58,6 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan cukup efektif. PT Enggal Subur Kertas < 40 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan belum efektif, sedangkan untuk dokumen ANDAL RKL RPL kegiatan Terminal Cargo 68,3 % pelaksanaan pengelolaan lingkungan cukup efektif.
7. Belum adanya peraturan daerah yang khusus menangani masalah pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kudus

5.2. SARAN

1. Dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan perlu dilakukan secara aktif terprogram serta kontinu dan koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas/Instansi terkait sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh pelaku kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
2. Perlu adanya sosialisasi, keterlibatan dan keterbukaan informasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat mengetahui akan kemungkinan adanya dampak yang akan terjadi dan pengelolaan yang dilakukan oleh suatu usaha.
3. Perlu sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup tentang kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan oleh industri secara terus

menerus agar bagi usaha/kegiatan yang sudah mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan

4. Bagi pihak pemrakarasa kegiatan diharapkan terbuka memberikan informasi mengenai permasalahan pengelolaan lingkungan yang ada di perusahaanya
5. Bagi kegiatan terminal cargo diharapkan dapat segera berfungsi secara maksimal sesuai dengan peruntukannya
6. Perlu adanya peraturan daerah yang khusus menangani masalah pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kudus
7. Perlu penegakan hukum dan sanksi yang tegas kepada pemrakarsa/industri yang sudah atau belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
8. Pemberian penghargaan bagi usaha/kegiatan yang telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang ada yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesadaran pelaku industri dalam mengelola lingkungan serta pemberian sanksi bagi usaha/kegiatan yang belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Suryo, 2004, Gagasan Penguatan AMDAL Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipresentasikan pada pertemuan PPLH se Jawa, Yogyakarta.
- Anonimous, 2002, Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2003-2008, bagian Hukum setda kabupaten Kudus.
- Anonimous, 2008, Laporan Pemantauan Kualitas Air Kabupaten Kudus tahun 2007, Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi kabupaten Kudus.
- Arikunto, Suharsiwi, 2002, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Fandeli, Chafid, 2000, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemanannya Dalam Pembangunan, Liberty, Yogyakarta.
- Gunarwan Suratmo, 2002, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hadi, Sudharto P, 1995, Dimensi Sosial dan Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hadi, Sudharto P, 2002, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hadi, Sudharto P, 2005, Aspek Sosial AMDAL, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hadi, Sudharto P, 2005, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial Kuantitatif, Kualitatif an Kaji Tindak, Magister Ilmu Lingkungan, UNDIP
- Hadi, Sudharto P dan Samekto Adji, 2007, Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, semarang
- Handoko. T. Hani. 2000. *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Perilaku*. BPF. Yogyakarta.
- Hardjosoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hidayat Arif dan Samekto Adji, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan Diera Otonomi Daerah, Badan penerbit UNDIP.
- Keraf, Sonny A, 2002, Etika Lingkungan, penerbit buku kompas, Jakarta.
- _____, 2007, Pelaksanaan Perijinan dan kedudukan Amdal / UKL UPL Untuk Kegiatan PMA / PMDN Dipropinsi Jawa Tengah.
- Keputusan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi AMDAL

- Komaruddin, 2004, Ensiklopedia Manajemen, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Bina Aksara. Jakarta
- Media Cetak, Koran Suara Akar Rumput, Nopember 2008, Sebagian Besar Dokumen AMDAL Berkualitas Buruk, Edisi 03-09 halaman 8.
- PPLH Undip, Kumpulan peraturan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Semarang
- PPLH Undip dan Biro Bina Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Amdal di Jawa Tengah, 1997
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL UPL di Kabupaten Kudus
- Prasetyo, Bambang, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka,
- Soemarwoto, Otto, 1989, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wardhana, Wisnu Arya, 1995, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi offset Yogyakarta.